



Erick Thohir Bersyukur
50.000 Warga Divaksinasi
dalam 9 Hari



Keputusan
Impor Beras
Perlu Dievaluasi

Menhub Pastikan
Tak Ada Larangan
Mudik Lebaran



INVESTOR DAILY

BERITA SATU
MEDIA HOLDINGS

INDONESIA

RABU 17 MARET 2021

Next Gen Summit 2021

FREE REGISTRATION & LIVE STREAM
nextgen.beritasatu.com

MONEY & BANKING

Percepat Transformasi Digital, Industri Telko Butuh Insentif

Beberapa Program Renstra Kemkominfo Tahun 2020-2024

No	Program Kemkominfo	Tahun
1	Bangun 9.583 BTS berteknologi 4G LTE di wilayah 3T	2022
2	Bangun 121.739 lokasi akses internet untuk layanan publik	2024
3	Bangun dan operasikan satelit Satria-1 dan Satria-2	2023 dan 2024
4	Siaran TV digital	Nov-22
5	Implementasi 5G	2021-2024

Sumber: Kemkominfo, diolah Investor Daily

Oleh Emanuel Kure dan Abdul Muslim

JAKARTA - Langkah pemerintah membangun Palapa Ring dan menyiapkan Satelit Satria untuk mendigitalkan seluruh wilayah NKRI sudah tepat. Namun, untuk mempercepat transformasi digital, pemerintah perlu memberikan insentif kepada para penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Tanah Air.

Insentif yang dibutuhkan industri TIK di antaranya relaksasi Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi, BHP Telekomunikasi, kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation/USO*), serta insentif fiskal untuk investasi penggelaran jaringan TIK, khususnya di wilayah nonkomersial atau tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di sisi lain, pemerintah juga harus lebih intens berkolaborasi dan melibatkan lebih banyak penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi secara masif guna memperluas penetrasi internet di wilayah baru dan kawasan 3T. Melalui langkah tersebut, target 'merdeka sinyal' dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa digital bisa terealisasi lebih cepat.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI)/Presiden Direktur PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) Merza Fachys, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Ajiatel) Muhammad Arif Angga, *Group Head Corporate Communications* XL Axiata Tri Wahyuningsih, dan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza. Mereka dihubungi *Investor Daily* secara terpisah di Jakarta, Selasa (16/3).

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail menjelaskan, ada lima langkah yang ditempuh pemerintah untuk mempercepat transformasi digital, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet.

Langkah lainnya, menurut Ismail, adalah menyiapkan *roadmap* transformasi digital sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan SDM dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

"Kalau kita tidak lakukan transformasi digital saat ini, ekonomi nasional kita akan tertinggal. Seluruh dunia sekarang sedang mempercepat transformasi digital, karena transformasi digital diyakini bisa memberikan harapan untuk *survive*, terutama di era pandemi Covid-19," ujar dia.

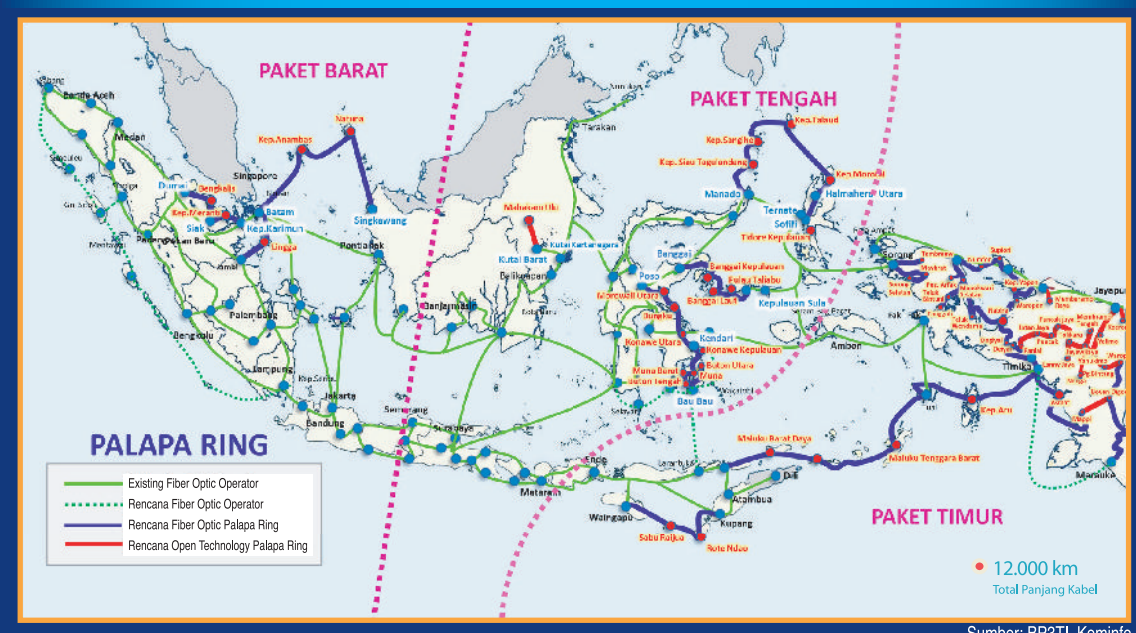
Renstra 2020-2024

Menurut Dirjen SDPPI Kemkominfo, Ismail, pemerintah melalui Kemkominfo sudah menetapkan rencana pembangunan sektor TIK dalam jangka pendek hingga menengah. "Kolaborasi semua pihak terkait dibutuhkan untuk merealisasikan seluruh wilayah Indonesia merdeka sinyal dan mewujudkan program Indonesia Digital," tegas dia.

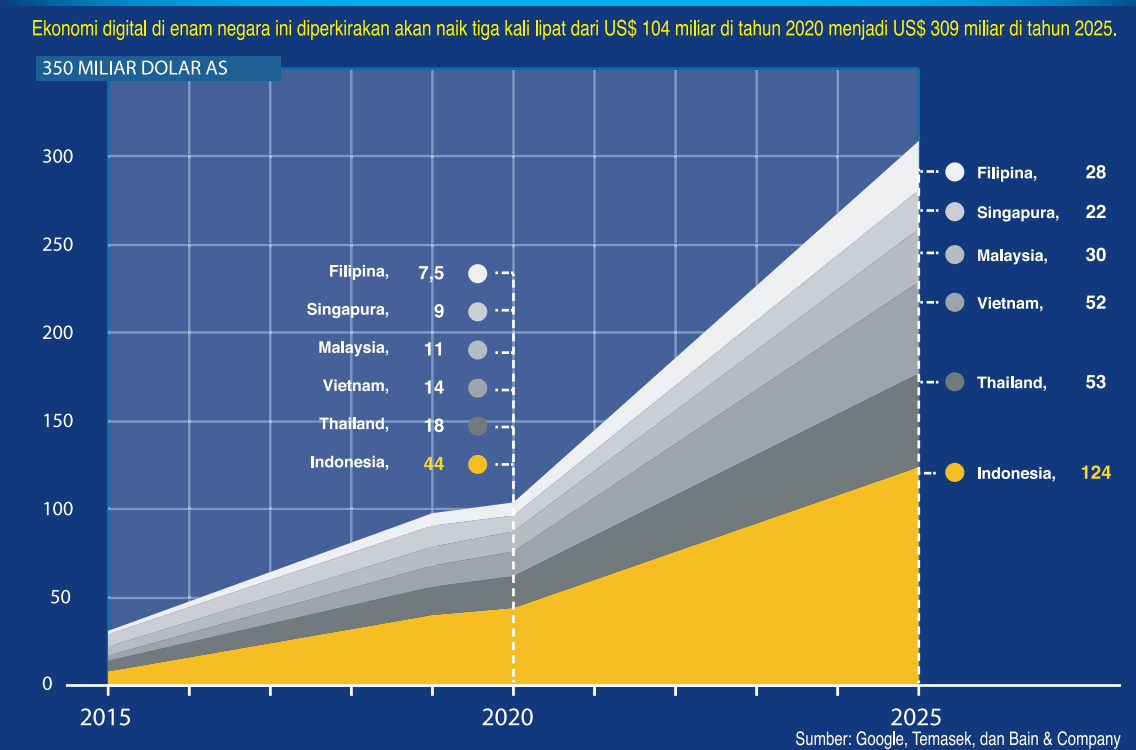
Dia mengemukakan, dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemkominfo 2020-2024, ada tiga tujuan utama, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, mempercepat transformasi digital dalam tiga kerangka nasional (industri, pemerintahan, dan masyarakat), serta meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Renstra tersebut, kata dia, mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024.

Peta Palapa Ring



Nilai Ekonomi Digital 6 Negara Asia Tenggara



Hery Gunardi

BSI Targetkan Penjualan Sukuk Ritel SR014 Rp 500 Miliar

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) sebagai mitra distribusi baru penjualan surat berharga syariah negara ritel atau Sukuk Ritel SR014. Dalam penjualan perdana SR014, Bank Syariah Indonesia menargetkan penjualan sebesar Rp 500 miliar.

>> 24

MATAHARI

MACRO ECONOMICS

Peminat SUN Berkurang

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 18,9 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana dengan penawaran masuk (*incoming bids*) mencapai Rp 40,08 triliun pada Selasa (16/3). Dibandingkan lelang SUN sebelumnya, penyerapan dana itu tercatat lebih besar, namun untuk nilai penawaran masuk justru turun yang menandakan berkurangnya peminat.

>> 6

MARKETS & CORPORATE

Sinarmas Keluar dari Proyek Chengdu Garden

Sinarmas Land Ltd, induk usaha PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), mengakhiri investasinya atau exit dari perusahaan patungan Chengdu Youxing Garden Co Ltd di Tiongkok, yang didirikan pada 2018. Sebagai dampaknya, perseroan meraih keuntungan atau *pre-tax return* senilai RMB 101,03 juta atau setara Sin\$ 20,87 juta dari total investasi Sin\$ 102,68 juta.

>> 15



Gaikindo Sambut Positif Diskon PPnBM untuk Mobil 2.500 Cc

Oleh Leonard Tjahyoputra dan Sanya Dinda

JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut positif rencana pemerintah memperluas cakupan jenis mobil yang memperoleh relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Rencana diskon PPnBM untuk mobil dengan volume silinder hingga 2.500 cc diyakini bakal menggairahkan pasar mobil dan mempercepat kebangkitan industri otomotif dalam negeri setelah terdampak pandemi.

"Masyarakat juga mendapat manfaat. Industri tumbuh, sehingga perekonomian juga cepat pulih ya. Harapannya begitu," kata Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara kepada *Investor Daily*, Selasa (16/3/2021).

Dia menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang rencana perluasan cakupan diskon PPnBM untuk mobil berkapasitas isi silinder hingga 2.500 cc dengan

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 70%. Perluasan diskon tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo agar industri otomotif dan turunannya bisa lebih cepat pulih usai terpuruk cukup parah akibat pandemi Covid-19.

"Presiden menyampaikan, kalau dilihat memang insentif bisa diperluas untuk di atas 1.500 cc asalkan TKDN-nya 70% itu mungkin bisa jadi pertimbangan," ujar Menkeu di depan Komisi XI DPR, Selasa (16/3).

Saat ini, pemerintah telah memberikan diskon PPnBM untuk pembelian mobil baru mulai Maret hingga Desember 2021 dengan kapasitas silinder hingga 1.500 cc. Diskon ini diberikan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama periode Maret-Mei 2021 dengan besaran diskon PPnBM 100%, kemudian periode Juni-Agustus 2021 diskon 50%, dan periode September-Desember 2021 dengan diskon 25%.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang



Kukuh Kumara

Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Anggaran 2021.

Kukuh Kumara belum mengetahui merek mobil di atas 1.500 cc sampai 2.500 cc yang akan mendapatkan perluasan relaksasi PPnBM ini. Menurut dia, setelah aturan perluasan relaksasi PPnBM untuk mobil di atas 1.500 cc diterbitkan, pelaku industri otomotif baru akan mengajukan produknya untuk mendapatkan

Renstra Kemkominfo juga mengacu pada perkembangan TIK global.

Menurut Ismail, Kemkominfo pun telah memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 111,25 triliun untuk merealisasikan Renstra hingga 2024. Perinciannya, pada 2020 membutuhkan anggaran Rp 8,09 triliun, 2021 sebanyak Rp 26,13 triliun, 2022 sebesar Rp 27,08 triliun, 2023 senilai Rp 24,61 triliun, dan 2024 sejumlah Rp 25 triliun.

Dia mengakui, pandemi Covid-19 telah meningkatkan kebutuhan

masyarakat terhadap koneksi internet yang andal dan mendorong digitalisasi. Para pelaku usaha, industri, dan sektor ekonomi, didesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya tetap eksis dan berkelanjutan.

Ismail mengungkapkan, lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan Presiden menjadi fondasi pengembangan *roadmap* Indonesia Digital. Langkah itu meliputi pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan

berkualitas tinggi serta mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi di berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, di antaranya pusat data, infrastruktur *cloud*, dan identitas digital nasional.

Bersambung ke hal 2

investor.id

Top 5 Brand Kendaraan Roda 4 Populer di Indonesia dengan Jenis 2500 cc

Brand Mobil	Harga (Rp Juta)	Penjualan (Unit)	
		Tahun 2019	Tahun 2020
Toyota All New Kijang Inova G AT D 2015	331	10.307	3.451
Toyota All New Kijang Inova G D 2015	336	7.835	2.571
Mitsubishi Pajero Sport 2.4L DAKAR (4x2) 8AT	624	12.478	7.359
Nissan X-Trail 2.5 Upper CVT	542	124	173
Honda CIVIC 5D E	432	1.230	205

Sumber: Gaikindo, diolah Investor Daily

diskon. Kemudian, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menentukan mobil-mobil yang memenuhi persyaratan, terutama dengan TKDN minimal 70%.

Menurut Kukuh, pada Maret ini terdapat indikasi peningkatan penjualan mobil secara signifikan, terutama 21 mobil yang mendapatkan relaksasi PPnBM untuk kategori 1.500 cc ke bawah. Ini terlihat dari permintaan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang melonjak. "Jadi pesanan kendaraan meningkat cukup baik, cukup bagus. Kita tunggu saja realisasinya seperti

apa. Karena orang bisa memesan kemudian dan kemudian tidak merealisasikan, itu akan ketahuan di akhir bulan," kata Kukuh.

Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, berharap perluasan relaksasi PPnBM ini dapat meningkatkan penjualan mobil.

Bersambung ke hal 11

BERITA SATU .COM

ROMBAK KEBIJAKAN LUAR NEGERI PASCA-BREXIT

Inggris Alihkan Fokus Strategis ke Asia

Oleh Happy Amanda Amalia

► LONDON – Pemerintah Inggris mengumumkan rencananya pada Selasa (16/3) untuk mengalihkan fokus strategisnya ke Asia. Otoritas juga mengambil langkah melawan Rusia dengan meningkatkan persediaan nuklirnya secara kontroversial, yang mana menjadi salah satu dari perombakan kebijakan keamanan, pertahanan, dan luar negeri Inggris sejak Perang Dingin.

Kesimpulan yang tertuang dalam “Kajian Terintegrasi” pemerintah atau *Integrated Review* itu dibuat selama satu tahun terakhir, di saat Inggris mengalibrasikan ulang kebijakan luar negerinya pasca-Brexit. Ini termasuk menyebut Tiongkok sebagai pesaing sistemik, yang juga memerlukan keterlibatan.

Dokumen kesimpulan setebal 120 halaman dengan judul “Inggris Global di Era Kompetitif” atau *Global Britain in a Competitive Age* itu pun telah mengidentifikasi Rusia sebagai ancaman langsung paling akut terhadap Inggris yang menimbulkan spektrum penuh berbahaya.

Dokumen tersebut juga mengemukakan peningkatan persenjataan nuklir Inggris. Pengumuman itu bertentangan dengan komitmen sebelumnya untuk mengurangi persediaan menjadi 180 hulu ledak nuklir, dan berjanji meningkatkannya menjadi 260 pada akhir dekade, sebagai bentuk pengakuan atas lingkungan keamanan yang berkembang.

“Sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat demokratis adalah pendukung terkuat tatanan internasional yang terbuka dan tangguh. Agar terbuka, kita juga harus aman. Melindungi rakyat kita, tanah air kita, dan demokrasi kita adalah tugas pertama pemerintah mana pun,” demikian tulisan Perdana Menteri Boris Johnson dalam kata pengantar

kajian tersebut, yang dilansir AFP.

Menurut Johnson meningkatkan penangkal nuklir Inggris, yang dipertahankan melalui empat kapal selam bersenjata nuklir, adalah bagian dari program investasi pertahanan terbesar Inggris sejak akhir Perang Dingin.

“Ini akan menunjukkan kepada sekutu-sekutu kami, di Eropa dan sekitarnya, bahwa mereka selalu dapat mengandalkan Inggris ketika benar-benar penting,” tambah dia.

Pesaing Sistemik

Sebagai informasi, hasil Kajian Terintegrasi dirilis ketika hubungan Inggris dengan Rusia dan Tiongkok menjadi semakin tegang atas berbagai masalah. Mulai dari isu mata-mata, serangan siber (*cyber-attacks*) hingga hak asasi manusia.

Laporan tersebut turut mengidentifikasi kawasan Indo-Pasifik – termasuk kekuatan-kekuatan utama di Asia, seperti India, Jepang dan Korea Selatan (Korsel); serta negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Vietnam – yang dipandang sangat kritis bagi ambisi ekonomi, keamanan dan global Inggris untuk mendukung keterbukaan masyarakat.

Bahkan, Inggris disebut-sebut telah mengajukan status kemitraan di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean). Johnson pun

dijadwalkan melakukan kunjungan pertamanya ke India pada April mendatang, setelah keluar dari blok Uni Eropa (UE).

Di sisi lain, meskipun Tiongkok digambarkan sebagai pesaing sistemik, hasil kajian terintegrasi mencatat kekuatannya yang berkembang. Di samping itu, ketegasan internasionalnya kemungkinan besar menjadi faktor geopolitik paling signifikan dalam dekade ini.

Laporan tersebut menyimpulkan, bahwa kerja sama dengan Tiongkok akan sangat penting dalam mengatasi berbagai tantangan transnasional, khususnya perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

“Terbuka, ekonomi perdagangan seperti Inggris perlu terlibat dengan Tiongkok, serta tetap terbuka untuk perdagangan dan investasi Tiongkok,” katanya, seraya menandai kebutuhan untuk melindungi praktik-praktik yang berdampak buruk pada kemakmuran dan keamanan.

Sedangkan pandangan terhadap kerja sama dengan Rusia di masa depan, kajian Inggris menunjukkan hasil yang lebih pesimistis.

“Rusia akan tetap menjadi ancaman langsung paling akut bagi Inggris. Sampai hubungan dengan pemerintahnya membaik, kami akan secara aktif mencegah dan mempertahankan diri dari spektrum penuh ancaman dari Moskow,” tuturnya.

Ketinggalan Zaman

Bidang utama lainnya yang dibahas dalam laporan kajian, adalah mengenai rencana militer untuk mengadopsi teknologi mutakhir, seperti *drone* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*). Juga fokus baru pada antariksa dan dunia siber, serta perombakan kemampuan Inggris untuk menanggapi ancaman keamanan dengan penciptaan ruang kendali operasi (*situation room*) ala Gedung Putih.

Pusat Operasi Penanggulangan Terorisme baru juga diusulkan.

Kajian tersebut diklaim sebagai bentuk respons terhadap dunia yang berubah, di mana Inggris tidak dapat



Pembatasan Akses

Seorang pria mengakses Facebook dengan ponselnya di Naypyidaw, Selasa (16/3). Otoritas Myanmar memerintahkan perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk membatasi layanan pada jaringan data seluler, menyusul kudeta militer 1 Februari 2021.

hanya mengandalkan sistem internasional yang semakin ketinggalan zaman.

Isi kajian juga menekankan pentingnya aliansi, termasuk dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), sekaligus menetapkan kebijakan luar negeri baru terhadap peningkatan aktivisme internasional untuk membentuk tatanan internasional yang lebih terbuka di mana demokrasi berkembang.

Namun, perhatian langsung kemungkinan besar akan tertuju pada senjata nuklir. Ini mengingat ada seruan berulang kali agar program Trident Inggris dibatalkan setelah ada gerakan global menuju perlucutan senjata pasca Perang Dingin.

Organisasi Kampanye Pelucutan Senjata Nuklir (Campaign for Nuclear Disarmament /CND) dan Kampanye Internasional untuk Menghapus Senjata Nuklir (/International Cam-

paign to Abolish Nuclear Weapons ICAN) juga sama-sama mengancam tindakan tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif ICAN Beatrice Fihn, Inggris dituding telah mendorong perlombaan senjata nuklir baru yang berbahaya. “Ini tindakan tidak bertanggung jawab, berbahaya dan melanggar hukum internasional. Ini adalah maskulinitas beracun yang dipamerkan,” ujarnya. (afp)

Percepat Transformasi Digital, Industri Telko Butuh Insentif

Sumbangan dari hal 1

Langkah selanjutnya, menurut Ismail, adalah meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif, membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka, dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Pemerintah juga terus berupaya membangun budaya digital, memanfaatkan bonus demografi, memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital, serta melakukan harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk inovasi,” papar dia.

Butuh Insentif

Wakil Ketua Umum ATSI/Presdir Smartfren, Merza Fachys mengakui, untuk mewujudkan transformasi digital secara menyeluruh membutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). “Transformasi digital bukan sekadar tugas Kemenkominfo atau sektor industri TIK saja,” tegas dia.

Menurut Merza, semua pihak terkait yang terlibat dalam transformasi digital juga perlu diperjelas lingkup tanggung jawab dan penugasannya. “Pemetaan perlu dilakukan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab pada tugas tertentu dan kapan harus dilaksanakan. Hak dan kewajibannya pun harus diperjelas dan fair,” ujar dia.

Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif Angga menjelaskan, program yang dijalankan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo sudah berjalan cukup baik untuk membangun akses internet ke wilayah 3T.

Bakti bertugas membangun jaringan telekomunikasi di wilayah 3T dari iuran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi operator telekomunikasi yang disebut USO. Juga rencana peluncuran satelit Satria-1 pada kuartal III-2023.

“Tapi, menurut saya, memang harus lebih banyak melibatkan penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi lebih luas lagi untuk menyentuh daerah-daerah yang belum masuk program 3T,” tutur Arif.

Arif Angga mengungkapkan, banyak penyelenggara jasa/operator telekomunikasi berharap dana USO untuk telekomunikasi dilibatkan lebih banyak lagi dalam implementasinya. “Kolaborasi juga diharapkan dari para penyelenggara telekomunikasi, termasuk mendapatkan *endorsement* dari pemda,” ujar dia.

Dia menegaskan, dalam proses percepatan penetrasi jaringan telekomunikasi, pemda ada di garda terdepan dan memiliki data-data yang lengkap di daerahnya. Mereka pun bisa berko-

laborasi dengan penyelenggara jasa atau jaringan telekomunikasi dalam berbagai bentuk untuk masyarakat.

“Para penyelenggara jasa telekomunikasi juga mengharapkan insentif, bisa berupa kemudahan izin, pengurangan PNPB (penerimaan negara bukan pajak), atau dalam bentuk paket-paket pinjaman ringan untuk kepentingan resntra,” tandas dia.

Arif menambahkan, peran pemerintah dan pelaku usaha dalam menyiapkan SDM talenta digital unggul juga sangat penting. “Karena itu, jangan hanya datang membawa teknologi, tapi juga pelatihan dan *transfer knowledge* sehingga akan tercipta ekosistem digital baru,” ucap dia.

Perihal rencana implementasi 5G, Arif menyarankan agar regulasi di pusat dan daerah diharmonisasi dengan baik. Soalnya, pembangunan kedua infrastruktur ini akan sangat masif jika 5G diterapkan. “Kita bisa mulai dari kota-kota besar dulu karena investasinya pasti sangat besar,” kata dia.

Perlu Kolaborasi

Sementara itu, *Group Head Corporate Communications* XL Axiata, Tri Wahyuningsih mengemukakan, pembangunan jaringan akses internet berteknologi *mobile broadband* 4G LTE sangat dipengaruhi beberapa faktor, seperti spektrum frekuensi, ketersediaan jaringan transmisi/*transport*, lokasi *site*, ketersediaan infrastruktur jalan, serta infrastruktur pendukung lainnya, seperti listrik dan transportasi.

“Jika faktor-faktor pendukung belum tersedia, tantangan yang dihadapi untuk membangun jaringan internet akan lebih besar, sehingga diperlukan beberapa solusi yang komprehensif, efektif, dan efisien,” kata dia.

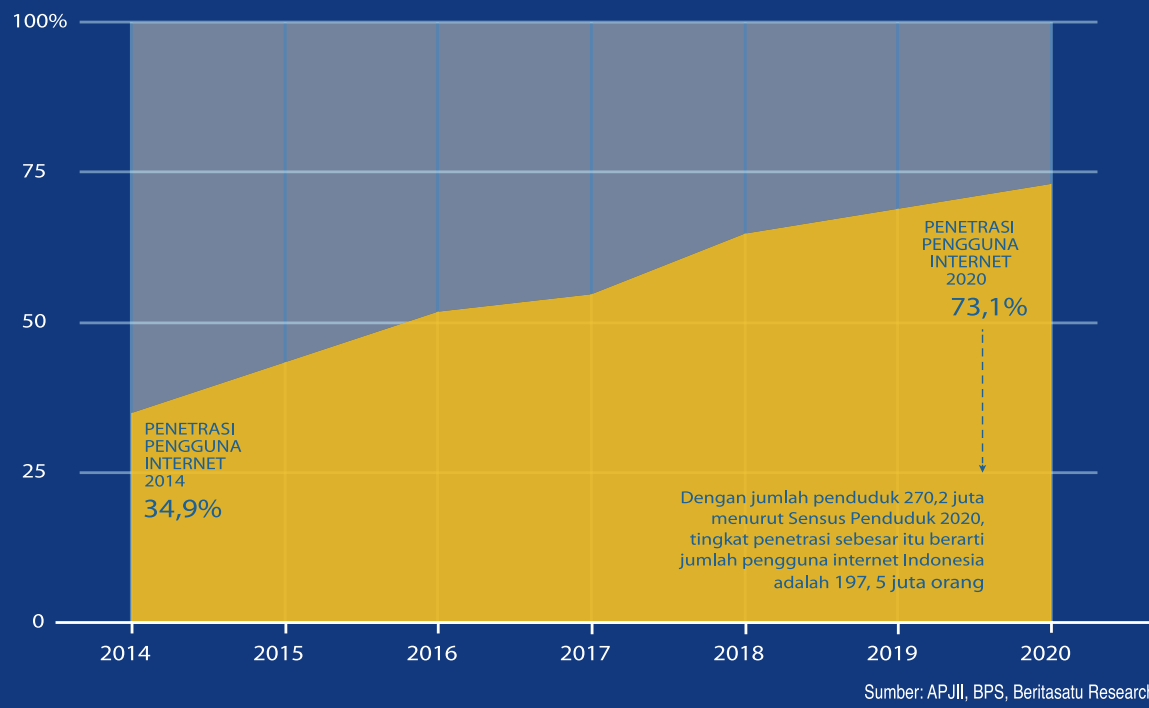
Salah satu solusinya, menurut Tri Wahyuningsih, adalah menjalin kolaborasi di antara *stakeholder* yang terlibat. “Insentif yang diberikan pemerintah pusat dan daerah juga akan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jaringan akses,” kata Ayu, panggilan akrab Tri Wahyuningsih.

Solusi lainnya adalah memanfaatkan teknologi yang cocok untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan akses *broadband* di daerah 3T, *remote*, atau rural, di antaranya teknologi satelit berkapasitas data besar (*high throughput satellites/HTS*) dan teknologi alternatif lain, seperti *high altitude platform station* (HAPS).

Ayu menjelaskan, langkah pemerintah membangun Palapa Ring dan menyiapkan peluncuran satelit Satria guna mendukung teknologi HTS berkapasitas 150-300 Gbps sudah sangat tepat. Ketersediaan kapasitas HTS dan Palapa Ring yang besar dapat mendukung layanan *internet broadband* berkecepatan tinggi di semua titik dengan kualitas layanan

Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia

Sejak 2016, jumlah pengguna internet lebih banyak dari mereka yang belum memakai teknologi tersebut. Saat ini sekitar 3 dari 4 penduduk Indonesia sudah memakai internet.



yang baik, termasuk pemanfaatan bagi jaringan *transport*, baik *backbone*, maupun pengalut (*backhaul*).

Namun, menurut Ayu, sampai saat ini ada beberapa insentif penting yang belum diberikan pemerintah kepada penyelenggara telekomunikasi guna mempercepat transformasi digital di Tanah Air.

Insentif itu di antaranya relaksasi BHP Frekuensi, BHP Telekomunikasi, dan USO. Juga insentif fiskal untuk investasi pengeluaran jaringan TIK, khususnya di wilayah 3T. Juga perlu ada insentif fiskal untuk mendorong investasi pengeluaran teknologi 5G.

“Beban *regulatory charges* yang tinggi kepada penyelenggara telekomunikasi akan menyebabkan kemampuan membangun dan melakukan ekspansi infrastruktur jaringan akses sangat terbatas. Sebab, diperlukan investasi dan biaya operasional yang besar,” papar dia.

Menurut Ayu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemda, pelaku industri telekomunikasi, penyedia menara, penyedia infrastruktur pasif, serta pihak swasta lainnya harus dioptimalkan.

Di sisi lain, Ketua Umum APJII, Jamalul Izza mengatakan, besaran tarif bukan masalah utama dalam membangun jaringan internet di Indonesia. “Biaya itu nomor dua. Yang jadi masalah adalah *last mile access* (media sambungan antara *internet service provider* kepada pelanggan). Kami sedang mencari solusinya agar layanan internet bisa berkualitas dan terjangkau di seluruh Indonesia,” tutur dia.

Izza mengakui, untuk menjangkau daerah 3T lebih *feasible* menggunakan satelit (Vsat). Bahkan, daerah non-3T tapi berada di wilayah *blank spot* bisa menggunakan satelit.

Dia menambahkan, APJII punya program Desa Internet Mandiri, di mana para anggotanya bekerja sama dengan pemda untuk menyediakan layanan internet. “Biasanya kami kerja sama dengan Bumdes. Nanti *profit sharing*,” ujar dia.

Untuk itu, menurut Izza, pihaknya mengharapkan adanya insentif bagi anggota APJII, di antaranya dalam bentuk kemudahan akses.

12.548 Desa

Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Ismail mengatakan, dalam Renstra 2020-2024, Kemenkominfo menetapkan peta jalan (*roadmap*) untuk mencapai tujuan utama pembangunan TIK. Pertama, mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.

Kedua, melakukan transformasi digital di sektor-sektor strategis, di antaranya pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran agar utilitas infrastruktur meningkat.

“Ketiga yaitu percepatan integrasi pusat data nasional, mempersiapkan SDM talenta digital. Sedangkan keempat, kami menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital,” ucap dia.

Aksi yang tengah dijalankan Kemenkominfo, kata dia, di antaranya

membangun 9.583 *base transceiver station* (BTS) dan 121.739 titik lokasi akses internet, meluncurkan dua satelit Satria, membangun pusat data nasional, dan mengimplementasikan teknologi seluler 5G.

“Pemerintah juga akan membangun BTS berteknologi internet 4G LTE di daerah 3T nonkomersial guna mempercepat transformasi digital,” tandas dia.

Berdasarkan data Kemenkominfo, dari total 83.218 desa dan kelurahan di wilayah Indonesia, masih terdapat 12.548 (15,07%) desa dan kelurahan yang belum terjangkau jaringan internet 4G LTE. Sebanyak 9.113 (73%) desa dan kelurahan di antaranya merupakan wilayah 3T.

Di daerah-daerah tersebut, jaringan internet bakal dibangun Kemenkominfo melalui Bakti. Sisanya, 3.435 desa dan kelurahan (27%) yang masuk wilayah non-3T (komersial) akan dibangun operator telekomunikasi.

Kemenkominfo menyiapkan dua satelit multifungsi, yakni satelit Satria-1 yang merupakan jenis Ka-band berkapasitas sekitar 150 Gbps dan Satria-2 berkapasitas 300 Gbps. Dua satelit tersebut secara berurutan akan beroperasi pada kuartal III-2023 dan 2024. Pengadaan Satria-1 dilakukan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Menkominfo, Johnny G Plate baru-baru ini mengatakan, pemenuhan pembiayaan proyek tersebut sudah tuntas dan mulai masuk konstruksi. Proyek kerja sama dengan PT Satelit Nusantara Tiga (SNT), anak usaha PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), itu

dibiayai belanja modal (*capex*) US\$ 545 juta atau sekitar Rp 7,68 triliun. Proyek ini didanai sindikasi BPI France dan didukung Banco Santander, HSBC Continental Europe, serta The Korea Development Bank (KDB).

Johnny Plate menjelaskan, Satria-1 digunakan untuk penyediaan akses internet/transmisi digital bagi 150.000 titik layanan publik yang belum terjangkau internet, dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia yang sudah terjangkau internet. Fasilitas internet untuk 150.000 titik layanan publik itu terdiri atas 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah/pesantren, 47.900 kantor desa/kelurahan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya.

Kemenkominfo pun berusaha agar utilisasi kabel serat optik tulang punggung (*backbone*) Palapa Ring mencapai 50-60% hingga tahun 2024. Jaringan *backbone* Palapa Ring terbangun sepanjang 12.229 km, terdiri atas 4.156 km kabel darat (*inland*) dan 8.073 km kabel laut (SKKL).

Panjang jaringan Palapa Ring Paket Barat mencapai 2.275 km, Palapa Ring Paket Tengah 2.995 km, serta Palapa Ring Paket Timur 6.878 km. Pada akhir Februari lalu, tingkat utilisasi Palapa Ring Barat mencapai 36,67% (serat optik), Palapa Ring Tengah 20,33% (serat optik), serta Palapa Ring Timur 17% (serat optik) dan 47,27% (*microwave*).

Dirjen SDPPI, Ismail mengemukakan, Kemenkominfo akan memfasilitasi pengalangan infrastruktur jaringan 5G di enam ibu kota provinsi di Jawa yang dianggap paling siap, lima destinasi wisata super prioritas, dan satu industri manufaktur. “Untuk itu, Kemenkominfo mulai melelang pita frekuensi 3,5 GHz yang akan digunakan untuk perluasan akses internet 4G dan kemungkinan 5G,” papar dia.

Tantangan Pembangunan

Ismail mengakui, pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi tantangan tersendiri. Sebab, Indonesia memiliki luas wilayah 7,8 juta km², yang 1,9 juta km² di antaranya daratan. Daratan pun berupa 17.500 pulau dan 3,25 juta km² wilayah perairan yang 2,55 juta di antaranya masuk zona ekonomi eksklusif.

“Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk akses minimal 4G dengan harga yang *affordable* menjadi tantangan cukup berat. Tapi ini harus dituntaskan,” tandas dia.

Kemenkominfo, kata Ismail, terus berupaya agar regulasi sektor TIK tidak tumpang tindih, termasuk aturan berbagi jaringan (*infrastructure sharing*) dan frekuensi (*spectrum sharing*). Tantangan selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan data dan informasi sebagai tujuan akhir dari transformasi digital lewat penggunaan platform atau aplikasi lokal dan komputasi awan (*cloud*). (es/az)

Investor Daily/Drew Angerer/Getty Images/AFP



Pengawas Belanja Stimulus

Presiden AS Joe meninggalkan State Dining Room di Gedung Putih, Washington, Senin (15/3) waktu setempat, usai mengumumkan Gene Sperling, mantan pejabat tinggi ekonomi di dua pemerintahan Demokrat sebelumnya, sebagai pengawas jalannya pelaksanaan stimulus US\$ 1,9 triliun.

Inggris Membela Penggunaan Vaksin AstraZeneca

Oleh Grace Eldora

► LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson pada Selasa (16/3) membela tingkat keamanan vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca. Menyusul beberapa negara Eropa yang menanggukkan penggunaannya karena ada kekhawatiran tentang efek samping pembekuan darah.

Pemerintah Jerman, Italia, dan Prancis pada Senin (15/3) menyusul negara-negara lain dalam penangguhan pemberian vaksin. Situasi ini memberikan pukulan potensial bagi kampanye imunisasi global melawan penyakit yang telah membunuh lebih dari 2,6 juta orang.

Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perusahaan farmasi AstraZeneca, dan European Medicines Agency bersikeras suntikan tersebut aman, dan tidak ada hubungan antara itu dengan pembekuan darah yang dilaporkan. Johnson pada Selasa menggemakan jaminan vaksin itu tidak berbahaya.

"Vaksin itu aman dan bekerja dengan sangat baik. Itu dibuat di banyak tempat, dari India ke AS, serta Inggris, dan sedang digunakan di seluruh dunia," tulis Johnson di surat kabar *The Times*.

Kekhawatiran berkembang di be-

berapa negara atas keamanan vaksin AstraZeneca, setelah beberapa kasus pembekuan darah atau pendarahan otak pada orang setelah menerima inokulasi, dengan sejumlah kecil kematian dilaporkan.

Tetapi AstraZeneca dan ahli medis di Inggris mengatakan tidak ada bukti pembekuan yang disebabkan oleh suntikan virus, atau pembekuan terjadi dalam jumlah atau frekuensi yang lebih besar daripada populasi umum.

Vaksin ini dikembangkan oleh AstraZeneca dan Universitas Oxford di Inggris, di mana lebih dari 11 juta dosis telah diberikan, tanpa masalah besar yang dilaporkan.

Pada Senin (15/3) Johnson mengatakan kepada wartawan, Badan Pengatur Produk Obat dan Kesehatan Inggris (MHRA) adalah salah satu regulator paling tangguh dan paling berpengalaman di dunia.



Boris Johnson

"Mereka tidak melihat alasan sama sekali untuk menghentikan program vaksinasi untuk salah satu vaksin yang kami sedang gunakan. Mereka percaya vaksin itu sangat efektif dalam menurunkan tidak hanya angka rawat inap, tetapi juga menurunkan angka penyakit serius dan kematian. Kami terus merasa sangat percaya diri tentang program ini dan senang melihatnya diluncurkan dengan kecepatan seperti itu melintasi Inggris," lanjutnya lagi.

Pernyataan EMA

Sementara itu, kepala Badan Obat Eropa (EMA) dijadwalkan memberikan informasi terbaru tentang penyelidikan kemungkinan pembekuan darah, terkait dengan vaksin virus

corona AstraZeneca, kata regulator.

Direktur Eksekutif EMA Emer Cooke memberikan informasi terbaru tentang penyelidikan Vaksin Covid-19 AstraZeneca dan peristiwa tromboemboli selama konferensi pers virtual pada Selasa siang waktu setempat. Adapun tromboemboli adalah peristiwa darah beku yang bergerak.

Pernyataan itu tidak memberikan rincian tentang apa yang diumumkan pada konferensi pers. Dikatakan, acara itu telah diselenggarakan oleh Komisi Eropa, badan eksekutif 27 negara Uni Eropa (UE).

Pakar keamanan EMA yang berbasis di Amsterdam pada Selasa melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap data tentang vaksin, setelah beberapa negara Eropa termasuk Prancis dan Jerman menanggukkan penggunaannya.

EMA mengatakan pada Senin akan mengadakan pertemuan khusus Kamis (18/3) untuk memutuskan tindakan lebih lanjut. Tetapi pihaknya juga menambahkan, manfaat menggunakan vaksin AstraZeneca masih lebih besar daripada risikonya.

Pakar WHO juga melangsungkan pertemuan pada Selasa untuk membahas vaksin. EMA sebelumnya telah menyetujui vaksin AstraZeneca untuk diberikan kepada orang dari segala usia, pada 29 Januari. Tetapi peluncurannya bermasalah sejak awal, dengan beberapa negara pada awalnya mengatakan vaksin itu tidak boleh digunakan pada orang tua. (afp)

VW Berambisi Dominasi Mobil Listrik pada 2025

FRANKFURT – Raksasa otomotif Jerman, Volkswagen (VW) pada Selasa (16/3) menargetkan mendominasi pasar mobil listrik pada 2025. Strategi yang dilakukan VW adalah dengan mempercepat langkahnya untuk mengejar ketertinggalan dari perintis mobil listrik asal Amerika Serikat (AS), Tesla.

Menurut laporan, Volkswagen telah menjual 422.000 unit kendaraan listrik pada 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 230.000 unit di antaranya merupakan mobil listrik dan sisanya merupakan mobil *hybrid* dengan bahan bakar BBM-listrik. Ada pun jumlah mobil listrik yang terjual itu tercatat tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan 2019.

"Sekarang diperkirakan menjual satu juta unit kendaraan listrik tahun ini. Paling lambat pada 2025, grup otomotif ini ingin menjadi pemimpin dunia dalam pasar mobilitas listrik," demikian pernyataan yang dikeluarkan perusahaan, yang dilansir AFP.

Raksasa produsen mobil yang memiliki 12 merek, mulai dari Audi hingga Porsche hingga Seat juga akan menginvestasikan dana sebanyak 46 miliar euro (US\$ 55 miliar) untuk produksi saklar listriknya selama lima tahun ke depan.

Sebagai informasi, satu dari 10 mobil yang dijual pada 2020 di Eropa adalah mobil listrik, menyusul langkah Volkswagen mengenalkan model utamanya ID.3 di pasaran. Sejak itu, angka penjualannya dilaporkan melonjak lima kali lipat dari 1,9% yang tercatat pada 2019.

VW memprediksi mobil listrik produksinya bakal mencapai 60% dari penjualan mobilnya di Eropa pada 2030. Bahkan, satu dari dua kendaraan yang dijual oleh grup perusahaan secara global itu bakal menjadi kendaraan listrik pada saat itu.

Meski demikian, belum ada pengumuman tanggal untuk mengakhiri produksi mobil bermesin bahan bakar mengingat harganya yang le-

bih terjangkau. CEO Herbert Diess mengungkapkan, bahwa penjualan kendaraan ini diharapkan berkontribusi untuk membiayai transisi ke opsi yang lebih ramah lingkungan.

"Pada 2035, mayoritas mobil akan bermesin listrik dan lebih dari 40% akan bergerak secara otonom," katanya.

Di samping itu, Volkswagen menyatakan akan mendirikan enam pabrik baterai dan secara signifikan memperluas titik pengisian daya di Eropa, guna meletakkan infrastruktur sebagai bagian rencana meluncurkan 27 model listrik pada 2022.

Sebagai informasi, VW model *all-electric* ID.3 menjadi mobil terlaris kedua di Eropa pada Desember tahun lalu. Merek tersebut juga telah mendekati sang perintis *e-mobility* Tesla asal AS, dengan model SUV ID.4 2021-nya.

Di sisi lain, Tesla telah meningkatkan tekanan pada produsen mobil besar Jerman, seperti Volkswagen

dalam beberapa tahun terakhir dengan rencananya untuk membuka pabrik di luar Berlin pada Juli mendatang.

Dorongan mobil listrik Volkswagen sendiri telah dipercepat oleh skandal *dieselgate*, yang mengguncang industri mobil Jerman dan merugikan perusahaan, baik dalam bentuk uang tunai maupun kerugian reputasi.

Kasus hukum itu mengungkap pengakuan VW pada 2015 yang secara ilegal memasang perangkat lunak 11 juta kendaraan diesel di seluruh dunia agar menghasilkan sedikit polusi. Sejak skandal itu, posisi pasarnya langsung direbut oleh Toyota pada 2020, menyusul penjualan yang merosot di tengah pandemi.

Dalam data awal pendapatan 2020 yang diterbitkan pada Februari, laporan laba bersih untuk tahun ini turun 37% menjadi 8,8 miliar euro. Namun, perusahaan memiliki prediksi peningkatan pendapatan yang signifikan pada 2021. (afp/pya)

Nokia akan Pangkas Hingga 10.000 Karyawan

HELSINKI - Produsen peralatan telekomunikasi Finlandia, Nokia, pada Selasa (16/3) mengumumkan rencananya memangkas hingga 11% dari tenaga kerja dalam waktu dua tahun ke depan. Perusahaan menyatakan, pihaknya berusaha memotong biaya-biaya dan fokus pada beberapa bidang utama dalam menghadapi kesulitan persaingan atas jaringan supercepat 5G.

Mengumumkan program pemotongan biaya hingga 600 juta euro (setara US\$ 715 juta), perusahaan akan menjadi organisasi dengan 80.000-85.000 karyawan selama periode 18-24 bulan. Saat ini, Nokia masih memiliki sekitar 90.000 karyawan.

Perusahaan itu mengatakan masih terlalu dini untuk berkomentar secara rinci di mana PHK akan dilakukan. Tetapi perwakilan perusahaan mengatakan kepada AFP bahwa Prancis dikecualikan, karena rencana restrukturisasi yang diumumkan sebelumnya.

Namun, hilangnya lebih dari 1.000 pekerjaan di Prancis masih berlangsung setelah pengambilalihan Alcatel-Lucent oleh Nokia pada 2016.

Finlandia, tempat grup tersebut berkantor pusat dan tahun lalu merekrut lebih dari 1.200 karyawan baru untuk pos 5G, juga diharapkan sebagian besar terhindar dari PHK. Nokia mengatakan, mereka mengharapkan restrukturisasi berdampak laba bersih positif di negara Nordik tersebut.

Perkembangan pasar dalam dua tahun ke depan akan menentukan jumlah pasti kehilangan pekerjaan, kata perusahaan. Dikatakan, perusahaan juga akan merampingkan portofolionya dan mengurangi fragmentasi situs dalam jangka panjang.

Nokia telah menandai perlombaan tiga arah melawan Ericsson dan Huawei untuk mendominasi pasar peralatan 5G. Perusahaan sempat kehilangan kontrak besar Verizon di Amerika Serikat (AS) tahun lalu dan gagal membuat terobosan di Tiongkok.

Perusahaan tersebut di masa lalu mengalami kesulitan untuk bersaing dalam harga melawan para pesaingnya dan telah berjuang melakukan konversi basis 4G yang ada menjadi kontrak 5G.

Setelah CEO Nokia Pekka Lundmark mengambil alih kepemimpinan pada Agustus tahun lalu, ia membatalkan strategi CEO Rajeew Suri sebelumnya untuk slogan *end-to-end solution*. Lundmark menggantinya dengan pendekatan yang lebih terfokus dan berjanji untuk menginvestasikan apa pun yang diperlukan untuk menang dalam 5G.

Perusahaan di masa depan akan disusun di sekitar empat kelompok bisnis yang selaras dengan perilaku pembelian pelanggan. Antara lain Jaringan Seluler, IP dan Jaringan Tetap, Cloud dan Layanan Jaringan, dan Teknologi Nokia, masing-masing dengan lebaran laba dan rugi tersendiri. "Di area di mana kami memilih untuk bersaing, kami akan bermain untuk menang," ujar Lundmark dalam pernyataannya, Selasa (16/3).

Perusahaan pada Februari mengumumkan, perkiraan hilangnya pangsa pasar di Amerika Utara dalam 5G dan 4G, berikut terkikisnya harga berarti prospek perusahaan pada 2021 tetap tidak berubah, dengan target margin operasional 7%-10%.

Grup Finlandia tersebut akan mengumumkan rincian lebih lanjut dari strategi dan prakiraan keuangan jangka panjangnya pada Kamis (18/3). (afp/eld)

Investor Sekarang Cemaskan Inflasi dan The Fed

NEW YORK – Setahun setelah pandemi Covid-19 memporak-porandakan ekonomi dunia, para investor di Amerika Serikat (AS) mulai bersiap untuk melupakannya. Sekarang mereka memiliki kekhawatiran-kekhawatiran yang lebih besar.

Hasil survei terbaru Bank of America Fund Manager Survey yang dilansir Selasa (16/3) oleh CNBC menunjukkan, inflasi sekarang sudah menjadi kekhawatiran terbesar. Para investor khawatir inflasi dapat menimbulkan kerusakan paling besar.

Sebanyak 37% responden dalam survei Maret 2021 itu menyebut inflasi sebagai tantangan terbesar. Diikuti 35% responden yang mencemaskan *taber tantrum*, yakni reaksi tajam di pasar obligasi jika The Federal Reserve (The Fed) tiba-tiba mengurangi stimulus moneter.

Survei ini diikuti oleh 220 investor dengan total dana kelolaan mencapai US\$ 630 miliar. Survei dilakukan pada 5-11 Maret 2021.

Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan nomor tiga terbesar bagi para investor. Secara khusus terkait persoalan dalam distribusi vaksin. Tapi kurang dari 15% responden yang mencemaskan hal tersebut atau sekitar separuh dari level pada Februari 2021.

Hasil survei pada Maret 2021 ini menandai pertama kalinya sejak Februari 2020-hal-hal terkait Covid-19 tidak menjadi sumber kekhawatiran terbesar.

Namun ketiga kekhawatiran tersebut jauh di atas kekhawatiran terhadap gelembung di Wall Street, kenaikan pajak, atau pun regulasi lebih ketat di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.

Berubahnya prioritas para investor itu terjadi saat jumlah vaksinasi harian di AS sekarang mencapai lebih dari dua juta orang. Jumlah

kasus dan kematian sudah turun drastis, walau penurunan jumlah kasus harian masih sedikit.

Tapi para investor mulai mengalihkan prioritas-prioritasnya karena sebagian besar tenaga kesehatan mengindikasikan bahwa kehidupan dapat mulai kembali normal pada musim panas dan memasuki musim gugur tahun ini.

Inflasi menjadi sumber kekhawatiran tahun ini karena imbal hasil obligasi pemerintah AS melonjak ke level sebelum pandemi. "Kenaikan imbal hasil Treasury 10 tahun ke level 2% dapat menyebabkan koreksi di pasar, atau penurunan lebih dari 10%. Lonjakan ke 2,5% dapat menyebabkan obligasi lebih menarik ketimbang saham," kata para responden survei tersebut.

Pada Selasa (16/3) pagi waktu setempat, imbal hasil obligasi tersebut berada di kisaran 1,6%.

Pasar mengalami volatilitas selama imbal hasil obligasi melonjak baru-baru ini. Indeks Dow Jones naik 7,7% sejauh ini, karena reli saham seperti Goldman Sachs, Boeing, dan Caterpillar, yang diuntungkan oleh kenaikan imbal hasil obligasi dan pemulihan ekonomi yang lebih agresif.

"Secara umum, hasil survei itu menunjukkan sentimen konsumen tetap bullish. Tapi mereka mulai menyesuaikan portofolionya," ujar Michael Harnett, direktur strategi investasi Bank of America.

Para manajer investasi sudah memangkas alokasi ke saham-saham teknologi, hingga mencapai level terendah sejak Januari 2009. Pengalihan alokasi ke saham-saham perbankan sekarang mencapai level tertinggi sejak Maret 2018. Saham-saham energi juga mendapatkan level alokasi tertinggi sejak November 2018. (sumber lain/sn)



Pertemuan Para Menkeu

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis mencopot maskernya saat akan menyampaikan konferensi pers usai pertemuan para menteri Uni Eropa (UE) di Brussels, Belgia, Selasa (16/3).

Investor Daily/YVES HERMAN / POOL / AFP

Indonesia Terdepan Adopsi Layanan Digital di Asean

Oleh Abdul Muslim

JAKARTA – Sebanyak 84% konsumen di Indonesia sudah mulai beralih ke layanan/platform digital untuk terhubung dengan sejumlah merek (brand) sejak pandemi Covid-19 tahun lalu.

Sejumlah organisasi di bidang layanan finansial (57%), ritel (54%), dan edukasi (36%) menjadi sektor terdepan di Indonesia yang berhasil meraih peningkatan tertinggi dalam menghadirkan layanan digital, dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pandemi.

Meningkatnya ekspektasi konsumen di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pun telah mendorong terjadinya akselerasi transformasi digital di lingkup perusahaan dan industri.



Cin Cin Go

sejumlah negara maju dalam survei tersebut, yakni Amerika Serikat yang penerimaan layanan digitalnya baru 40%, Perancis 41%, Jerman 44%, dan Inggris 34%.

Dari semua negara yang disurvei, konsumen Indonesia juga merasa paling nyaman memberikan kepercayaan ke perusahaan dalam mengakses data personalnya agar sebagai pelanggan dapat menikmati pengalaman digital yang lebih baik.

Sebanyak 59% menyatakan merasa nyaman dan tertarik untuk memperbaiki bank mengakses kegiatannya, seperti perilaku belanja, nutrisi dan program diet, serta kegiatan melancong dan pergerakan sehari-hari konsumen.

Pada sektor ritel, sebanyak 61% konsumen di Indonesia merasa nyaman dan tertarik untuk memperbaiki peritel memiliki akses data agar dapat menghadirkan pengalaman yang makin relevan bagi konsumen.

Sebanyak 80% responden mengategorikan dirinya sendiri sebagai digitaly curious, atau digital explorer. Karena itu, penting bagi organisasi/perusahaan di Indonesia yang berorientasi pertumbuhan untuk terus berinvestasi di sisi teknologi.

Kepuasan Konsumen

Sementara itu, 64% konsumen di Indonesia juga mengaku bahwa kejadian global tahun 2020 telah memaksa mereka untuk beralih ke layanan digital dan merasakan pengalaman digital yang lebih baik.

Angka tersebut sedikit di bawah rerata di Asia Tenggara (69%). Namun, persentasenya masih jauh melebihi negara-negara maju yang disurvei, yakni Amerika Serikat dan Prancis sama-sama baru 40%, Jerman 33%, dan Inggris 33%.

Bahkan disebutkan bahwa lebih dari separuh (56%) konsumen di Indonesia menyatakan akan beralih ke produk maupun layanan kompetitor jika pengalaman digital yang dirasakan jauh dari harapan. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengakselerasi tumbuhnya inovasi.

Cin Cin melanjutkan, perusahaan di Indonesia dituntut mengembangkan dan menghadirkan pengalaman digital terbaik yang tidak saja aman, namun juga bisa diakses melalui segala aplikasi, di segala jenis komputasi awan (cloud), maupun dari segala jenis perangkat.

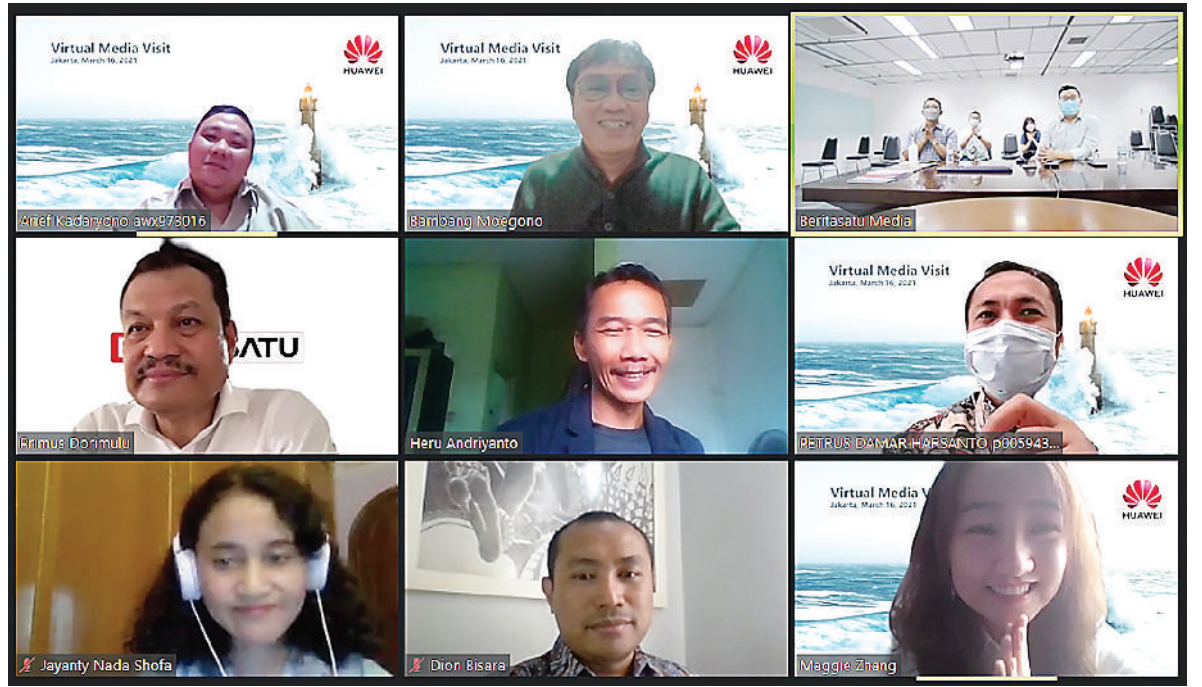
"Ke depan, digital experiences menjadi faktor krusial yang menentukan sejauh mana daya saing sebuah perusahaan dalam mendorong akselerasi pertumbuhan di tengah lingkungan bisnis yang kian dinamis dan tersebar lokasinya," pungkas Cin Cin.

Digitalisasi Sektor

Studi VMware Digital Frontiers 3.0 juga menyebutkan, sejumlah sektor industri di Indonesia menjadi yang terdepan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan di sepanjang tahun 2020.

Responden menyampaikan bahwa organisasi-organisasi di sektor layanan finansial (57%), ritel (54%), dan edukasi (36%), berhasil menghadirkan pengalaman digital yang kian meningkat kepada konsumen dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

Perusahaan di sektor layanan finansial (58%) dan ritel (38%) juga paling dipercaya di antara sektor lain.



Virtual Media Visit Huawei

Director of Media Affairs, Public Affairs & Communications Dept. Huawei Indonesia Maggie Zhang didampingi Senior PR Manager Huawei Indonesia Petrus Damar Harsanto dan Arief Kadaryono saat media visit secara virtual ke Redaksi Beritasatu Media Holdings, di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Bukalapak dan Microsoft Gelar Pelatihan UMKM

JAKARTA – Bukalapak, salah satu platform e-commerce di Tanah Air, bersama Microsoft, bekerja sama memberikan pelatihan guna meningkatkan literasi digital dan kapabilitas pemanfaatan teknologi di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pogran pelatihan digital diberi tajuk 'Belajar Digital Bareng Bukalapak [Microsoft]'. Inisiatif bersama ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM meraih lebih banyak kesempatan dan agar bisa berkontribusi pada terbangunnya dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Tanah Air.

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan, ke depannya, literasi digital, atau kemampuan menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, akan sama pentingnya dengan kemampuan seperti membaca, menulis, dan berhitung.

"Agar masyarakat Indonesia bisa

maju, kami berharap, suatu saat, digital literacy rate di Indonesia bisa sama dengan literacy rate, yaitu mendekati 100%. Untuk mencapai hal tersebut, kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak tentunya dibutuhkan untuk bergotong-royong," ujar Kaimuddin, dalam keterangannya, Selasa (16/3/2021).

Menurut dia, melalui program tersebut, para pelapak dan Mitra Bukalapak yang terdiri atas pemilik warung serta agen individual di seluruh wilayah Indonesia berkesempatan untuk mengikuti pelatihan digital.

Mereka akan mendapatkan materi berbagai topik, mulai dari menggunakan komputer, berkomunikasi lewat media daring (online), membuat konten digital, berkolaborasi dengan mengelola konten secara digital, serta menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

"Untuk itu, Microsoft sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar

di dunia dan Bukalapak sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang berfokus ke UMKM, bekerja sama dan meluncurkan program belajar digital bareng ini," imbuhnya.

Harapannya, lanjut Kaimuddin, melalui teknologi, Bukalapak dapat menjangkau lebih banyak UMKM, memberikan lebih banyak manfaat, dan menjadikan UMKM yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

President Director Microsoft Indonesia Haris Izmeo menambahkan, Bukalapak telah memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Melalui inovasi yang tiada henti, Bukalapak pun telah menciptakan peluang baru bagi pelapak, mitra, dan pengguna Bukalapak.

"Dalam hal ini, Microsoft berkomitmen untuk mendukung Bukalapak dengan teknologi komputasi awan (cloud) yang terpercaya," kata Haris. (man)

Financial statements for PT PP (PERSERO) TBK and subsidiaries, including consolidated financial statements and comprehensive loss statements for 2020 and 2019.

Organizational chart showing the Board of Directors (Dewan Komisaris Perseroan) and the Board of Directors (Direksi Perseroan) members.

TAJUK

Percepat Bangun Infrastruktur TIK

Pemerintah wajib mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), jangan setengah hati. Pasalnya, transformasi digital kini makin urgen dilakukan, tak bisa ditunda lagi, kalau kita ingin *survive* di era pandemi Covid-19. Transformasi digital yang sudah dicangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bakal bisa jalan, kalau infrastruktur vital ini belum dibangun hingga ke desa-desa tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Tak boleh ada satu desa pun yang ditinggalkan. Kalau bangsa ini terlambat melakukan transformasi digital, dipastikan ekonomi nasional maupun sumber daya manusia (SDM) kita bakal makin jauh tertinggal. Di seluruh dunia, semua berlomba-lomba mempercepat transformasi digital seiring datangnya pandemi Covid-19, yang seketika membatasi pertemuan fisik, *face to face*. Tak hanya bekerja, belajar, dan belanja mesti dilakukan secara *online*, namun juga kegiatan sosial, ibadah bersama, hingga konser akbar.

Semuanya itu tentu saja membutuhkan koneksi internet cepat yang stabil, yang disediakan oleh jaringan *broadband* kabel serat optik maupun satelit. Sebenarnya, jauh sebelum pandemi pemerintah pun menyadari pentingnya konektivitas telekomunikasi ini, untuk menyongsong era revolusi industri keempat, *Industry 4.0*. Itulah sebabnya, pemerintah membangun jaringan 'tol' *broadband* Palapa Ring, yang diharapkan bisa menghadirkan akses internet cepat dan stabil yang menjangkau semua wilayah di Indonesia.

Namun demikian, banyak desa yang kini bermasalah, kelabakan karena belum terjangkau internet cepat. Padahal, untuk meredam penularan pandemi ada pembelajaran *study from home* maupun *work from home*, seiring penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Meski Palapa Ring rampung tahun 2019, merujuk data Kemkominfo, hingga kini masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan internet 4G LTE. Ini berarti ada 15,07% dari total 83.218 desa/kelurahan yang masih tertinggal.

Desa yang dipastikan tertinggal akses ekonomi digitalnya ini bukan hanya tidak dilayani jaringan kabel serat optik, tapi juga oleh satelit. Kemkominfo, dalam rencana aksi 2020-2024, telah mengagendakan peluncuran dua satelit Satria.

Rencananya, Satria-1 digunakan untuk penyediaan akses internet dan transformasi digital bagi 150.000 titik layanan publik yang belum terjangkau internet, dari total 501.112 titik di Tanah Air. Sekitar 30% titik layanan yang belum mendapat akses internet itu mencakup fasilitas kesehatan, sekolah/pesantren, kantor desa/kelurahan, dan layanan lainnya.

Masih banyaknya desa yang belum terlayani internet cepat ini karena jaringan kabel serat optik Palapa Ring cuma sampai kabupaten. Itulah sebabnya internet

masih banyak mengandalkan satelit, dari jasa para operator layanan telekomunikasi selama ini.

Jaringan *backbone* Palapa Ring ini mencapai 12.229 km, yang terdiri atas 4.156 km kabel darat (*inland*) dan 8.073 km kabel laut (SKKL). Namun, hingga Februari lalu, utilisasi Palapa Ring Barat yang tertinggi pun baru mencapai 36,67% (serat optik). Untuk Palapa Ring Tengah sekitar 20,33% (serat optik), sedangkan Palapa Ring Timur 17% (serat optik) dan 47,27% (*microwave*). Utilisasi kabel serat optik *backbone* itu bahkan diperkirakan baru sekitar 50-60% pada 2024.

Pasalnya, ada tiga syarat utama agar masyarakat bisa menikmati internet cepat dan stabil, yakni adanya *backbone*, *backhaul*, dan jaringan akses. Mengingat Palapa Ring merupakan jaringan *backbone*, artinya masih membutuhkan sambungan jaringan distribusi ke daerah (*backhaul*) dan jaringan akses seperti kabel optik atau *Base Transceiver Station* (BTS) agar bisa sampai ke rumah rakyat.

Sedangkan hingga kini, pemerintah hanya sekedar menyediakan infrastruktur *backbone* atau 'jalan tol' sampai ke kota, tanpa membangun penghubung sampai desa, apalagi ke rumah penduduk. Belum lagi persoalan biaya pemanfaatannya. Biaya sewa Palapa Ring ini sangat mahal, sehingga susah dimanfaatkan oleh operator.

Untuk itu, pemerintah perlu melibatkan swasta maupun BUMN dalam membangun infrastruktur penyangganya hingga ke desa-desa. Sebagai kompensasinya, sewa Palapa Ring digratiskan atau minimal bebas sewa hingga 10 tahun pertama. Dalam hal ini bisa ditiru langkah pemerintah yang memberi sewa gratis lahan BUMN selama 5 tahun untuk menarik investor asing masuk ke kawasan industri Batang.

Insentif dan kemudahan lain juga perlu diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada investor yang bersedia mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jaringan akses tersebut hingga ke desa. Selain keringanan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telekomunikasi, insentif lain bisa berupa keringanan BHP Frekuensi dan *Universal Service Obligation* (USO). Selain itu, pemberian insentif fiskal untuk investasi penggelaran jaringan TIK, khususnya di wilayah yang nonkomersial (3T).

Pemerintah pusat hingga daerah juga wajib memberi kemudahan bagi pelaku industri telekomunikasi, untuk efisiensi pembangunan jaringan TIK di seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya, ekspansi ini tak hanya perlu dana investasi besar, namun biaya operasionalnya juga besar.

Hanya dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemda, dan semua pelaku industri telekomunikasi, maka pembangunan infrastruktur TIK ke semua desa bisa dipercepat. Dengan demikian, transformasi ekonomi digital bisa diwujudkan, yang menjadi salah satu prasyarat pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Tanpa ada transformasi ini, pemulihan ekonomi hanyalah mimpi. □

Menelaah Pasar Data Pribadi

Penggunaan data pribadi adalah sebuah enigma yang menjadi perdebatan panjang hingga sekarang. Pada satu sisi, saat ini manusia sedang hidup dalam era di mana konsumsi yang sangat didorong oleh data (*data-driven*), yang mana individual menjadi produsen sekaligus konsumen dari aset paling berharga saat ini, yaitu data pribadi.

Oleh Muhammad Syarif Hidayatullah *)



Muhammad Syarif Hidayatullah

D i sisi lain, survei yang dilakukan oleh PEW Research Centre menunjukkan bahwa 91% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kontrol dari data pribadinya, sedangkan 61% menyatakan akan melakukan lebih untuk melindungi datanya, dan 66% menyatakan aturan perlindungan data yang ada saat ini belum mencukupi.

Berangkat dari hal tersebut, aturan perlindungan data pribadi mutlak diperlukan. Pemerintah di berbagai negara saat ini mengalami dilema. Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong peran data sebagai *enabler* perekonomian seoptimal mungkin, di sisi lain perlu dipertimbangkan besarnya biaya privasi yang terjadi. Oleh sebab itu, dalam pembuatan kebijakan perlindungan data pribadi diperlukan pemahaman mengenai pasar dari data pribadi.

Meningkatnya kemampuan komputer, diiringi dengan efisiensi teknologi penyimpanan data serta tingginya adaptasi internet oleh masyarakat, membuat data menjadi tulang punggung dalam perekonomian digital. Nilai pasar data di Uni Eropa diperkirakan mencapai €65 miliar dan berdampak ke perekonomian hingga €335 miliar. Sedangkan di Amerika Serikat dan Jepang nilai ekonomi dari data mencapai berturut-turut sebesar 1 dan 0,8% dari PDB (UN, 2019). Data yang diproduksi secara global diperkirakan akan mengalami perkembangan dari 33 zettabyte pada tahun 2018 menjadi 175 zettabyte pada 2025, di mana diperkirakan pertumbuhan tahunannya mencapai 61% (European Commission, 2020). Data pribadi merupakan salah satu tipe data yang semakin berperan penting dalam lanskap perekonomian global.

Pasar data pribadi sebenarnya terdiri atas dua pemain utama, yaitu pemilik data dan pemroses data (pengendali data dan prosesor data). Pemilik data adalah konsumen pada umumnya, yang menyerahkan datanya kepada pengendali/prosesor data. Sedangkan pengendali data/prosesor adalah pihak-pihak yang mengumpulkan dan memproses data pribadi (elektronik maupun non-elektronik), seperti *website*, aplikasi, portal berita *online*, dan lainnya. Pasar terbentuk akibat adanya permintaan dan penawaran. Penawaran data pribadi berasal dari pemilik data, permintaan akan data pribadi berasal dari pengendali dan prosesor data. Pertanyaan mendasarnya adalah, apa yang mendorong pihak-pihak tersebut bersedia memasuki pasar.

Data pribadi pada dasarnya "di-produksi" oleh pemilik data atau individu. Individu menyerahkan data pribadinya kepada pengendali data dengan timbal balik tertentu. Contohnya, ketika seseorang membaca berita pada portal berita *online*. Pada dasarnya dia sedang menyerahkan data pribadi mengenai preferensinya terhadap sesuatu. Di mana data preferensi tersebut dikumpulkan oleh portal berita, yang nantinya

ginya keuntungan data pribadi, baik bagi konsumen maupun produsen, setiap agen dalam perekonomian akan mengeksploitasi penggunaan data pribadi? Jawabannya tidak. Bagi konsumen maupun produsen, ada *trade off* yang mereka hadapi ketika membagikan/menggunakan data pribadi.

Bagi individu, membagikan data pribadi memang memberikan keuntungan. Akan tetapi, terlalu banyak membagikan data juga berpotensi menimbulkan biaya, seperti pencurian identitas hingga diskriminasi harga. Penelitian dari Mikians et.al (2013) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga sebesar 10-30% pada produk yang serupa yang dibeli oleh konsumen (secara *online*) yang tinggal pada lokasi yang berbeda dan memiliki karakteristik belanja berbeda.

Bagi perusahaan, terlalu mengeksploitasi data pribadi konsumen berpotensi menimbulkan sejumlah risiko seperti kebocoran data dan ditinggalkannya konsumen apabila kebijakan pengumpulan datanya dirasa terlalu invasif. Biaya kebocoran data yang ditanggung oleh perusahaan juga demikian besar. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh IBM, rata-rata biaya dari kebocoran data yang ditang-

“Indonesia perlu segera memiliki aturan dan kebijakan komprehensif tentang perlindungan data pribadi. Dengan memahami konteks dan kondisi dari pasar data pribadi, maka diharapkan kebijakan perlindungan yang disusun mampu menggenjot perkembangan ekosistem ekonomi digital Indonesia ke depannya.”

lebih personal, mendapatkan informasi (iklan) sesuai kebutuhan sehingga menurunkan biaya pencarian (*search cost*) (Acquisti, Taylor, Wagman, 2016).

Lalu, bagaimana dengan sisi permintaan, mengapa pengendali data/prosesor data membutuhkan data pribadi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Accenture terhadap 600 perusahaan dari seluruh dunia menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi mendatangkan sejumlah keuntungan bagi perusahaan. Sebanyak 77% responden menyatakan bahwa data pribadi membantu perusahaan menciptakan pelanggan konsumen yang lebih baik, 53% mengatakan bahwa data pribadi dapat meningkatkan loyalitas konsumen, 52% mengatakan bahwa penggunaan data pribadi membantu mereka menemukan peluang baru di pasar (Accenture, 2014).

Dalam konteks sektor keuangan adalah pengelolaan data pribadi dapat mengurangi terjadinya *asymmetric information* di antara peminjam dan pemberi pinjaman, yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya pinjaman (*cost of financing*) (Begneu, Farboodi dan Veldkamp, 2018).

Lalu, apakah dengan ting-

gung oleh perusahaan sebesar US\$ 3,92 juta, dengan rata-rata 25.575 data yang bocor setiap kalinya.

Biaya yang ditanggung perusahaan terbagi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung berupa biaya pendeteksian kebocoran, biaya notifikasi kebocoran, dan biaya respons setelah terjadinya kebocoran. Biaya tidak langsung berupa runtuhnya kredibilitas perusahaan dan potensi hilangnya bisnis. Dengan besarnya biaya kebocoran tersebut, artinya perusahaan memiliki insentif besar untuk melindungi data pribadi konsumennya.

Mengatur Pasar Data Pribadi

Timbulnya *trade-off* tersebut membuat pasar data pribadi memerlukan sejumlah regulasi. Indonesia saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Selama ini, aturan terkait perlindungan data pribadi tersebut pada kurang lebih 34 regulasi dari berbagai Kementerian/Lembaga. Adanya UU PDP dapat menjadi payung dari berbagai aturan tersebut. RUU PDP mengatur setidaknya

enam hal utama, yaitu definisi dari data pribadi, hak dari pemilik data, mekanisme persetujuan (*consent*), kewajiban dari pengendali dan prosesor data, sanksi, dan terkait dengan kelembagaan.

Terdapat sejumlah catatan penting pada draf yang ada saat ini. Pertama, perlu dipertimbangkan terkait kewajiban verifikasi, karena justru berpotensi membuat pengendali data memegang terlalu banyak data pribadi. Berdasarkan pasal 35, pengendali data wajib untuk melakukan verifikasi dan memastikan semua data yang diinput oleh pemilik data 100% akurat. Apabila dipisahkan untuk verifikasi, justru pengendali data akan menghimpun terlalu banyak data pribadi, yang justru bertentangan dengan prinsip minimisasi data.

Kedua, RUU PDP seharusnya dapat mendorong ekosistem ekonomi digital. Sejumlah pasal pada RUU seperti aturan terkait *automatic profiling* (pasal 10) dan persetujuan (pasal 18-20), apabila tidak disusun dengan hati-hati berpotensi berdampak negatif ke depannya. Aturan pasal 10 RUU PDP memberikan hak bagi subjek data untuk menolak pengambilan keputusan otomatis dengan alasan apapun. Hal tersebut tentu berpotensi menghilangkan sejumlah benefit dari teknologi digital, seperti keputusan otomatis untuk mencegah penipuan, keamanan, fasilitasi kontrak, termasuk mendapatkan rekomendasi dan pelayanan gratis. Selain itu, hak untuk menolak.

Ketiga, perlu dipertimbangkan potensi membengkaknya biaya kepatuhan. Apabila dilaksanakan, RUU PDP berpotensi membebani 17 kewajiban bagi pengendali data, di mana beberapa di antaranya harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu antara 2-7 hari penyelesaian, dibandingkan dengan General Data Protection Regulation (GDPR/aturan perlindungan data Uni Eropa) yang masih memberikan waktu 30 hari (dapat diperpanjang menjadi 60 hari).

Untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut tentu membutuhkan investasi tambahan yang tidak sedikit. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap perusahaan yang terdampak GDPR di Amerika Serikat, total *compliance cost* dapat mencapai US\$ 3 miliar. Survei tersebut menunjukkan bahwa 40% dari responden menyatakan bahwa perusahaannya telah mengeluarkan biaya lebih dari US\$ 10 juta untuk bisa mematuhi GDPR. Hal senada tentu dapat terjadi di Indonesia. Apabila *compliance cost* terlalu tinggi, hal tersebut tentu memberatkan sebagian besar perusahaan rintisan digital Indonesia, yang 85% memiliki modal awal di bawah Rp 100 juta.

Indonesia perlu segera memiliki aturan dan kebijakan komprehensif tentang perlindungan data pribadi. Dengan memahami konteks dan kondisi dari pasar data pribadi, maka diharapkan kebijakan perlindungan yang disusun mampu menggenjot perkembangan ekosistem ekonomi digital Indonesia ke depannya. □

*) Senior Policy Analyst di Indonesia Services Dialogue (ISD).

POJOK IDE

Kementan: Hingga Mei 2021, neraca beras diperkirakan surplus 12 juta ton.

Kebijakan didasarkan pada data yang valid.

Menkes: Karyawan penerima vaksin Gotong Royong tidak boleh dipungut biaya.

Catat!

Pemerintah Targetkan 100 Koperasi Modern dan Formalkan 2,5 Juta UKM

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan pada 2021 mampu mencetak 100 koperasi modern dan mendorong sebanyak 2,5 juta usaha mikro bertransformasi menjadi sektor formal.

Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Kementerian Koperasi dan UKM Riza Damanik mengatakan, pihaknya juga menargetkan bakal menaikkan kontribusi ekspor sebesar 15,26%, meningkatkan rasio kewirusahaan menjadi 3,55%, menaikkan rasio kredit perbankan di atas 20%, serta komitmen strategis antara UMKM dan usaha besar. Kemkop UKM akan melakukan pemetaan risiko usaha untuk mendorong target penciptaan koperasi modern dan UMKM naik kelas.

“Untuk mengurangi risiko usaha dari UMKM agar lebih *feasible* untuk mendapatkan akses pembiayaan, kami menyiapkan 4 transformasi besar yaitu transformasi dari informal ke formal, transformasi ke digital dan pemanfaatan teknologi, transformasi ke dalam rantai nilai (*value chain*), dan modernisasi koperasi,” ucap Riza dalam siaran pers yang diterima, Selasa (16/3).

Dengan demikian UMKM dapat terdapat dengan baik, berusaha dalam skala ekonomi dan efisien, serta proses pembinaan menjadi lebih fokus dan terarah.

Program pemulihan ekonomi nasional, khususnya pembiayaan bagi KUKM juga masih

dilanjutkan tahun ini. Dari sisi pembiayaan, sasarannya ada 2, yakni kepada mereka yang *un-bankable* (usaha mikro) diberikan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang rencananya segera digulirkan oleh Presiden. Kedua, kepada mereka yang sudah *bankable* atau sedang terikat kredit mendapatkan fasilitas subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan modal kerja koperasi melalui LPDB.

“Pemerintah terus memantapkan alternatif pembiayaan untuk UMKM dan koperasi yang murah, mudah, dan cepat agar UMKM cepat naik kelas,” ucap Riza.

Riza menambahkan, pemerintah daerah juga sangat berperan penting dalam akselerasi pengembangan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Oleh sebab itu, kami senang sekali kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Koperasi dan UKM terus diperkuat,” kata dia.

Sejauh ini sebagian besar riset menyebutkan bahwa masalah pertama pengembangan UMKM adalah memperoleh kredit atau permodalan termasuk penelitian Ease of Doing Business World Bank, dan BPS 2003. Terlebih untuk negara seperti Indonesia dengan postur mayoritas pelaku usahanya adalah usaha mikro (98%). Riza mengatakan, ciri dari usaha mikro antara lain belum terdapat dan memiliki perencanaan bisnis dengan baik, bergantung sepenuhnya

dengan pendapatan harian, sangat dinamis baik dari sisi produk yang dijual maupun lokasi penjualan, dikelola belum dalam skala ekonomi, bahkan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. “Semuanya menambah sulit usaha mikro mendapatkan akses pembiayaan,” imbuh Riza.

Adapun rasio kredit perbankan untuk UMKM di Indonesia masih di bawah 20%. Jauh dari Singapura (39%), Thailand (50%), Malaysia (51%), Jepang (66%), apalagi Korea Selatan (81%). Pemerintah menargetkan rasio kredit perbankan bisa mencapai 22-30% hingga 2024.

“Itulah sebabnya, salah satu terobosan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah penguatan skema pembiayaan,” ucap Riza.

Penguatan pembiayaan di antaranya saat kondisi darurat meliputi restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, dan bantuan lainnya (pasal 53). Kemudian pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan dari meningkatkan akses pembiayaan, memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga, penjaminan kredit modal kerja, penyaluran dana bergulir, bantuan permodalan, dan bentuk pembiayaan lain (pasal 71). Selain itu, kemudahan kemitraan diberikan berupa fasilitas pendanaan cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif (pasal 102). (ark)



Raker Komisi IX DPR Bersama Menteri Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Rapat tersebut membahas grand design Kementerian Ketenagakerjaan dan Bappenas dalam penciptaan dan pemenuhan pasar kerja tahun 2021 dimasa pandemi Covid-19 serta sinergitas Kementerian Ketenagakerjaan dengan lintas kementerian terkait perlindungan, pemulangan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai dampak Pandemi Covid-19.

PROPORSI INVESTOR ASING MENINGKAT

Peminat SUN Berkurang

Oleh **Arnoldus Kristianus**

▶ JAKARTA – Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 18,9 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana dengan penawaran masuk (*incoming bids*) mencapai Rp 40,08 triliun pada Selasa (16/3). Dibandingkan lelang SUN sebelumnya, penyerapan dana itu tercatat lebih besar, namun untuk nilai penawaran masuk justru turun yang menandakan berkurangnya peminat.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) di Jakarta, pada hari yang sama menyatakan, realisasi lelang ini di bawah target indikatif yang ditetapkan sebelumnya yaitu Rp 30 triliun. Ketidaktercapaian target indikatif yang sama juga terjadi pada lelang SUN sebelumnya.

Dalam lelang serupa dua pekan sebelumnya, yakni Selasa (2/3), pemerintah hanya menyerap dana sebesar Rp 17 triliun dari lelang tujuh seri SUN di pasar perdana. Saat itu penawaran masuk yang disodorkan oleh investor jauh lebih besar yaitu mencapai Rp 49,73 triliun.

Berdasarkan data DJPPR yang dilampirkan dalam keterangan pers tersebut terungkap, untuk mendapatkan Rp 18,9 triliun atau hanya Rp 1,9 triliun lebih

besar dari lelang dua pekan sebelumnya, pemerintah harus menyediakan imbal hasil (*yield*) yang lebih besar.

Pada lelang Selasa (16/3) lalu, *yield* rata-rata tertimbang yang dimenangkan untuk SUN seri FR0087 yang jatuh tempo pada 15 Februari 2031 adalah sebesar 6,73628%. Sedangkan pada lelang dua pekan sebelumnya, *yield* rata-rata tertimbang yang dimenangkan untuk SUN seri yang sama hanya 6,54977%.

Sementara itu, ketujuh seri SUN yang dilelang kemarin adalah SPN03210616 (*new issuance*), SPN12220303 (*reopening*), FR0086 (*reopening*), FR0087 (*reopening*), FR0088 (*reopening*), FR0083 (*reopening*), dan FR0089 (*reopening*).

Dengan adanya lelang ini, maka secara keseluruhan jumlah pembiayaan negara yang berasal dari lelang SUN selama

Januari-Maret 2021 mencapai Rp 180,85 triliun.

Seiring rendahnya penawaran masuk pada lelang Selasa (16/3) tersebut, menurut rencana pemerintah akan mengadakan lelang SUN tambahan (*green-shoe option*) pada hari ini, Rabu (17/3). Kali ini pemerintah hanya melelang lima seri SUN yaitu FR0086, FR0087, FR0088, FR0083 dan FR0089, dengan target maksimal Rp 11,1 triliun.

Sudah Diperkirakan

Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemkeu Deni Ridwan menyatakan, tingkat penawaran masuk yang lebih rendah dalam lelang SUN Selasa (16/3) sudah diperkirakan karena faktor eksternal yang membuat investor masih *wait and see*. Faktor tersebut adalah kebijakan yang akan diambil oleh bank sentral Amerika Serikat dalam FOMC meeting pada 16-17 Maret 2021 terkait volatilitas *yield* *UST*.

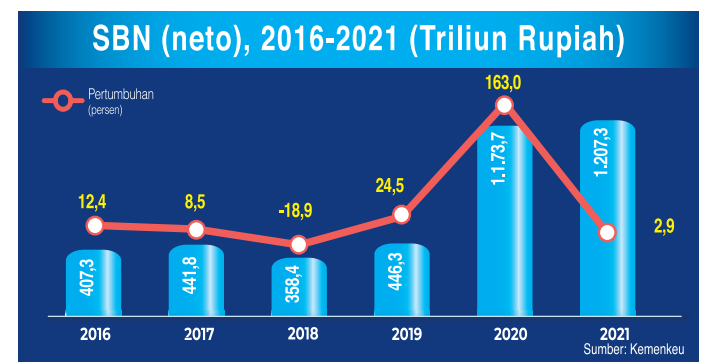
“Dari bids yang masuk pada lelang hari ini sebesar Rp 40,08 triliun, pemerintah memenangkan sebesar Rp 18,9 triliun dengan *bid to cover ratio* sebesar 2,12 kali. Ini sebagai komitmen

pemerintah untuk menjaga tingkat *yield* SUN yang wajar di pasar sekunder,” tandas Deni dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (16/3).

Deni menuturkan, seri SUN yang paling diminati dalam lelang hari ini adalah FR0087 (tenor 10 tahun) dengan jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp 12,9 triliun dengan proporsi investor asing sebesar 22,5%. Untuk seri FR0087 tersebut yang dimenangkan sebesar Rp 7,25 triliun dan merupakan seri terbesar yang dimenangkan pada lelang kali ini.

“Dengan kondisi pasar saat ini, minat investor asing masih cukup besar. Dari keseluruhan *incoming bids* yang masuk, proporsi investor asing sebesar 18,2% atau meningkat dari lelang sebelumnya yang hanya sebesar 11,1% dari total *bid*,” ucap dia.

Terkait pelaksanaan lelang lelang SUN tambahan (*green-shoe option*) hari ini, kata Deni, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi investor mendapatkan seri SUN dan imbal hasil (*weighted average yield*) yang sama dengan hasil lelang pada Selasa (16/3). (ns)



MANDIRI SPENDING INDEX:

Awal 2021, Belanja Masyarakat Membaik

JAKARTA – Hasil kajian khusus Mandiri Institute memperlihatkan, nilai belanja masyarakat saat ini berada di level 4,6% lebih tinggi dibandingkan dengan periode Januari 2020 (*base*). Sementara frekuensi belanja 16,7% lebih tinggi dan kenaikan ini terkonfirmasi melalui data mobilitas yang direkam lewat data Google.

“Sebagai salah satu indikator penting untuk melihat arah perekonomian nasional, tren belanja masyarakat di awal tahun ini mengindikasikan adanya perbaikan, relatif dibandingkan periode prapandemi di 2020,” ujar Kepala Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono dalam siaran pers yang diterima *Investor Daily*, Selasa (16/3).

Menurut Yudo, pihaknya melakukan kajian khusus mengenai tren belanja masyarakat dengan memanfaatkan *high-frequency transaction* data. “Kami mengembangkan Mandiri Spending Index yang memperhitungkan komposisi belanja berdasarkan sub-kategori belanja, seperti supermarket, restoran, household, fashion dan lain sebagainya,” kata dia.

Komposisi ini, lanjut Yudo, digunakan sebagai pembobot untuk menyusun indeks belanja yang dapat membantu pemerintah dan sektor usaha untuk mengamati pergerakan belanja masyarakat Indonesia sejak awal 2020 hingga saat ini. Ia menyebutkan bahwa indeks belanja mengalami perbaikan di hampir seluruh wilayah, kecuali daerah pariwisata seperti Bali dan DI Yogyakarta. Catatan terakhir menunjukkan, Mandiri Spending Index di Bali masih berada di posisi 39,4 dari posisi sebelum pandemik. Hal ini membutuhkan perhatian khusus, terutama untuk menghindari adanya ketimpangan dalam pemulihan ekonomi.

Yudo juga mengatakan, ada beberapa faktor yang masih dapat menahan tren perbaikan belanja masyarakat, antara lain pembatasan mobilitas/aktivitas masyarakat yang berpotensi menekan aktivitas ekonomi dan belanja. Selain itu, masih relatif tingginya penularan Covid-19 dapat menahan keinginan masyarakat untuk berbelanja, meskipun tampaknya ada penurunan tingkat penularan Covid-19 belakangan ini.

Menurut dia, ketidakstabilan pemulihan belanja masyarakat juga didorong oleh perilaku kelompok menengah atas yang masih menahan belanja, terutama untuk kategori belanja masyarakat Indonesia disebabkan oleh masih rendahnya keyakinan kelompok masyarakat ini dalam melakukan mobilitas, termasuk berbelanja, secara aman.

Selain itu, kata Yudo, ketidakpastian ekonomi membuat pola belanja kelompok ini belum kembali ke era prapandemi. Oleh karena itu, pengendalian Covid-19 dan distribusi vaksin yang cepat akan menjadi kunci untuk mengembalikan keyakinan masyarakat, terutama kelompok menengah atas. Hal ini juga akan menjadi pendorong besar pertumbuhan konsumsi di Indonesia.

“Di samping itu, memastikan mobilitas masyarakat dapat kembali meningkat dengan aman sangat penting untuk menahan pelemahan belanja di wilayah-wilayah yang sangat bergantung pada tingkat kunjungan masyarakat (sektor pariwisata), misalnya Bali dan DI Yogyakarta,” pungkash Yudo. (ns)

6,79 Juta Wajib Pajak sudah Laporkan SPT

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatatkan sebanyak 6,79 juta Wajib Pajak (WP) baik orang pribadi (OP) maupun badan telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan tahun pajak 2020 sejak awal Maret hingga 16 Maret 2021.

“Perkembangan penerimaan SPT Tahunan dengan data *update* terakhir per 16 Maret 2021 pada pukul 16.01 WIB,” demikian kutipan dari keterangan resmi DJP yang diterima di Jakarta, Selasa (16/3).

DJP merinci sebanyak 6,79 juta WP tersebut meliputi 6,57 juta WP Orang Pribadi dan 222 ribu WP Badan. Sementara dari 6,57 juta WP oraang pribadi terdiri atas 6,36 juta orang yang melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing dan 210 ribu secara manual. Kemudian untuk 222 ribu WP badan terdiri atas 189 ribu melalui e-Filing dan 34 ribu secara manual.

DJP juga mencatat untuk total WP yang telah melaporkan SPT Tahunan pada tahun lalu berjumlah 7,63 juta orang hingga akhir 2020 dengan meliputi WP orang pribadi 7,41 juta

dan WP badan 222 ribu.

Dari total 7,41 juta WP orang pribadi yang melaporkan SPT pada tahun lalu terdiri atas 7,14 juta orang melalui e-Filing dan 268 ribu secara manual. Sedangkan 222 ribu WP badan yang melaporkan SPT hingga akhir 2020 meliputi sebanyak 181 ribu melalui e-Filing dan 40 ribu secara manual.

Berdasarkan laman resmi pajak.go.id penyampaian SPT Tahunan PPh WP orang pribadi dengan tahun pajak 2020 akan berakhir pada 31 Maret 2021 sedangkan WP badan pada 30 April 2021. (ks)

Sri Mulyani: Transaksi Digital Perlu Diatur untuk Cegah Risiko

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, transaksi digital yang terus meluas seiring perkembangan teknologi di era globalisasi perlu diatur, terutama untuk mencegah munculnya berbagai potensi risiko. Pengaturan dinilai semakin perlu bila transaksi digital tersebut dilakukan secara lintas negara.

“Setidaknya ada empat alasan mengapa transaksi digital ini perlu diatur,” kata Sri Mulyani dalam acara International Conference on Digital Transformation in Customs di Jakarta, Selasa (16/3). Alasan pertama, lanjut Menkeu, adalah agar layanan transaksi pembayaran barang digital di Indonesia bisa terekam dengan baik.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, penguasaan bea masuk dan kewajiban pengusaha melaporkan transaksi barang digital akan mendorong terciptanya statistik perdagangan lebih akurat dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan selanjutnya.

Sri Mulyani menyatakan, transaksi barang digital juga dianggap berisiko karena dapat disalahgunakan untuk transaksi ilegal, sehingga hal ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pemantauan sangat



Sri Mulyani Indrawati

ketat.

Ia mencontohkan teknologi *printing* tiga dimensi (3D) yang akhir-akhir ini menjadi semakin populer. Teknologi ini memungkinkan digunakan untuk memproduksi barang-barang yang berpotensi membahayakan keselamatan umum. “Misalnya seperti senjata api dan bahan peledak. Hanya dengan cetak biru itu bisa ditransmisikan secara digital,” kata dia.

Alasan kedua, Sri Mulyani menyebutkan, mekanisme transaksi digital juga akan memudahkan penggelapan pajak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan digunakan dalam transaksi ilegal, sehingga hal ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pemantauan sangat

itu.) Negara harus memantau, agar dapat mengelola risiko kerugian dari teknologi ini,” ucap dia.

Ketiga, dengan adanya penguasaan bea masuk dapat menciptakan perlakuan yang adil (*level playing field*) antara pedagang konvensional dan digital. Pihaknya banyak mendapat keluhan dari para pedagang konvensional yang menganggap bahwa terdapat kebijakan penguasaan pajak yang tidak adil antara mereka dengan pedagang di *platform* daring.

“Ini tantangan yang perlu ditangani agar kami dapat menciptakan *level of playing field* yang adil bagi para pemain. Film impor, video game, dan produk digital lainnya juga dituntut memiliki perlakuan yang sama seperti buku fisik,” ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Keempat, untuk meningkatkan potensi kerugian bagi pendapatan negara untuk barang yang dikirim secara elektronik. Menurutnya banyak jenis penerimaan negara yang belum bertransformasi menjadi ekonomi digital dan transaksi digital.

“Ekonomi dan transaksi digital akan mengikis basis pajak konvensional sehingga pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dengan tren baru ini dan menetapkan peran yang sama,”

ucap Sri Mulyani.

Dorong Ekonomi

Pada kesempatan itu Sri Mulyani menyebutkan bahwa adanya perkembangan teknologi dan transformasi digital akibat globalisasi mampu mendorong ekonomi Indonesia terutama di tengah masa krisis Covid-19. “Ini sebagai peluang untuk mentransformasikan perekonomian kita serta berbagai aktivitas sosial ekonomi menuju transformasi digital,” kata dia.

Sri Mulyani mengatakan, transformasi digital mampu mendorong ekonomi nasional saat pandemi karena telah mengubah cara berbisnis, beraktivitas, hingga membantu pemerintah dalam membuat sebuah regulasi.

Tak hanya itu, perkembangan transformasi digital juga memberikan banyak peluang termasuk untuk pelaku usaha kecil dan menengah karena mereka dapat bertahan selama pandemi dengan berdagang melalui *platform* digital.

“Pemerintah dituntut melakukan inovasi agar tidak hanya dapat memberikan regulasi dan kebijakan yang tepat tetapi juga mengubah cara kita berbisnis dalam melayani negara, kebutuhan masyarakat, serta bisnis,” kata dia. (ark)



Harga Bawang Merah Naik

Buruh membersihkan bawang merah di Desa Klampok, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (16/3/2021). Menurut petani setempat harga bawang merah di daerah tersebut sebulan terakhir naik dari Rp17 ribu menjadi Rp22 ribu per kilogram karena meningkatnya permintaan dan sedikitnya stok bawang merah pada musim hujan.

BeritaSatu Photo/Ruht Semiono



Kemenhub Tidak Melarang Mudik Lebaran 2021

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Dalam rapat tersebut, Budi mengatakan, pemerintah tidak melarang mudik Lebaran tahun ini meski pandemi Covid-19 masih melanda Tanah Air.

Menhub Pastikan Tak ada Larangan Mudik Lebaran

Oleh Thresa Sandra Desfika

► JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan pemerintah tak akan melarang masyarakat untuk mudik pada periode angkutan Lebaran 2021. Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan mengetatkan persyaratan perjalanan serta mengintensifkan kegiatan *tracing* bagi masyarakat yang mudik.

“Terkait dengan mudik pada prinsipnya pemerintah melalui Kemenhub tak melarang. Kami akan berkoordinasi dengan Satgas bahwa mekanisme mudik kami atur bersama dengan pengetatan dan melakukan *tracing* terhadap mereka yang melakukan mudik,” ungkap Menhub dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (16/3).

Menhub menuturkan, dalam rangka mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada masa mudik Lebaran tahun ini, pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan dan *tracing* secara ketat kepada masyarakat yang bepergian.

Menhub memperkirakan, jumlah pemudik tahun ini akan mengalami lonjakan karena program vaksinasi membuat masyarakat ingin bepergian. Selain itu, peningkatan aktivitas mudik juga karena ada kebijakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0% yang membuat

jumlah mobil bertambah. Lalu, penggunaan tes Ge Nose juga membuat masyarakat lebih percaya diri karena biayanya lebih murah.

“Oleh karenanya, kami melakukan upaya penekanan dengan menerapkan protokol kesehatan dan masyarakat beradaptasi,” kata Menhub.

Budi Karya menjelaskan, Kemenhub tengah mengkonsultasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan, yaitu dengan mempersiapkan surat hasil penyaringan Covid-19. Selain itu, penerapan protokol kesehatan lainnya yang juga akan diperketat, seperti memakai masker, menerapkan jaga jarak, melakukan disinfeksi prasarana sarana, pemberlakuan pembatasan penumpang, dan pengaturan jadwal layanan.

Lebih lanjut, Menhub mengungkapkan, pihaknya telah bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survei na-



Budi Karya Sumadi

sional tentang potensi pemudik pada masa Lebaran tahun 2021 yang akan menjadi rekomendasi pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, dalam rangka persiapan menjelang masa mudik Lebaran tahun 2021, DPR meminta Kemenhub untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan konsistensi pengawasan protokol kesehatan.

“Komisi V juga meminta Kemenhub melakukan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana transportasi berupa inspeksi terhadap personel, *ramp check* sarana transportasi, ketersediaan peralatan keselamatan, dan SOP pelayanan dan keselamatan,” jelas Lasarus.

Ge Nose

Di sisi lain, Menhub mengatakan, Ge Nose akan mulai dipakai sebagai alat deteksi Covid-19 di empat bandara mulai 1 April 2021. Keempat bandara yang dimaksud adalah Bandara Kuala Namu, Bandara Husein Sastranegara, Bandara

Internasional Yogyakarta, dan Bandara Juanda.

“Mulai 1 April kami akan mulai di sektor udara, dan kami juga akan mulai lakukan bertahap, pertama kali kami akan lakukan di empat bandara bukan di Soekarno-Hatta tapi di Kuala Namu, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya,” kata Menhub Budi.

Setelah itu, lanjut Menhub Budi, pihaknya akan mendorong penggunaan Ge Nose secara bertahap dan ditargetkan pada 1 Mei 2021 seluruh bandara di Indonesia dilengkapi dengan alat tes Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada ini.

Dia menjelaskan, Kemenhub memang mendorong pemakaian Ge Nose karena, selain buatan anak bangsa, biaya yang ditawarkan alat ini relatif lebih murah dibandingkan dengan tes PCR maupun tes antigen.

Menurut Menhub, Ge Nose sudah digunakan di 14 stasiun untuk menyaring calon penumpang kereta api (KA). Nantinya diharapkan alat tersebut digunakan di total 44 stasiun.

“Kami lakukan dulu di kereta api. Sudah ada 14 stasiun kereta api. Kita harapkan 44 stasiun akan kita selesaikan,” imbuh Budi.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR Sri Rahayu mendukung penggunaan Ge Nose tetapi dia meminta tingkat akurasi Ge Nose untuk didalami secara bersama.

“Ge Nose ini apakah benar-benar jika dibandingkan PCR dan antigen seperti apa akurasi. Kami belum tahu secara persis, meskipun itu hasil anak bangsa yang sudah diketahui pertanggungjawabannya tetapi kami belum tahu persis,” imbuh dia.

Menteri BUMN Ganti Dirut Pelindo I dan III

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengganti pucuk pimpinan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo I (Persero) dan PT Pelindo III (Perseo). Menteri BUMN Erick Thohir telah mengangkat Prasetyo sebagai direktur utama (dirut) baru Pelindo I menggantikan Dani Rusli Utama, serta menempatkan Boy Robyanto sebagai dirut PT Pelindo III menggantikan U Saefudin Noer.



Erick Thohir

“Menteri BUMN menugaskan Boy Robyanto sebagai direktur utama Pelindo III menggantikan U Saefudin Noer sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-80/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021,” ujar VP Corporate Communication Pelindo III R Suryo Khasabu dalam pernyataan resminya, Selasa (16/3).

Pemegang saham Pelindo III, kata dia, juga menunjuk Yon Irawan sebagai direktur transformasi dan pengembangan bisnis dan mengalihkan tugas Kokok Susanto dari sebelumnya sebagai direktur transformasi dan pengembangan bisnis menjadi direktur teknik.

“Kami mengucapkan selamat kepada jajaran direksi baru Pelindo III, semoga dapat membawa kemajuan bagi perusahaan. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan oleh U Saefudin Noer selama menjabat sebagai direktur utama Pelindo III periode Juni 2020 sampai dengan Maret 2021,” katanya.

Sebelum diangkat menjadi dirut, Boy Robyanto menjabat direktur teknik Pelindo III sejak Juni 2020.

Pria kelahiran Surabaya itu juga pernah menjabat sebagai CEO Pelindo III Regional Kalimantan sejak tahun Desember 2018-Juni 2020 dan *general manager* Pelindo III Cabang Tenau Kupang periode Desember 2016-Juni 2017.

gai direktur teknik Pelindo III. Adapun jajaran direksi baru Pelindo I terdiri atas Prasetyo (direktur utama), Henri Naldu (direktur SDM dan umum), Joko Noerhuda (direktur transformasi dan pengembangan bisnis), Ridwan Sani Siregar (direktur operasional dan komersial), Hosadi Apria Putra (direktur teknik), dan Roy Leonard (direktur keuangan).

Sementara itu, PT Pelindo II (Persero) atau IPC juga memiliki direktur keuangan baru sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN. Kementerian BUMN telah mengangkat Mega Satria sebagai direktur keuangan IPC menggantikan Yon Irawan.

“Atas nama manajemen kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang luar biasa dari Pak Yon Irawan selama berkarya bersama di IPC. Dalam kesempatan ini kami juga menyambut Pak Mega Satria di jajaran manajemen untuk mencapai target korporasi yang telah dicanangkan,” ujar

Direktur Utama IPC Arif Suhartono dalam keterangan resminya kemarin.

Di sisi lain, Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan telah mengangkat Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo I Prasetyo menjadi direktur utama Pelindo I yang baru menggantikan Dani Rusli Utama. Hal itu sesuai dengan hasil RUPS yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-81/MBU/03/2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Pelindo I.

Selain mengangkat Prasetyo sebagai dirut Pelindo I, RUPS juga menunjuk Joko Noerhuda sebagai direktur transformasi dan pengembangan bisnis Pelindo I yang baru. Joko sebelumnya menjabat seba-

Beberapa Isu Strategis

Dikonfirmasi terpisah, pengamat Maritim ITS Saut Gurning menilai pergantian dirut di tubuh Pelindo I dan III tidak akan berdampak signifikan. Pasalnya, rencana bisnis di kedua perseroan tersebut sudah baik dan sistematis tidak hanya di tingkat korporasi dan anak usaha, tetapi juga di lingkungan regional.

“Jadi, mungkin pergantian dirut di kedua badan usaha tidak begitu signifikan dampaknya. Karena yang dilakukan praktis tetap atas rencana-rencana strategis yang telah disepakati baik di tingkat direksi maupun komisaris,” jelas Saut kepada *Investor Daily*, Selasa (16/3). (esa/mwd)

ANGGARAN DIPOTONG

Kemenhub Optimalkan PNPB, BLU, hingga INA

JAKARTA - Pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2021 mengalami pemotongan dari Rp 45,6 triliun menjadi Rp 33,3 triliun. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, adanya kebijakan *refocusing* anggaran itu tentu berdampak pada perencanaan dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, *refocusing* juga bisa berimbas terhadap tidak terpenuhinya target-target kinerja.

Karena itu, dia meminta jajarannya meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan pemasukan dari badan layanan umum (BLU).

“Saya menekankan kepada para direktur jenderal dan kepala badan untuk meningkatkan PNPB dan BLU sehingga secara langsung dapat memberikan ruang fiskal yang lebih memadai dari apa yang sudah diberikan. *Effort* ini kami lakukan di semua sektor dan secara insentif kami lakukan,” ujar

Menhub Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (16/3).

Selain itu, kata Budi, Kemenhub pun akan berusaha mengembangkan pembiayaan lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang bakal dikolaborasi dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dalam rangka menambah ruang fiskal.

“Ada lembaga baru, SWF (Sovereign Wealth Fund) atau INA, yaitu lembaga yang menjadi mediasi antara investor luar dan usaha-usaha investasi di nasional itu secara insentif kita lakukan agar Kemenhub mendapatkan ruang fiskal tambahan dari swasta nasional dan asing,” papar Menhub.

Sementara itu, Kemenhub pada 2021 diproyeksikan mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 2,05 triliun dari Komite Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN) untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Dalam rapat koordinasi tingkat menteri dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenhub mendapat alokasi PEN untuk kegiatan padat karya sektor transportasi,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (16/3).

Menhub mengatakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, dana PEN akan difokuskan untuk kegiatan padat karya sektor transportasi yang meliputi pemeliharaan sarana prasarana, pemasangan alat keselamatan, peningkatan ruas jalan nasional, hingga pembangunan terminal, bandara, dan pelabuhan.

“Langkah ini diperlukan dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang terdampak pandemi, terutama di perko-

BPJT-Roatex Teken Perjanjian Kerja Sama Proyek MLFF

JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani perjanjian kerja sama sistem transaksi tol nontunai nirsentuh berbasis *multi lane free flow* (MLFF) dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

Perjanjian tersebut ditandatangani langsung Kepala BPJT Danang Parikesit dan *Chief Representative* Roatex Peter Ong di Kantor BPJT Kementerian PUPR, Senin (15/3).

Danang menyampaikan, sistem transaksi nontunai berbasis MLFF menjadi salah satu terobosan baru melalui sistem pembayaran nirsentuh untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, keamanan, dan kenyamanan dalam penerapan sistem pembayaran jalan tol

di Indonesia. Sistem transaksi nontunai MLFF bakal menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) atau sistem pembayaran menggunakan alat yang dipasang di mobil dan dibaca melalui satelit.

Dengan teknologi tersebut, Danang menambahkan bahwa penerapan waktu transaksi di gerbang tol akan turun menjadi nol detik dibanding dengan kegiatan transaksi gerbang tol menggunakan uang elektronik yang memakan waktu hingga empat detik.

“Teknologi ini mampu mengenali dan mengidentifikasi kendaraan pengguna, sehingga transaksi dapat dilakukan secara langsung lebih cepat dan efisien tanpa antrian dan penundaan transaksi,” papar Danang dalam keterangan resminya, Selasa (16/3).

Lebih lanjut, implementasi tahap pertama teknologi MLFF akan diterapkan mulai 2022 di 40 ruas tol di Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali. Adapun nilai investasi proyek MLFF sebesar Rp 4,4 triliun dengan masa konsesi PT RITS selama sembilan tahun sejak tanggal operasi komersial. Saat ini, Roatex Ltd. Zrt telah membentuk perusahaan sebagai badan usaha pelaksana (BUP) sistem transaksi tol nontunai nirsentuh berbasis MLFF dengan nama PT RITS.

Sementara itu, Roatex Zrt merupakan perusahaan asal Hungaria yang pada 27 Januari 2021 ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek melalui Surat Penetapan Menteri PUPR Nomor PB.02.01-Mn/132 dengan masa konsesi selama 10 tahun. BUP MLFF mulai bekerja tahun 2021

dan diharapkan sistem dapat 100% *go-live* di seluruh jaringan jalan tol di Indonesia pada 2023.

“Pada saat itu tidak ada lagi gardu tol dan pengguna jalan tol akan terhubung dengan satelit untuk proses pembayaran penggunaan jalan tol,” ucap Danang.

Di samping itu, sistem MLFF juga akan menjadi platform teknologi ITRS Intelligent Toll Road System (ITRS) yang terkoneksi dengan pengelolaan kendaraan berat menggunakan teknologi WIM atau *weigh in motion* yang mampu menimbang dan mengukur dimensi kendaraan berat secara otomatis. Teknologi WIM sekaligus menjadi instrumen penegakan hukum untuk meniadakan kendaraan dengan berat dan dimensi lebih (over dimension overload (Odo)) mulai 1 Januari 2023. (mwd)



Pembangunan Bandar Udara Kolaka Utara

Foto udara pembuat tanggul di udara untuk pembangunan landasan pacu bandar udara Kolaka Utara di Kecamatan Kodeoha, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (16/3/2021). Pembangunan bandar udara di Kolaka Utara dengan luas lahan 34 hektare itu telah masuk dalam rencana strategis nasional bersama 21 bandara di seluruh Indonesia lainnya.



Stimulus Sektor Properti

Para pekerja menyelesaikan proyek bangunan di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Selasa (16/3/2021). Sejumlah kalangan menginginkan, stimulus yang diberikan pemerintah diharapkan berdampak maksimal ke sektor properti.

Pengembang Berharap Insentif Properti Diperluas

Oleh Imam Mudzakir dan Edo Rusyanto

► JAKARTA – Pengembang properti berharap jangkauan insentif bagi sektor properti diperluas. Hal itu diperlukan guna meningkatkan daya ungkit industri properti terhadap sektor terkait dan perekonomian nasional.

“Kami berharap agar insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperluas ke seluruh segmen harga, termasuk harga property di atas Rp 5 miliar per unit,” ujar Joko Suranto, ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Barat, kepada *Investor Daily*, baru-baru ini.

Sebagaimana diberitakan, sektor properti yang tengah melemah dihantam pandemi Covid-19 mendapat angin segar dari kantor Kementerian Keuangan (kemenkeu). Pemerintah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) yang dibanderol berkisar Rp 300 juta hingga Rp 2 miliar. Lalu, mendiskon 50% untuk segmen harga Rp 2-5 miliar per unit. Langkah pemerintah menanggung PPN itu berlaku untuk rumah yang sudah jadi (*ready stock*) dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. “Hanya diberikan untuk pembelian satu unit dan tidak boleh dijual dalam satu tahun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam jumpa pers virtual, Senin (1/3).

Dia menambahkan, pihaknya mengalokasikan Rp 5 triliun untuk PPN ditanggung pemerintah. “Insentif ini agar pemulihan ekonomi 2021 akselerasinya betul-betul bisa dicapai,” kata Menkeu.

Ketentuan insentif PPN tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 21/



Joko Suranto

PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. PMK itu berlaku mulai 1 Maret 2021.

Menurut Joko Suranto, bila rentang harga properti yang mendapat insentif diperluas, dapat lebih cepat menggerakkan industri properti. Ketika industri properti menggeliat, kemampuan mengungkit perekonomian nasional menjadi lebih besar seiring bergeraknya 174 sektor terkait. “Kalau diperluas, misal, harga berkisar Rp 7-10 miliar per unit, akan lebih dapat

mendukung. Karena kelompok pemilik dana besar memiliki daya beli tinggi, sedangkan kalau dari sisi waktu, tidak apa-apa sepanjang rentang Maret-Agustus 2021,” tutur dia.

Bahkan, tambahnya, para pemilik daya beli juga perlu dirangsang untuk membelanjakan uangnya di sektor lain seperti otomotif. “Untuk batasan mobil yang mendapat insentif, kami juga berharap bisa sampai yang 4.000 cc,” tuturnya.

Sementara itu, Sri Mulyani berencana untuk memperluas cakupan diskon Pajak atas Pembelian Mobil Mewah (PPnBM) untuk mobil dengan kapasitas isi silinder hingga 2.500 cc. Tetapi kebijakan tersebut hanya untuk mobil dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 70%.

Artinya untuk mobil mobil yang berkapasitas di bawah 2.500 cc tetapi TKDN di bawah 70%, maka tidak akan mendapatkan diskon pajak. “Jadi sedang melakukan penyempurnaan, asal TKDN 70% bisa sampai ke 2.500 cc, ini yang nanti meng-address isu mengenai beberapa permintaan terhadap mobil di atas 1.500 cc di dalam relaksasi PPnBM yang diberikan,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (15/3).

Untuk saat ini, pemerintah telah menetapkan diskon PPnBM untuk pembelian mobil baru mulai Maret hingga Desember 2021 dengan kapasitas silinder 1500 cc. Diskon ini diberikan dalam tiga tahap, pertama periode Maret 2021 hingga Mei 2021, pemerintah memberi diskon sebesar 100%, kemudian periode Juni 2021 hingga Agustus 2021, besaran diskon yang diberikan sebesar 50%. Sementara untuk periode September 2021 hingga Desember 2021, diskon yang diberikan sebesar 25%. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM

atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Anggaran 2021.

Insentif Pemda

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Aperisi) Junaidi Abdullah, insentif fiskal dari pemerintah pusat seharusnya juga diikuti oleh sejumlah kebijakan kewenangan pemerintah daerah (pemda).

“Besaran BPHTB masih cukup tinggi, yaitu 5% dari harga beli dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP),” paparnya, dalam siaran pers, Selasa (16/3).

Apalagi, tambah Junaidi, selama masa pandemi Covid-19 ini, tidak dipungkiri banyak kalangan developer menghadapi masalah *cash flow*. Hal ini diakibatkan hasil penjualan yang menurun cukup drastis. “Tentunya pengembang sangat membutuhkan kemudahan dalam upayanya mempercepat pengembangan perumahan subsidi,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam memberikan insentif untuk meringankan beban dunia usaha dan para pekerjanya sudah cukup baik untuk mengontrol ekonomi di tengah pandemi virus corona ini.

“Insentif itu menurunkan biaya sehingga harga jual dari produk itu bisa lebih rendah kalau lebih rendah, kalau lebih rendah akan otomatis masyarakat bisa lebih terjangkau daya belinya,” ujar Hariyadi.

Program Sarhunta Dorong Wisata Likupang

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah membangun dan merevitalisasi sebanyak 529 rumah dalam mendorong potensi wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Likupang, Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) berupa bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (*homestay*) dan usaha pariwisata lainnya.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, Program Sarhunta ini bertujuan untuk mendukung pemulihan pariwisata daerah. Selain itu, juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang juga terdampak pandemi Covid-19.

“Kami berharap program Sarhunta ini bisa bermanfaat dalam hal peningkatan kualitas rumah masyarakat di sekitar KSPN Likupang-Manado,” kata Khalawi, dalam siaran pers, belum lama ini.

Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi I, Hujurat menjelaskan, jumlah bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata sebesar Rp 36,74 miliar. Dana dialokasikan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni yang ada di beberapa lokasi yang ada di KSPN tersebut.

Berdasarkan data Ditjen perumahan bahwa bantuan Sarhunta tersebut disalurkan untuk 263 unit yang terdapat di tiga Desa yaitu Marinsow, Pulisan, Kinunang, dan satu Kelurahan di Pulau Bunakan. Pihaknya juga berharap Sarhunta yang sudah selesai dibangun Kementerian PUPR bisa dimanfaatkan dan dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sehingga lebih



Khalawi Abdul Hamid

banyak wisatawan yang berkunjung ke Likupang sekaligus menumbuhkan ekonomi masyarakat serta peningkatan terhadap sektor

Rumah warga yang dijadikan *homestay* juga sangat nyaman karena fasilitas untuk penginapan sangat lengkap baik dan aman. Para wisatawan juga bisa berinteraksi langsung dengan penduduk dan desain rumah juga menonjolkan budaya dan kearifan lokal.

“Seluruh *homestay* yang sudah rampung 100% sudah mulai disewakan ke wisatawan dengan biaya sewa per malam nya Rp 200.000. Selain itu ada jenis bantuan peningkatan kualitas tanpa fungsi yang terdapat di sepanjang koridor KSPN Likupang berjumlah 266 unit progresnya sudah hampir rampung 100%,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Sarhunta di Likupang. Kemenparekraf sangat mengapresiasi program-program pembangunan infrastruktur dan perumahan dari Kementerian PUPR. (*imm*)

Marriott Gandeng Garuda Indonesia

JAKARTA – Marriott Internasional Indonesia (Marriott) bekerjasama dengan Garuda Indonesia guna mendukung perjalanan wisatawan lebih sehat dan selamat. Kini, Marriott mengelola lebih dari 19 brand dan 58 properti di Indonesia.

“Kemitraan dengan Garuda Indonesia selaras dengan upaya berkelanjutan kami untuk mewujudkan perjalanan para tamu dengan tetap menjunjung tinggi komitmen kami terhadap keselamatan dan kesehatan,” kata Ramesh Jackson, *area vice president* untuk Indonesia Marriott Internasional, dalam siaran pers, baru-baru ini.

Dia menambahkan, saat ini, semakin banyak wisatawan yang melakukan *staycation* dan menemukan destinasi yang lebih dekat dengan rumah. Karena itu, kemitraan tersebut memungkinkan wisatawan mengakses beberapa destinasi dan pengalaman liburan paling disukai di Indonesia dengan portofolio hotel dan resor Marriott yang luas. “Tidak diragukan lagi tahun ini sangat berbeda, tetapi, kami yakin situasi akan segera membaik dan wisatawan akan dapat melakukan perjalanan lagi,” ujar dia.

Sementara itu, Ade R Susardi, direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan Teknologi Informasi Garuda Indonesia mengatakan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Garuda Indonesia selaku *national flag carrier* dalam mendukung pemulihan dan kemajuan sektor pariwisata dalam negeri di tengah krisis Covid-19. Selain itu, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan.

Tentunya, kemitraan yang menjanjikan ini akan meningkatkan pengalaman perjalanan yang berbeda kepada pelanggan kami, karena kami memberikan pilihan yang menarik dan menghubungkan mereka ke berbagai destinasi indah di kepulauan Indonesia dengan sentiasa memastikan keamanan dan kenyamanan penerbangan bagi seluruh penumpang,” tuturnya.

Marriott mengklaim memiliki distribusi hotel yang signifikan di beberapa destinasi paling terkenal di Indonesia seperti Bali, Belitung, Surabaya, dan Yogyakarta. Portofolio hotel dan resor Marriott memiliki semua yang dibutuhkan untuk menginspirasi sebuah perjalanan dan memberikan konsep pengalaman perjalanan *holiday at home*. (*ed*)

Tingkat Kekosongan Apartemen Australia Minim

Jakarta – Rata-rata tingkat kekosongan unit apartemen di Australia dinilai sangat kecil yang mencerminkan sangat sedikit unit apartemen yang tidak disewa atau ditempati. Di sisi lain, sistem perbankan di Australia memungkinkan para nasabah untuk melakukan *refinancing* atas kredit kepemilikan apartemen (KPA) unit pertamanya meskipun cicilan belum selesai.

“Rata-rata tingkat kekosongan unit apartemen di Australia adalah sebesar 1,9% yang artinya sangat sedikit apartemen yang kosong tidak terisi,” ujar Sally Tindal, direktur riset RateCity.com, dalam siaran pers, baru-baru ini.

Menurut Manajer Penjualan Crown Group Indonesia, Reiza Arief, kondisi itu agak berbeda dengan Indonesia dimana rata-rata tingkat kekosongan unit apartemen mencapai berkisar 40-50%. Di sisi lain, bunga KPA terutama untuk *refinancing* lebih tinggi berkisar 5% (*fixed rate*) hingga 10% (*float rate*).

“Di kondisi pasar saat ini, akan sangat membantu apabila perbankan Indonesia mengikuti langkah per-

bankan Australia yang menurunkan suku bunga hingga dua kali pada 2020 untuk memberikan stimulus pada pasar properti,” kata dia, dalam siaran pers yang sama.

Dia mengatakan, sistem perbankan di Australia memungkinkan para nasabah untuk melakukan *refinancing* atas KPA unit pertamanya meskipun cicilan belum selesai. Biasanya ini dilakukan konsumen ketika KPA mereka sudah berjalan lima tahun dengan asumsi sudah terjadi kenaikan nilai unit pertama hingga 50%.

“Perbankan di Australia bisa memberikan pinjaman KPA kedua kepada konsumen hingga 80% dari harga unit yang ditawarkan,” kata Reiza.

Dia menjelaskan, hampir 90% warga Australia membeli unit apartemen dengan menggunakan kredit perbankan. Inilah salah satu sebab mengapa banyak pembeli asing menjadikan Australia sebagai tujuan utama untuk investasi properti. Dimana mereka para investor selalu menyebutnya sebagai cara “berternak” properti. (*imm*)



Rumah Tapak

Sepeda motor melintas di sebuah perumahan sederhana di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/3/2021). Rumah tapak termasuk sektor yang cukup dapat bertahan saat keadaan pandemi, terlihat dari cukup banyaknya penjualan di sejumlah lokasi dan berbagai segmen.

Jelang Ramadan, Mendag Pastikan Stok Bapok Aman



Muhammad Lutfi

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengklaim, stok bahan pokok aman menjelang Ramadan tahun ini. Mendag antara lain memastikan, harga gula tidak akan melampaui harga eceran tertinggi (HET) seperti tahun lalu.

“Pemerintah mengimpor 680 ribu ton gula mentah (*raw sugar*) untuk *idle capacity*. Dari jumlah itu, 148 ribu ton sudah digiling dan yang sudah didistribusikan 88 ribu ton. Artinya, masih ada 500 ribuan ton yang akan terus beredar di masyarakat sejak hari ini sampai Idul Fitri,” kata Lutfi dalam konferensi pers virtual, Senin (15/3).

Sementara itu, Lutfi memperkirakan, gula dari petani tebu akan mulai masuk pada pertengahan Mei mendatang. Karena itu, dia memastikan stok gula akan mencukupi kebutuhan dalam negeri. Harga gula pun dipastikan tidak mengalami kenaikan signifikan sebagaimana tahun lalu yang menyentuh Rp 16 ribu per kilogram.

Menurut Lutfi, dia sudah mengeluarkan izin impor gula sejak akhir 2020. Saat itu, harga gula di tingkat internasional belum mengalami kenaikan. Dibandingkan akhir tahun lalu, harga gula di tingkat internasional sekarang sudah naik 4-5%.

“Saya ingin pastikan juga, karena

ini barangnya banyak, pedagang tidak mungkin bisa meng-*corner* atau memojokkan kita. Kita juga ingin-formasikan ke pedagang, petani, dan pelaku usaha gula bahwa kita telah memerintahkan untuk *iron stock* yang ada di pemerintah itu lewat PT RNI dan PT P3 sekitar 150 ribu ton,” jelas dia.

Lutfi melanjutkan, Bulog juga memiliki tambahan gula 20 ribu ton dari PT Gendhis Multi Manis sebanyak 20 ribu ton. Artinya, pemerintah memiliki stok yang cukup, sehingga dipastikan tidak akan terjadi lonjakan harga gula sampai lebaran pada Mei mendatang, termasuk di wilayah Indonesia Timur.

“Saya akan pastikan harga gula di wilayah Indonesia Timur tidak melampaui HET sebesar Rp 12.500 per kg,” ungkap dia.

Sementara itu, untuk daging sapi, Lutfi tidak memungkiri kemungkinan harga mengalami peningkatan pada lebaran. Apalagi sapi impor dari Australia harganya telah naik dari sekitar US\$ 2,5 per kg bobot sapi menjadi US\$ 3 per kg. Kenaikan harga sapi di Australia ini terjadi akibat kebakaran hutan besar-besaran pada 2019.

“Karena harganya tinggi dari Australia, sampai sini pun tinggi. *Nah* sekarang ini yang kita kerjakan bagaimana mensubstitusi permintaan sapi hidup dengan daging. Yang sudah kita kerjakan saat ini, sebanyak 80 ribu ton daging kerbau telah diimpor dari India melalui penugasan ke Kementerian BUMN, dan 20 ribu ton dari Brasil kepada PT Berkidari,” kata Lutfi.

Selain itu, Lutfi mengatakan akan terus memantau distribusi pasokan daging sapi dan kerbau ke berbagai daerah, terutama Jakarta dan Aceh, yang konsumsi dagingnya meningkat signifikan saat lebaran. “Kita sedang mencoba memindahkan sapi dari sentra seperti Kalimantan Barat dan Jawa Timur untuk memastikan harga pada Ramadan dan Lebaran bisa terjaga stabil. Mudah-mudahan dengan persiapan yang dikerjakan, bisa menekan kenaikan harga agar tidak terlalu tinggi,” pungkias dia. (sny)



Terancam Punah

Perajin menyusun benang saat membuat kain tenun ‘gedogan’ di Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (16/3/2021). Kerajinan tenun ‘Gedogan Junti’ khas Indramayu terancam punah karena minimnya minat kaum muda untuk menggeluti keterampilan menenun itu dan hingga kini hanya tersisa dua penenun yang masih aktif.

Sandiaga Dorong Digitalisasi Industri Kuliner

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para pelaku usaha kuliner melakukan digitalisasi usaha untuk memperluas cakupan pemasaran produknya. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan bisnis kuliner yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Sandiaga mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pelaku kuliner adalah digitalisasi yang kurang merata. Oleh karena itu, Kemenparekraf kini tengah

mengencakan digitalisasi para pelaku kuliner lewat sejumlah program.

“Ada program ‘Ada di Warung’ untuk membantu rantai distribusi produk ekonomi kreatif dengan menyalurkan produk kuliner ke dalam jaringan warung-warung dan toko kelontong di Indonesia yang sudah dijalankan tahun lalu dan juga kembali dilakukan tahun ini juga. Kita juga ada program ‘Beli Kreatif Lokal’, termasuk kemarin juga ada Beli Kreatif Danau Toba,” kata Sandiaga dalam keterangan resminya, Selasa (16/3).

Sandiaga mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pelaku kuliner adalah digitalisasi yang kurang merata. Oleh karena itu, Kemenparekraf kini tengah

Sandiaga mengatakan, lewat program-program ini, pada 2020 Kemenparekraf berhasil mendigitalisasikan empat juta pelaku kuliner dari target dua juta pelaku. “Sedangkan, di tahun ini, program-program tersebut akan kembali dilakukan dengan target yang lebih besar, yakni sekitar delapan juta UMKM,” kata dia.

Selain itu, Sandiaga menuturkan, pihaknya juga melaksanakan sejumlah program pelatihan seperti pelatihan kemasan produk kuliner, bedah desain kemasan, bedah gerai, promosi dan

voucher diskon pada event-event di platform *e-commerce*. “Program-program ini diharapkan mampu mengangkat nama produk lokal agar tetap eksis dan bisa bersaing,” ungkap Sandiaga.

Sandiaga juga mengingatkan para pelaku kuliner untuk selalu menerapkan protokol kesehatan CHSE (*cleanliness, health, safety, and environmental sustainability*) dalam kegiatan sehari-hari. “Selain itu, perlu ada kolaborasi, adaptasi, dan inovasi dari kita bersama agar UMKM kuliner kita semakin maju,” ujar dia. (epa)

KPPU Denda Taiko Plantations Rp 1,5 Miliar



Deswin Nur

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi kepada Taiko Plantations Pte. Ltd. karena melakukan keterlambatan atas pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya.

“Dalam sidang majelis komisi pembacaan putusan Senin (15/3), KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Taiko Plantations,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam keterangan resmi, Selasa (16/3).

Deswin mengungkapkan, kasus dengan nomor register 18/KPPU-M/2020 ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU atas

notifikasi atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte Ltd dalam transaksi pengambilalihan 95% saham PT Putra Bongan Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

“Dalam proses, diketahui tanggal efektif yuridis transaksi adalah 25 Juli 2018, dan seharusnya dilakukan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat 6 September 2018. Tetapi, Taiko Plantations Pte Ltd baru menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU pada tanggal 8 April 2020,” terang dia.

Berdasarkan fakta tersebut, menurut Deswin, Majelis Komisi memutuskan bahwa Taiko Plantations Pte Ltd telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun

1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, dan menghukum Taiko Plantations Pte Ltd untuk membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar dan menyertarkannya ke kas negara selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

“Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Menteri ATR/BPN untuk berkoordinasi dengan KPPU terkait pemetaan kekuasaan lahan sawit di Indonesia, khususnya komposisi penguasaan lahan sawit oleh pelaku usaha asing dan afiliasinya, serta merekomendasikan Kepala Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan untuk berkoordinasi dengan KPPU terkait penguasaan lahan sawit di Indonesia,” pungkias dia. (epa)



Peresmian Gudang Penyimpanan Bawang Merah

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (kedua kanan) didampingi Bupati Brebes Idza Prianti (kanan) menekan tombol saat Peresmian Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Bawang Merah, di Desa Klampok, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (16/3/2021). Gudang yang mampu menyimpan bawang merah selama tiga sampai enam bulan dengan nilai penyusutan maksimal 10% tersebut diharapkan dapat menstabilkan harga dan memudahkan pendistribusian bawang merah di tingkat petani hingga konsumen.

MOBIL LISTRIK TERGANJAL DAYA BELI DAN HARGA

Pengusaha Kritisi Kenaikan Pajak Mobil Hybrid

Oleh Leonard Al Cahyoputra

► JAKARTA – Pelaku usaha mengkritisi rencana pemerintah menaikkan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil *hybrid* melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Alasannya, aturan itu baru berlaku Oktober 2021 dan akan mbingungkan prinsipal otomotif, terutama asal Jepang, yang selama ini menguasai nyaris 100% pasar mobil domestik dan ekspor. Seiring dengan itu, ke depan, pemerintah diharapkan bisa lebih konsisten dengan aturan yang dibuat.

Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TM-MIN) Bob Azam mengatakan, segala macam insentif yang diberikan pemerintah dalam pengembangan mobil elektrifikasi adalah untuk konsumen, bukan produsen. Dengan demikian, jika pajak dinaikkan, akan membuat kemampuan konsumen untuk membeli mobil elektrifikasi berkurang.

Seharusnya, lanjut dia, insentif untuk mobil elektrifikasi harus ditambah, bukan dikurangi. Sebab, mobil *hybrid* termasuk kategori mobil elektrifikasi, bersama *plug-in hybrid electric vehicle* (PHEV), mobil listrik murni (*battery electric vehicle*/BEV), dan *fuel cell*

electric vehicle (FCEV). Semua mobil itu menggunakan motor listrik untuk memutar roda. Bedanya, mobil *hybrid* juga menggunakan mesin pembakaran dalam, sedangkan BEV hanya motor listrik dengan sumber energi dari baterai.

“Sebenarnya, kami berharap konsumen yang memiliki mobil konvensional bisa hijrah ke *hybrid*. Kemudian, dari *hybrid* ke BEV. Sebab, ini hal baru bagi konsumen, sehingga tidak gampang. Pada akhirnya, yang beli mobil elektrifikasi adalah konsumen,” ujar Bob kepada *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (16/3).

Ke depan, dia berharap pemerintah harus lebih konsisten, sehingga para pelaku otomotif bisa memperhitungkan investasi secara lebih cermat dan jangka panjang. Investor memerlukan kepastian dan perspektif jangka panjang sebelum melakukan investasi. Terlebih, investasi dalam jumlah triliunan rupiah tidak akan bisa balik modal dalam 2-3 tahun, melainkan butuh waktu setidaknya 5-10 tahun. Toyota mulai merealisasikan investasi US\$ 2 miliar untuk memproduksi mobil



Bob Azam

elektrifikasi di Indonesia.

“Saat ini, regulasi belum jalan, tetapi sudah direvisi. Saya kira pemerintah yang lalu latar belakangnya. Kami berharap situasi seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Kalau regulasinya dua tahun berubah atau akan berubah lagi, pasti akan membingungkan,” ujar Bob.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif PPnBM mobil *hybrid*, sedangkan PPnBM BEV tetap, yakni 0%. Tujuannya memberikan daya tarik bagi investor yang berniat membangun pabrik BEV. Ada dua skema PPnBM mobil *hybrid*. Pertama, tarif PPnBM PHEV pasal 36 (Ps 36) sebesar 5% sebelumnya 0%, *full-hybrid* (Ps 26) sebesar 6% naik dari aturan lama 2%, dan *full-hybrid* (Ps 27) sebesar 7% dari 5%.

Sementara itu, jika pemain BEV telah berinvestasi Rp 5 triliun, tarif PPnBM mobil *hybrid* dinaikkan lagi merujuk pada skema kedua. Perinciannya, PPnBM PHEV (Ps 36) menjadi

8%, *full-hybrid* (Ps 26) 10%, *full-hybrid* (Ps 27) 11%, *full-hybrid* (Ps 28) 12% sebelumnya 8%, *mild-hybrid* (Ps 29) 12% sebelumnya 8%, *mild-hybrid* (Ps 30) 13% sebelumnya 10%, dan *full-hybrid* (Ps 31) 14% sebelumnya 12%.

“Jadi, poinnya membedakan BEV dengan *hybrid* dan PHEV. Hal ini akan memberikan *feasibility* dari investasi BEV di Indonesia,” tutur Sri.

Tantangan BEV

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara menilai, revisi PP tersebut merupakan sinyal positif dari pemerintah untuk para investor. Hanya saja, insentif adalah salah satu faktor dalam pengembangan mobil listrik. Sebab, daya beli masyarakat dan harga jual menjadi tantangan utama pengembangan mobil listrik. Saat ini, daya beli masyarakat terhadap mobil masih di bawah Rp 300 juta, sedangkan harga mobil listrik meski pajaknya sudah 0%, harganya masih mahal, Rp 600 jutaan. “Selama bertahun-tahun, pasar mobil berharga Rp 600 juta kecil. Jadi, kalau harga mobil listrik bisa di bawah Rp 600 juta, masyarakat akan mulai melirik, karena daya beli di situ,” ujar dia.

Kukuh menegaskan, pengembangan mobil listrik bukan dilihat dari serius atau tidaknya para pelaku otomotif di dalam negeri, melainkan permintaan yang belum ada. Belum lagi soal infrastruktur yang juga harus jalan.

Dia menerangkan, investor tidak hanya membuat mobil, tetapi juga infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian ulang baterai, bengkel BEV, dan daur ulang baterai.

Penjualan New Honda CR-V Naik 21%

JAKARTA - Penjualan New Honda CR-V mencapai 683 unit pada Februari 2021, naik 21% dibandingkan bulan sebelumnya. Model penyearan ini dilepas pertengahan Februari 2021.

CR-V menjadi salah satu model Honda yang mencetak kenaikan penjualan pada Februari lalu. Sementara itu, Brio tetap menjadi penyumbang terbesar penjualan Honda dan kembali mencatat penjualan tertinggi di kelasnya.

Pada 18 Februari 2021, Honda memperkenalkan New Honda CR-V yang menampilkan berbagai perubahan tampilan pada eksterior dan interior, serta serangkaian fitur canggih seperti Honda Sensing, *remote engine start*, dan *hands-free access power tailgate*. Sejak diluncurkan hingga saat ini, jumlah pemesanan Honda CR-V mencapai 1.120 unit.

Sementara itu, Brio terjual 3.361 unit pada bulan lalu atau 56% dari total penjualan Honda. Sepanjang Februari 2021, Brio Satya meraih penjualan sebesar 2.665 unit, memimpin segmen LCGC dengan pangsa pasar 28%, sedangkan Brio RS menorehkan penjualan 696 unit, sehingga menjadi pemimpin pasar *city car* dengan pangsa pasar 75%.

Selain Brio, model lain yang berkontribusi signifikan untuk penjualan Honda adalah HR-V 1.5 L sebanyak 686 unit, dengan pangsa pasar 15% di kelasnya. Kemudian, Jazz dengan pen-

jualan sebanyak 606 unit dan menjadi *market leader* di segmen *hatchback* dengan pangsa pasar sebesar 38%.

Adapun Honda Mobilio membukukan penjualan 290 unit, HR-V 1.8 L 162 unit, BR-V 90 unit, Civic Hatchback 73 unit, dan Odyssey tiga unit. Di segmen sedan, Civic Sedan meraih penjualan 33 unit, memimpin pangsa pasar sebesar 51%, diikuti City Sedan 18 unit, Accord 13 unit. Secara total, Honda mencatat penjualan ritel 6.018 unit sepanjang Februari 2021.

“Secara umum, penjualan Honda pada Februari lalu sedikit turun dibandingkan Januari, karena sebagian konsumen menunda pembelian untuk menunggu pemberlakuan relaksasi pajak awal Maret 2021,” ujar Yusak Billy, *business innovation and marketing & sales director* PT Honda Prospect Motor, Selasa (16/3).

Meskipun demikian, dia menuturkan, peluncuran model baru New Honda CR-V yang mendapatkan antusiasme sangat baik dari konsumen serta performa penjualan Brio yang masih cukup baik menjadi penopang penjualan Honda bulan lalu.

“Kami optimistis penjualan pada Maret 2021 akan meningkat, didukung pemberlakuan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0% dan model-model baru Honda yang menunjukkan *trend booking* sangat baik,” tegas dia. (ac)

BeritaSatu Photo/Emral Firdiansyah



MyPertamina

Pelanggan SPBU Pertamina memanfaatkan My Pertamina untuk membayar tagihan pembayaran pengisian bahan bakar kendaraan, di Jakarta, Selasa (16/3/2021). Bertepatan dengan Hari Hak Konsumen Sedunia yang jatuh pada 15 Maret 2021, PT Pertamina (Persero) mencatat jumlah pengguna aplikasi MyPertamina telah mencapai 10 juta. Hadirnya aplikasi tersebut merupakan wujud komitmen Pertamina dalam memenuhi hak konsumen dengan memperkuat layanan dengan memberi kemudahan transaksi secara digital.

Produksi Panas Bumi Pertamina Lampau Target

Oleh Retno Ayuningtyas

► JAKARTA – Di tengah pandemi Covid-19, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero) berhasil mencatatkan produksi panas bumi setara listrik sebesar 4.618 gigawatt hour (GWh) atau lebih tinggi 14% dari target tahun lalu 4.045 GWh. PGE menargetkan kapasitas pembangkit panas buminya dari saat ini 672 megawatt (MW) menjadi 1.112 MW pada 2026.



Ahmad Yuniarto

Balai di Sumatera Selatan, Ulubelu di Lampung, Gunung Salaj, Wayang Windu, Drajat, Kamojang, dan Karaha di Jawa Barat, Gunung Lawu di Jawa Tengah, Bedugul di Bali, serta Lahendong di Sulawesi Utara.

Ahmad melanjutkan, blok panas bumi yang dikelola pihaknya berkontribusi sekitar 88% dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia. "PGE terus berkomitmen untuk meningkatkan energi terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 23% pada 2025, khususnya dari energi panas bumi," ungkapnya.

Dari 15 blok panas bumi yang dikelola PGE, total pembangkitan energi listriknya mencapai 1.877 MW, yakni 672 MW dioperasikan

sendiri oleh PGE dan 1.205 MW dikelola melalui Kontrak Operasi Bersama. Ke depannya, PGE akan menargetkan pembangkit listrik panas bumi (PLTP) yang dikelolanya dapat meningkat menjadi 1.112 MW pada 2026.

Mengacu data PT Pertamina Power Indonesia (PPI), kebutuhan investasi untuk pengembangan kapasitas panas bumi hingga 1.112 MW ini diperkirakan mencapai US\$ 2,9 miliar untuk 2020-2026. Namun, dengan pengembangan ini, PPI berpotensi memperoleh pendapatan hingga US\$ 5,9 miliar.

Masih berdasar data yang sama, saat ini terdapat beberapa area panas bumi dengan kapasitas total 495 MW yang tengah dikembangkan. Tiga wilayah diantaranya masih dalam tahap eksplorasi, yaitu Suelawah, Hululais Extention, dan Gunung Lawu. Dua blok panas bumi lain yang dikembangkan adalah Sungai Penuh 55 MW dan Hululais 2x55 MW.

Secara total, portofolio kelistrikan dan energi baru terbarukan (EBT) Pertamina bisa naik sebesar 40 GW di 2026. Penambahan kapasitas ini didorong oleh pengembangan pembangkit listrik energi surya, biomass, biogas, air, angin, dan bahan bakar nabati (BBN) sebesar 3,4 gigawatt (GW), pembangkit energi bersih seperti gas 5,7 GW, pabrik baterai 30,2 GWh, termasuk panas bumi 1,1 GW.

"Produksi setara listrik sebesar 14% lebih tinggi dari RKAP karena pembangkitan dan penyerapan yang optimal dari area panas bumi PGE," kata Direktur Utama PGE Ahmad Yuniarto dalam keterangan resminya, Selasa (16/3).

Selain menjaga pasokan listrik dari pembangkit yang telah dioperasikan saat ini, lanjutnya, PGE juga melakukan kajian dalam rangka meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi untuk pembangkitan energi listrik. Area yang menjadi fokus awal dalam kajian ini adalah Ulubelu di Lampung

dan Lahendong di Sulawesi Utara. "Kami juga berharap kajian yang dilakukan untuk pengembangan wilayah kerja PGE dapat memberikan hasil yang positif untuk pengembangan panas bumi di Indonesia," tambah Ahmad.

Belum lama ini, PGE mendapat wilayah kerja panas bumi (WKP) baru dari pemerintah yang berlokasi di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Sehingga, PGE mengelola total 15 blok panas bumi. Rincinya, Seulawah di Aceh, Sibayak dan Sarulla di Sumatera Utara, Hululais di Bengkulu, Sungai Penuh di Jambi, Lumut

Pengamat Nilai Co-firing PLTU Berpotensi Timbulkan Beban Keuangan

JAKARTA – Rencana penerapan co-firing atau penggunaan biomassa sebagai campuran bahan bakar di PLTU berpotensi menjadi beban keuangan bagi PT PLN (Persero) atau negara lantaran harga biomassa yang tinggi di pasar. Padahal, rencana ini bukan solusi tepat untuk mencapai target bauran energi 23% di 2025.

Analisis Keuangan Energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna mengatakan, harga biomassa berkualitas tinggi di pasar saat ini lebih mahal daripada batu bara. Padahal, untuk batu bara pun, PLN membelinya pada harga yang lebih rendah dari harga ekonominya. Sehingga, rencana co-firing ini berpotensi menimbulkan risiko keuangan bagi PLN.

"Untuk PLN, [co-firing] akan meningkatkan risiko keuangan PLN. Saya belum lihat bagaimana [co-firing]



Putra Adhiguna

hingga 9 juta ton tanpa dukungan pemerintah bisajalan," kata dia dalam diskusi yang digelar Yayasan Indonesia Cerah dan IEEFA, Selasa (16/3).

Harga biomassa yang cukup tinggi ini untuk pelet kayu. Diakui, beberapa jenis biomassa lain, seperti serbuk gergaji, harganya

cukup murah. Namun, kandungan kalori dari biomassa jenis ini cukup rendah. Pelet kayu merupakan jenis biomassa yang kalorinya mendekati batu bara. "Harga dari biomassa ini tanpa ada dukungan subsidi tidak mungkin semurah yang diproyeksikan PLN," ungkapnya.

Hal ini, sebut Putra, membuat rencana co-firing PLTU sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan, Inggris pernah menjalankan co-firing di PLTU milik Drax ini. Namun, co-firing ini berhenti setelah Pemerintah Inggris mencabut subsidi. Hal ini juga membuat Drax sepenuhnya beralih ke biomassa dan mendapat subsidi £ 700 juta per tahun.

"Salah alasan pemerintah Inggris mencabut karena khawatir batu bara akan semakin banyak yang 'tersubidi' juga dengan co-firing," jelasnya. Masalah harga ini juga sangat berkaitan dengan jaminan pasok-

an. Saat ini, tambahnya, beberapa negara lain sudah siap membeli biomassa bahkan dengan harga dua kali lipat batu bara. Di Indonesia sendiri, meski memiliki potensi biomassa besar, kapasitas produksinya masih sangat sedikit.

Artinya, tutur Putra, dibutuhkan investasi besar untuk mendorong produksi biomassa sehingga bisa memenuhi kebutuhan PLN. Di sisi lain, proyeksi permintaan biomassa PLN yang tidak konsisten membuat investor ragu akan rencana co-firing ini. PLN menyatakan kebutuhan biomassa akan terus meningkat. "Sementara [porsi batu bara] PLN dan IPP [independent power producer/produsen listrik swasta] sudah terbalik. Kecil sekali [kebutuhan biomassa] kalau pembangkit PLN. Tetapi IPP tidak mudah mau terapkan co-firing, akan ada perdebatan kontraktual pembangkit memakai biomassa," jelas Putra. (ayu)

Menteri ESDM: Transisi Energi Perlu Libatkan Masyarakat

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa transisi energi sangat krusial dalam memastikan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk mencapainya, perlu adanya keterlibatan masyarakat.

Hal itu dinyatakan Arifin dalam gelaran *Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions* yang diselenggarakan oleh International Energy Agency (IEA). Pada kesempatan tersebut, Arifin mengatakan bahwa agenda ini penting, tidak hanya untuk mempercepat pengurangan emisi,

namun juga untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam proses transisi energi.

"Transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan harus memastikan aksesibilitas, keterjangkauan, ketersediaan, kesetaraan, dan keandalan energi bersih," kata di Jakarta, Selasa (16/3).

Menurut dia, Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan transisi energi yang melibatkan masyarakat, yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan yang pertama adalah reformasi subsidi energi, sekaligus menjaga keterjangkauan

dan keamanan pasokan energi.

"Indonesia telah bertransformasi dari rezim subsidi energi yang tidak efisien dan membebani menjadi kebijakan yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan lebih banyak sumber energi dalam negeri terutama gas alam dan energi terbarukan untuk mengurangi masalah neraca perdagangan," tutur Arifin.

Di samping itu, pemerintah juga telah menjalankan program mandatori biodiesel 30 persen (B30). Program ini sangat penting untuk mengurangi impor bahan bakar fosil. Pemerintah tidak hanya memanfaatkan kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar

nabati sebagai alat untuk mengurangi emisi, tetapi juga mencari peluang untuk pembangunan ekonomi yang lebih besar.

"Target transisi energi kami ditetapkan dengan target yang ambisius menuju energi bersih. Saat ini Indonesia tengah mengembangkan co-firing biomassa pada beberapa pembangkit listrik, dan berusaha untuk memperluas skala penggunaan teknologi ini. Kami juga mengevaluasi potensi kombinasi antara clean coal technology, co-firing biomassa, dan CCS/CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage)," jelas Arifin. (es)

PLN Gencar Lakukan Riset untuk Pembangkit Ramah Lingkungan

JAKARTA - Sebagai salah satu unit PLN yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur kelistrikan, meliputi transmisi dan pembangkit, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (PLN UIP JBB) sangat mendukung terhadap pengembangan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Saat ini PLN tengah gencar melakukan riset untuk menambah jumlah pembangkit yang ramah lingkungan.

"Kami sangat mendukung pengembangan dan pemanfaatan EBT di wilayah kerja kami. Karena memang membawa manfaat besar dan dampak yang sangat minimal terutama untuk lingkungan," kata General Manager PLN UIP JBB Ratnasari Sjamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/3).

Ratnasari menuturkan saat ini PLN memang tengah gencar melakukan riset untuk menambah jumlah pembangkit yang menggunakan energi dari alam. "Saat ini kami sedang menjalankan studi kelayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di salah satu wilayah kerja kami, yaitu di Banten," tuturnya.

Studi kelayakan ini bertujuan untuk menilai apakah wilayah yang dimaksud memiliki potensi untuk menjadi rumah bagi pembangkit yang menggunakan energi dari angin tersebut. "Karena pembangkit ini menyangkut keperluan banyak orang, dan akan digunakan dalam waktu yang sangat lama, sehingga untuk studinya membutuhkan banyak tahapan dan riset yang mendalam," jelas Ratnasari.

Dia mengungkapkan tantangan paling utama adalah dalam hal masih tingginya biaya pengembangan dan biaya pokok produksi dari pembangkit EBT. "Bahkan lebih tinggi dibandingkan membangun pembangkit konvensional," ujarnya. Selain itu, karakteristik pembangkit EBT sangat bergantung dengan alam, sehingga perlu ditinjau kembali kesiapannya untuk dijadikan sumber utama produksi listrik. "Itu sebabnya, teknologi yang tepat dan terjangkau perlu digunakan untuk menjawab kondisi tersebut," imbuh Ratnasari.

Kendati dihadapkan dengan berbagai kendala di lapangan terkait pembangunan pembangkit EBT, Ratnasari mengungkapkan optimismenya bahwa



Ratnasari Sjamsuddin

PLN akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk mewujudkan. "Ini dibuktikan dengan target PLN untuk meningkatkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) menjadi 1297 MW di tahun 2030. Angka ini dua kali lipat lebih besar dari kapasitas saat ini yaitu 572 MW," ujar Ratnasari. Menurutnya, ini merupakan bentuk komitmen PLN terhadap lingkungan.

Sebagai negara yang memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, PLN melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan pembangkit dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. "Untuk pemilihan jenis pembangkit di semua wilayah tidak bisa disamaratakan, tergantung dari kesediaan sumber energi yang ada. Apakah suplai energi itu dapat terus tersedia sampai puluhan tahun mendatang," papar Ratnasari.

Dia pun berharap agar semakin banyak pembangkit PLN yang menggunakan energi alam untuk memberikan listrik andal bagi masyarakat, terutama di wilayah kerja PLN UIP JBB, Jakarta dan Sebagian Banten serta Jawa Barat.

"Karena memang kita tidak bisa sepenuhnya dan selamanya bergantung pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui, untuk produksi listrik. Konversi ke energi bersih dan ramah lingkungan perlu dilakukan demi Bumi kita," ujarnya. (rap)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk
(Member of Sungai Budi Group)
Fully Integrated Palm Cooking Oil Producer
And Downstream Product And Fully Integrated Sugar Producer
("Perseroan")

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan di Hotel Westin - Ruang Padang J. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, RT 2/RW 5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang dimulai pada pukul 14.23 WIB sampai dengan pukul 14.56 WIB dalam rangka memenuhi Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK").

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris : Oey Albert
Komisaris Independen : Justinus Aditya Siharta

Direksi
Wakil Presiden Direktur : Sudarno Tasmim
Direktur : Djunaidi Nur
Oey Alfred

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 saham
Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 4.544.816.212 saham atau 99,98% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.
- Abstain : 8.000 saham atau 0,00% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.
- Tidak Setuju : 911.800 saham atau 0,02% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.

Keputusan Rapat :
Menyetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) oleh Perseroan, dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tahun keluhaj sekaj tanggal diterbitkannya atau dengan ketentuan dan persyaratan serta jangka waktu lain yang disepakati oleh para pihak yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Agenda Rapat Kedua
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 saham
Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 4.544.816.212 saham atau 99,98% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.
- Abstain : 8.000 saham atau 0,00% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.
- Tidak Setuju : 911.800 saham atau 0,02% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.

Keputusan Rapat :
Menyetujui pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan untuk menjalankan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam rangka rencana penerbitan surat utang sebagaimana dimaksud dalam agenda pertama Rapat.

Agenda Rapat Ketiga
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : 0 saham
Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 4.544.816.212 saham atau 99,98% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.
- Abstain : 8.000 saham atau 0,00% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.
- Tidak Setuju : 911.800 saham atau 0,02% dari seluruh saham yang hadir/diwakili.

Keputusan Rapat :
Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, serta memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris untuk menandatangani keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta/akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melampirkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dicekualikan.

Rapat diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :

- Persetujuan atas penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) oleh Perseroan atau entitas anak Perseroan, dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tahun keluhaj sekaj tanggal diterbitkannya atau dengan ketentuan dan persyaratan serta jangka waktu lain yang disepakati oleh para pihak yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan untuk menjalankan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam rangka rencana penerbitan surat utang sebagaimana dimaksud dalam agenda pertama Rapat.
- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan, melaksanakan, menandatangani dan/atau

Jakarta, 17 Maret 2021
PT Tunas Baru Lampung Tbk
Direksi



NGIRIT GAK PERLU NGETENG

#BeneranTanpaBatas pemakaian



Kebanyakan
ngeteng
kuota



Kuota tanpa batas
Hemat internetan tanpa ngelag
Kecepatan hingga 1 Gbps

SALES CENTER: **1500 290**

**#BENERAN
TANPA BATAS**

Keputusan Impor Beras Perlu Dievaluasi

Oleh **Ridho Syukra** dan **Tri Listiyarini**

► **JAKARTA** – Keputusan impor beras sebesar 1 juta ton perlu dievaluasi karena pasokan domestik tahun ini terindikasi melimpah, setidaknya hingga Mei 2021. Indikasi itu terlihat dari data luas panen Januari-Mei 2021 yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 5,38 juta hektare (ha) atau meningkat 0,23 juta ha (4,49%) dari periode sama 2020 yang hanya 5,15 juta ha. Perum Bulog juga menyebutkan, cadangan beras pemerintah (CBP) pada akhir Mei 2021 akan mencapai level aman di atas 1 juta ton dan hingga kini BUMN tersebut masih memiliki beras eks impor 2018 sebanyak 275.811 ton yang belum jelas penyalurannya.

Kepala BPS Suharyanto mengatakan, luas panen Januari-Mei 2021 meningkat 4,49% dari periode sama 2020 menjadi 5,38 juta ha. Dengan kondisi tersebut bisa dipastikan panen padi tahun ini akan meningkat dibanding 2020. Fenomena La Nina yang sempat diprediksikan sangat buruk ternyata justru membawa berkah karena curah hujan tinggi membuat musim tanam menjadi lebih cepat. "Kemarini sudah cek lapangan, harusnya produksi padi sampai akhir Mei bagus, setidaknya sampai Mei-Juli pasokan aman. Kalaupun ada keputusan impor seharusnya dievaluasi, tidak pada waktu panen yang sekarang mulai banyak dan puncaknya Maret-April," kata Suharyanto saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Baleg DPR yang membahas mengenai pelaksanaan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Selasa (16/3).

Suharyanto menjamin data yang digunakan pemerintah saat ini untuk komoditas padi sudah sama. Data padi diambil dengan metode kerangka sampel area (KSA) yang perumusannya melibatkan BPPT, LAPAN, BIG, Kementerian ATR/BPN, dan



Suharyanto

juga Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam metode KSA, data tidak diambil berdasarkan wawancara namun menggunakan foto dari ponsel pintar dan tiap akhir bulan tim BPS terjun ke 230 ribu titik untuk melihat luas panen padi bulanan, produktivitas juga diambil langsung dari sampel padi di setiap titik. "Dulu, iya (beda), tapi sejak 2017 dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait sudah ada metode pengambilan data, data sekarang sama, apa yang dipegang Bulog sama dengan BPS, juga

yang dipegang Kementan, waktu rapat kita pegang data yang sama," kata dia.

Mengacu data BPS pula, Kementan memperkirakan terjadi surplus beras cukup besar pada akhir Mei 2021. Pada Januari-Mei 2021, produksi beras diperkirakan 17,51 juta ton ditambah stok akhir 2020 sebesar 7,39 juta ton maka ketersediaan beras pada periode tersebut mencapai 24,90 juta ton. Dengan kebutuhan beras 12,34 juta ton maka periode tersebut neraca ketersediaan dan kebutuhan beras nasional masih surplus 12,56 juta ton. Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menjelaskan, mengacu data BPS dengan luas panen Maret-April 2021 yakni 3,40 juta ha dan merupakan masa panen raya maka diperoleh produksi beras sekitar 9,20-9,60 juta ton. "Itu dengan rata-rata produktivitas 5,13 ton per ha secara nasional," ungkap Suwandi.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menjelaskan, pada masa panen raya hendaknya memang impor dihindari, apalagi data BPS menyebutkan pada Maret-April 2021 terjadi surplus dan hal itu yang menjadi pedoman Bulog. Di sisi lain, dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kemenko Perekonomian beberapa waktu lalu tidak memutuskan impor beras, impor merupakan kebijakan dari Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan karena Bulog mendapatkan penugasan dari kementerian tersebut untuk melaksanakan impor. "Itu sebabnya saya sampaikan, kita tidak akan melakukan itu (impor) sebelum bisa menyerap dari dalam negeri, sampai hari ini (16/3) kami menyerap bahkan prediksi kami sampai tiga bulan ke depan atau sampai Mei penyerapan minimal 500 ribu ton. Sedangkan kami sekarang ada cadangan beras pemerintah (CBP) 885 ribu ton sehingga jumlahnya nanti sudah 1,30 juta ton," jelas Buwas.

Buwas mengatakan, saat rakortas bulan lalu hanya dibahas stok, cuaca, dan potensi kelangkaan sehingga bisa saja opsi impor diambil untuk menjaga *buffer stock/iron stock*. "Sudah ada penugasan tertulis Pak (impor 1 juta ton), tiba-tiba kami



Target Produk Domestik Bruto Pertanian

Petani menggunakan mesin panen padi modern atau 'Combine Harvester' di Desa Sidomukti, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (16/3/2021). Pemerintah menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian pada 2021 mencapai 3,3-4,27 persen lebih tinggi daripada realisasi pertumbuhan PDB pertanian pada 2020 yang mencapai 1,75 persen.

mendapatkan tugas untuk impor dengan alokasi 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton untuk kepentingan komersial Bulog," ujar Buwas. Padahal dalam rakortas itu, Bulog juga menyampaikan beras eks impor 2018 yang masih bermasalah dan harus segera ditangani karena itu beras CBP. Buwas kondisi demikian, apabila impor direalisasikan sementara Bulog masih menangani beras eks impor 2018 maka impor tidak akan menyelesaikan masalah. "Kalau sekarang dengan stok kita yang cukup, terus kita ditambah impor, ini bukan menyelesaikan masalah. Ini (impor) CBP, CBP digunakan atas perintah negara, melalui rakortas, jadi kita tidak bisa otomatis mengeluarkan. Jadi, ini (kalau impor dilaksanakan) akan menjadi permasalahan, sekarang ada panen, berarti ada benturan antara produksi dalam negeri dengan impor. Baru diumumkan saja sekarang harga gabah di

petani *drop*," jelas dia.

Kepala BPS Suharyanto juga mengatakan, dalam rakortas rutin terakhir di Kantor Menko Perekonomian hanya dibahas situasi terkini tentang potensi produksi padi sampai Mei 2021. Dalam rakortas tersebut, BPS menekankan bahwa selama dua tahun terakhir ini harga beras sangat stabil dan terakhir kali impor adalah 2018 dan sesudah itu inflasi sangat bagus. "Dengan memperhatikan potensi sampai April pada waktu itu sebelumnya sudah tidak perlu untuk (impor) beras. Dari hasil cek lapangan, puso juga tidak seburuk yang dibayangkan. Dan waktu itu Pak Budi Waseso sampaikan bahwa masih ada sisa impor dan minta tolong bagaimana stok itu supaya diserap oleh Kementan dengan harga diturunkan," ujar Suharyanto.

Badan Pangan
Dalam kesempatan itu, BPS

dan Bulog mendukung langkah DPR terkait percepatan pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) sesuai amanat UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sesuai amanat UU tersebut, harusnya pembentukan BPN paling lambat tiga tahun sejak UU Pangan diberlakukan pada 2012. Buwas menjelaskan, mengacu visi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional maka saat ini memang dibutuhkan keberadaan BPN dalam rangka kebijakan pangan nasional yang terintegrasi dari hulu-hilir. "Dari hasil telaah terhadap lembaga pangan di negara lain dan tata kelola yang baik, Bulog berpendapat bahwa diperlukan pemisahan yang jelas antara regulator dan operator dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pangan," jelas Buwas.

Posisi Bulog dalam kebijakan pangan saat ini adalah sebagai operator pelaksana kebijakan

pangan, meski terdapat beberapa fungsi BPN yang dimiliki Bulog, di antaranya pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah. Dalam pembahasan dengan pemerintah, Bulog telah melakukan tiga usulan alternatif reposisi Bulog dalam pembentukan kelembagaan pangan nasional/BPN, yaitu Bulog menjadi BPN yang berperan sebagai regulator dan operator, transformasi BPN dari organ kementerian dan Bulog tetap sebagai operator di bawah langsung dan koordinasi BPN atau tidak lagi di bawah Kementerian BUMN. "Dari tiga opsi itu, posisi ideal Bulog dalam rencana pembentukan BPN adalah sebagai operator yang menjalankan penugasan BPN, baik di bawah atau di luar pembinaan Kementerian BUMN," jelas Buwas.

KKP Dorong Seluruh Cold Storage Ikan Terapkan SRG

JAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong agar seluruh gudang beku (*cold storage*) di seluruh Indonesia menjalankan sistem resi gudang (SRG) guna menjaga harga ikan dan kesejahteraan para nelayan di Tanah Air. SRG merupakan langkah percepatan penyerapan produksi nelayan dan pembudidaya ikan yang belum terasap pasar dengan harga wajar, dengan begitu nelayan dan pembudidaya bisa terjamin kesejahteraannya.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Wiardi mengungkapkan, banyak manfaat yang bisa didapat dari SRG, di antaranya nelayan dan pembudidaya terlibat dalam stabilisasi harga serta mendapat modal pinjaman untuk kegiatan produksi dengan menggunakan resi, bagi pengelola hasil perikanan maka SRG bisa menjaga keberlanjutan pasokan ikan, jaminan mutu bahan baku ikan dari nelayan atau pembudidaya. Konsumen juga mendapat manfaat berupa

jaminan ketersediaan ikan dan jaminan mutu ikan yang bagus dengan harga stabil. "Karena itu, KKP mendorong sistem ini bisa diterapkan di seluruh gudang beku di Indonesia," kata Artati.

Dalam mekanisme SRG, ikan menjadi aset yang dibuktikan dengan resi. Selanjutnya, bukti tersebut bisa dijadikan jaminan agunan pembiayaan ke lembaga keuangan bank ataupun non perbankan. Bahkan, nelayan atau pembudidaya mendapatkan subsidi bunga hingga 6% per tahun dengan catatan ikan yang akan diangkut telah memenuhi standar serta penilaian lembaga penguji mutu dan harus disimpan pada pengelola gudang yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Sejak penerbitan resi gudang ikan pada 27 November 2020 hingga Februari 2021, telah terbit 8 lembar resi senilai Rp4,396 miliar, angka tersebut berasal dari 191,97 ton ikan. Selain ikan, SRG juga diimplementasikan untuk komoditas rumput laut

dan telah diterbitkan 102 lembar resi senilai Rp 88,289 miliar untuk 6.441 ton rumput laut. "Sebagai tindak lanjut dari sinergis kegiatan dalam rangka implementasi SRG, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Bappebti mendorong implementasi SRG ikan pada pengembangan di tiga WPP, yakni 711, 715, 718 dan Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," terang Artati.

Dari sisi kelembagaan pelaksanaan SRG, Direktur Logistik Ditjen PDSPKP Innes Rahmania menyampaikan, Kemendag dan KKP telah menyiapkan kelembagaannya di antaranya pengelola gudang (PG) SRG ikan yang terdiri atas PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), dan Koperasi Perikanan. Gudang SRG terdiri atas 11 gudang beku Perinus yang berlokasi di Bacan, Senoro, Ambon, Gorontalo, Bona, Sidoarjo, Timika, Muara Baru, Talaud, Makassar, dan Bitung. (dho)

PTPN Group Lanjutkan Transformasi Keuangan

JAKARTA—Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group melanjutkan program transformasi keuangan jangka panjang dengan menandatangani Perjanjian Perubahan Induk (Master Amendment Agreement/MAA) transformasi keuangan PTPN Group dengan perbankan dan lembaga keuangan nasional. Kesepakatan lanjutan itu merupakan bentuk kepercayaan kreditur dalam mendukung upaya PTPN Group mengembangkan profil bisnis yang sehat dan mendukung kinerja keuangan dan operasional yang berkelanjutan.

PTPN Group telah menandatangani MAA sebagai salah satu program transformasi keuangan PTPN Group dengan para kreditor. Acara lanjutannya adalah penandatanganan perjanjian akses sebagai bentuk persetujuan atas transformasi keuangan jangka panjang PTPN Group yang tengah dijalankan guna memperbaiki kinerja keuangan dan operasional perseroan. Sebelumnya, telah ditandatangani MAA pada 29 Januari 2021 lalu oleh kreditor

yang merepresentasikan kurang lebih 68% pinjaman PTPN Group dengan para kreditor, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agrianiaga Tbk serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Sedangkan seremoni pada Senin (15/3) merupakan lanjutan dari penandatanganan perjanjian akses yang dilakukan secara bertahap oleh kreditor lainnya sejak 5 Maret 2021 dan terakhir pada 15 Maret 2021 oleh Direktur Utama PTPN Group Mohammad Abdul Ghani yang disaksikan Wakil Menteri BUMN I Pahala N Mansury selaku wakil pemegang saham PTPN III (Persero). Dengan begitu, ke-21 kreditor yang menandatangani MAA tersebut merepresentasikan 85% dari total *exposure* kredit ke PTPN Group. Dukungan yang diberikan oleh kreditor atas restrukturisasi utang perbankan merupakan salah satu faktor kunci sukses manajemen PTPN Group dalam

menjalankan program transformasi korporasi untuk memastikan PTPN Group dapat menjalankan bisnis secara berkelanjutan.

Abdul Ghani mengucapkan terima kasih kepada para kreditor dan dukungan pemerintah dalam bentuk pinjaman IP—PEN juga mempersyaratkan dukungan dari seluruh kreditor untuk menyetujui skema transformasi keuangan jangka panjang PTPN Group. "Transformasi keuangan ini merupakan salah satu dari enam program prioritas transformasi perusahaan yang saat ini tengah kami jalankan, selain inisiatif yang mencakup *operational excellence*, restrukturisasi organisasi dan SDM, optimalisasi aset dan keimtraan," kata Ghani dalam keterangannya, kemarin.

Kreditor yang menyetujui MAA tersebut merepresentasikan sekitar 85% dari total *outstanding* kredit bank dan Lembaga Pembiayaan Non-Bank (LPN) PTPN Group per 31 Desember 2020 (*unaudited*) dengan rincian Bank Mandiri Rp 12,30 triliun (30%), BNI Rp 6,20 triliun (15%), BRI Rp 5,90 triliun (15%), LPEI Rp 2,60 triliun (6%),

Bank BCA Rp 1,10 triliun (3%), BRI Agro Rp 430 miliar (1%), Bank Syariah Indonesia Rp 497 miliar (1%), Bank Permata Rp 495 miliar (1%), Bank DBS Indonesia Rp 1,60 triliun (4%), Bank ICBC Rp 1 triliun (2,50%), Bank QNB Rp 779 miliar (1,90%), Bank UOB Rp 514 miliar (1,25%), Maybank Rp 715 miliar (1,74%), dan bank lainnya seperti Bank BTPN, Bank Victoria, Bank Danamon, Bank Muamalat, SMI, Bank Jatim, Bank Jateng, dan Bank Riau Krepi.

Wakil Menteri BUMN I Pahala N Mansury menyampaikan, penandatanganan MAA merupakan dasar dari program restrukturisasi keuangan PTPN Group. Penandatanganan itu telah merepresentasikan sekitar 85% dari total kreditor yang memberikan relaksasi kepada PTPN Group. "Terima kasih kepada para kreditor dan juga atas dukungannya karena restrukturisasi keuangan PTPN Group merupakan hal sangat penting bagi perseroan. PTPN Group merupakan perkebunan terbesar di Indonesia yang akan fokus pada kinerja," kata dia. (t)

Gaikindo Sambut Positif Diskon PPNBM untuk Mobil 2.500 Cc

Sambungan dari hal 1

Menurut dia, hampir semua negara yang memiliki industri otomotif telah memberi insentif untuk industri supaya lebih cepat pulih setelah terdampak pandemi. Apalagi, menurut dia, pemulihan pasar domestik Indonesia relatif tertinggal dibandingkan negara-negara lain.

"Negara lain kan pasarnya sudah mencapai 70%-80% seperti sebelum Covid-19, kita masih level 50%. Jadi 50% itu kan dibawah keekonomian. Keekonomiannya mungkin sekitar 70%. Jadi kalau ini berlarut-larut, tekanan terhadap efisiensi untuk penerima kerja akan semakin besar. Jadi memang harus segera," kata Bob kepada *Investor Daily*. Di samping itu, dia berharap perluasan diskon PPNBM ini memberikan *multiplier effect* bagi

perekonomian nasional. Pasalnya, industri otomotif memiliki lapisan yang cukup dalam yang melibatkan antara lain Agen Pemegang Merek (APM) mobil, distributor, dan *supplier*. "Nah, kemudian juga kita berharap bisa memenangkan konsolidasi yang akan terjadi. Setelah pandemi ini kan pasti negara-negara produsen otomotif akan melakukan konsolidasi, karena pabriknya di setiap negara itu pasti *nggak full*, ada yang 70%, 60%, dan 50%. Nah harapannya kalau ada konsolidasi, kita bisa menjadi tujuan utama untuk konsolidasi," imbuh Bob.

Di tempat terpisah, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, kemungkinan perluasan diskon PPNBM untuk jenis mobil hingga 2.500 cc sedang dibahas Kementerian

Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Keuangan, untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. Dia menjelaskan, formula aturan yang akan dilihat, apakah diskon diberikan berdasarkan kapasitas silinder dikombinasikan dengan TKDN, atau hanya murni berdasarkan TKDN. Menperin menerangkan, pemerintah menyambut baik tingginya animo masyarakat untuk menikmati kebijakan relaksasi PPNBM untuk kategori di bawah 1.500 cc. Pemerintah juga meminta produsen segera meningkatkan utilisasi agar bisa memenuhi permintaan pasar yang naik tinggi. "Ini agar penurunan harga kendaraan dapat sesuai dengan harapan dan efektif pelaksanaannya," jelas Agus.

Inggris Investasi Rp 3 T untuk Lindungi Hutan Termasuk di RI

JAKARTA—Pemerintah Inggris meluncurkan pendanaan baru senilai 150 juta Pounds atau sekitar Rp 3 triliun untuk program perlindungan hutan hujan di berbagai wilayah dunia termasuk Indonesia, Selasa (16/3). Total wilayah sasaran investasi ini setara Wales atau luas gabungan pulau Flores dan Bali, menurut keterangan Kedutaan Besar Inggris. Tujuan investasi ini adalah memangkas jutaan ton emisi karbon dan meningkatkan kualitas hidup lebih dari 600 ribu orang di wilayah hutan tropis di Afrika, Asia dan Amerika Latin.

Program Mobilisasi Finansial untuk Hutan ini untuk bisnis dan investor yang mendukung dan melaksanakan proyek pengkanaan lahan berkelanjutan dan melindungi kawasan hutan hujan seperti Amazon dan lembah sunia di Indonesia. "Indonesia adalah kandidat utama yang dapat memperoleh keuntungan dari pendanaan ini. Saya berharap inisiatif ini dapat mendukung pekerjaan besar yang berlang-

sung di Indonesia saat ini, yaitu memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan, sambil membantu kelompok masyarakat tersebut mengelola hutan secara berkelanjutan," kata Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins.

Mekanisme ini adalah yang pertama diluncurkan guna memobilisasi modal swasta untuk mendukung dan melindungi hutan dunia. "Saat kami berupaya memerangi perubahan iklim, hutan adalah sekutu terbesar umat manusia. Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar dengan menjadi rumah bagi beberapa hutan terbesar di dunia. Dan hutan-hutan ini semakin tinggi nilainya karena mereka sangat berperan penting dalam semua kehidupan," tambahnya.

Program ini diharapkan dapat menarik investasi swasta sebesar 850 juta Pounds mendukung terciptanya ribuan lapangan kerja yang mendukung pelestarian lingkungan di berbagai sektor,

seperti pertanian, pangan, dan teknologi di wilayah-wilayah ini, dan diperkirakan akan berkontribusi sebanyak 23% untuk kepentingan pengurangan emisi karbon dan dampak iklim dekade berikutnya guna memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Proyek-proyek yang berpeluang mendapat kurungan investasi termasuk sektor-sektor yang mendukung rantai pasokan yang transparan dan menerapkan standar bebas deforestasi, dan juga mendukung sekitar 600 ribu petani skala kecil dan para produsen makanan untuk memasukkan aspek perlindungan hutan ke dalam produk pertanian.

Pendanaan ini akan membantu menghilangkan 28 juta ton CO2 dari atmosfer, atau setara dengan seluruh emisi CO2 London setiap tahunnya selama 15 tahun ke depan. Pendanaan ini akan dilakukan melalui investasi pada proyek-proyek ramah lingkungan seperti panen berkelanjutan pada kacang-kacangan, biji-

bijian, dan kopi, lalu pemulihan kerusakan hutan, pengembangan diversifikasi pangan sebagai upaya pencegahan erosi, dan peluncuran kegiatan konservasi-restorasi hutan tropis sebagai penyerap dan penyimpan karbon yang paling efektif dan alami.

Pendanaan ini merupakan bagian dari komitmen Inggris sebesar 11,6 miliar Pounds untuk pembiayaan iklim internasional, yang mencakup juga janji Perdana Menteri Boris Johnson baru-baru ini untuk membelanjakan setidaknya 3 miliar Pounds bagi perlindungan alam dan keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya selama 5 tahun ke depan, yang mana proyek pemeliharaan hutan akan diutamakan. Dikutip dalam keterangan pers tersebut, Menteri Energi Anne-Marie Trevelyan mengatakan, dampak deforestasi sangatlah buruk, baik terhadap masyarakat penghuni hutan hujan maupun terhadap upaya global memerangi perubahan iklim. (b1)

Kemenkumham Periksa Kelengkapan Berkas Demokrat Kubu KLB

JAKARTA – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) telah menerima hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Saat ini, jajaran Ditjen AHU sedang memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan Partai Demokrat versi KLB.

"Pemeriksaan berkas dan lainnya masih dalam proses. Untuk memeriksa yang belum dilengkapi kubu KLB Deli Serdang," kata seorang sumber di Kemenkumham kepada *Beritasatu.com*, Selasa (16/3). Namun, sumber itu belum dapat menyampaikan secara

inci mengenai berkas-berkas yang telah disampaikan Partai Demokrat versi KLB maupun hal lainnya. Sumber itu menyebut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly akan menyampaikan lebih rinci mengenai hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Rabu (17/3). "Bagaimana detailnya akan disampaikan pada saat RDP di DPR Rabu (17/3)," katanya. Sebelumnya, Menteri Yasonna membenarkan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang telah diserahkan ke Ditjen AHU Kemenkumham. Yasonna mengatakan pihaknya akan meneliti kelengkapan dokumen hasil KLB itu. Dokumen hasil KLB itu akan dise-

suaikan dengan AD/ART Partai Demokrat.

Sementara itu Ketua Badan Pemantauan Pemilu (Bappil) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang gagal mendaftarkan kepengurusannya. Bahkan, Andi menyebut sebagai peristiwa tragis.

"Tragis, KLB Deli Serdang gagal daftar. Tidak dapat di proses pendaftarannya karena tak memenuhi persyaratan sehingga tidak bisa mendapat akses dan password pendaftaran elektronik. Bukan hanya kudeta gagal, tapi memalukan di depan publik," cuit Andi Arief dalam akun Twitter pribadinya @AndiArief_ID, Selasa (16/3). (b1)

MUI Keluarkan Fatwa Vaksinasi Tak Membatalkan Puasa

JAKARTA – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa vaksinasi tak membatalkan puasa, setelah diputuskan melalui rapat pleno membahas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 saat Ramadhan, Selasa (16/3).

"Pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 pada saat bulan Ramadhan untuk mencegah penularan wabah Covid-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa. Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular tidak membatalkan puasa," ujar Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/3).

Menurut dia, vaksinasi yang tengah dilakukan saat ini sebagai ikhtiar mengatasi pandemi Covid-19 melalui cara injeksi intramuskular. Injeksi intra-

muskular dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot.

Dengan cara tersebut, maka menurut MUI secara ketentuan hukum bahwa vaksinasi saat menjalani puasa tidak akan membatalkan puasa. Hal itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 saat Berpuasa.

"Hukum melakukan vaksinasi Covid-19 bagi umat Islam yang sedang berpuasa dengan cara injeksi intramuskular adalah boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya (dlarar)," katanya.

Kendati begitu, Komisi Fatwa MUI juga merekomendasikan pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 pada malam hari untuk mengantisipasi adanya calon penerima vaksin yang kondisi fisiknya lemah setelah menjalani puasa.

MUI mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir melakukan vaksinasi saat menjalani puasa, asalkan memperhatikan kondisi fisik.

"Pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 pada malam hari Bulan Ramadhan terhadap umat Islam yang siangnya berpuasa dan dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik," kata dia.

Maka dari itu, MUI mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir melakukan vaksinasi saat menjalani puasa, asalkan memperhatikan kondisi fisik.

"Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19," ujarnya. (b1/ant)

Peningkatan Konektivitas Dorong Berkembangnya Kota Satelit di Sekitar Jakarta

JAKARTA – Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur bisa berdampak langsung pada meningkatnya perkembangan hunian di daerah-daerah satelit sekitar Jakarta seperti Depok, Bekasi, serta Tangerang.

Pembangunan sarana transportasi massal seperti *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rail Transit* (LRT) terus berjalan. Tersedianya sarana MRT, LRT, dan juga jalur komuter (KRL *commuterline*) menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mencari hunian di Jabodetabek.

"Dalam beberapa tahun terakhir, tata kota Jakarta Raya berkembang pesat. Transportasi umum menjadi jauh lebih nyaman dan terkoneksi, baik di dalam kota Jakarta maupun dengan wilayah sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi," kata Marine Novita, *Country Manager* Rumah.com dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/3).

Ia melanjutkan, langkah pemerintah yang terus meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas membuat konsumen semakin yakin bahwa properti-properti di sekitar transportasi umum ini memiliki prospek yang bagus di kemudian hari. "Ini bisa dilihat dari meningkatnya

masyarakat untuk mencari hunian di kawasan Depok, Cikarang, Bekasi, Tangerang," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Marine menjelaskan, beberapa temuan utama Rumah.com *Consumer Sentiment Study* H1 2021. Pertama, pandemi meningkatkan kesadaran dan dorongan untuk membeli rumah.

Situasi pandemi yang memaksa responden lebih banyak meluangkan waktu di rumah rupanya memberikan sudut pandang baru terhadap responden. Kalau biasanya orang lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan menganggap rumah hanya tempat untuk beristirahat, kini mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya memiliki tempat tinggal yang lebih berkualitas.

Kedua, kebutuhan untuk menjaga jarak atau *social distancing* dan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, membuat banyak perusahaan menerapkan bekerja dari rumah atau WFH (*work from home*).

Hal ini membuat banyak orang menjadi sadar bahwa bekerja tidak harus di kantor, atau bahkan lebih jauh lagi tidak harus di kota besar yang hiruk pikuk. Lebih dari separuh atau sekitar 53% re-

sponden mengaku terpikir untuk mencari hunian di luar wilayah Jabodetabek jika bisa terus menjalani sistem kerja WFH atau *remote working*.

Wilayah-wilayah yang akan dipertimbangkan jika para pencari rumah bisa tinggal di luar Jabodetabek adalah Jawa Barat dinyatakan oleh 42% responden, Yogyakarta dinyatakan oleh 27% responden, Jawa Tengah dinyatakan oleh 19% responden, Bali dinyatakan oleh 17% responden, Jawa Timur dinyatakan oleh 15% responden dan Banten dinyatakan oleh 10% responden.

"Temuan lain dari *Rumah.com Consumer Sentiment Study* H1 2021 menunjukkan bahwa dampak dari menghabiskan lebih banyak waktu dihabiskan di rumah selama pandemi ini terlihat bahwa 33% responden menyatakan mereka menjadi memikirkan untuk memiliki rumah," ujarnya.

Sementara 26% responden menyatakan mereka ingin merenovasi atau menggunakan kembali ruangan yang ada di rumahnya, dan 12% responden menjadi memikirkan untuk pindah dari lokasi mereka saat ini.

"Sementara 53% responden berencana untuk membeli hunian tahun ini atau dalam 1-2 tahun ke depan," jelas Marine. (is)



Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Awak Media

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate berbincang dengan petugas medis saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi awak media di Hall Basket Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Vaksinasi dosis kedua Covid-19 yang diikuti lebih dari lima ribu awak media se-Jabodetabek tersebut berlangsung hingga 17 Maret 2021.

Kejaksaan Agung Ajukan Kasasi Kasus Jiwasraya

Oleh Imam Suhartadi

► JAKARTA – Tim jaksa penuntut umum (JPU) Jampidsus Kejaksaan Agung mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pengajuan kasasi tersebut berlaku untuk semua terdakwa, meski Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi masa hukuman penjara dan menjatuhkan denda terhadap empat dari enam terdakwa serta menguatkan vonis penjara seumur hidup terhadap dua terdakwa lainnya.

"Kasasi untuk semua terdakwa tidak bisa dipisah, tapi pasalnya beda-beda," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (16/3).

Keenam terdakwa tersebut, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Heru Hidayat, Syahmirwan, Joko Hartono, dan Benny Tjokrosaputro.

"Karena ada denda yang gak dijatuhkan, misalnya itu di undang-undang korupsi itu kan pidana badan sama denda kan pake frase 'dan' jadi harus duaduanya dijatuhkan," kata Ali.

Selain itu, lanjut Ali, ada barang bukti yang dituntut punya negara untuk dikembalikan atau tidak masih kurang pas waktunya bagi JPU.

Menurut Ali, upaya kasasi untuk mengembalikan putusan sesuai tuntutan jaksa tidak hanya

terdakwa Syahmirwan yang divonis seumur hidup tetapi dituntut 18 tahun, kasasi diajukan terkait barang bukti yang harus dikembalikan kepada negara. "Pokoknya yang kita tidak ada yang barang bukti kita kembalikan kita rampas untuk negara, nah di putusan itu dikembalikan, itu yang sejak di putusan pengadilan negeri seperti itu kita banding untuk Syahmirwan itu, nah kemudian kalau pengadilan tingginya masih seperti itu ya kita kasasi, itu mengurangi hak negara," ujar Ali.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebutkan upaya hukum kasasi yang dilakukan JPU sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi sebagai berikut Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Hendrisman Rahim.

■ Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Hary Prasetyo.

■ Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Heru Hidayat.

■ Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Syahmirwan.

■ Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Joko Hartono Tirta.

■ Selanjutnya, Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro.

Putusan PT DKI Jakarta

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memangkas vonis Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo dari tadinya penjara seumur hidup menjadi 20 tahun.

Putusan banding tersebut dibuat oleh majelis hakim Haryono selaku ketua majelis didampingi Sri Andini, Mohammad Lutfi, Renny Halida Ilham Malik, dan Lafat Akbar masing-masing sebagai anggota pada 24 Februari 2021.

Selain Hary, hukuman pidana penjara terhadap Joko Hartono Tirta selaku Direktur PT Maxima Integra serta Syahmirwan, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, juga turut dikurangi menjadi 18 tahun ditambah denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Sedangkan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat tetap divonis seumur hidup termasuk wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 6,078 triliun (Benny) dan Rp10,73 triliun (Heru).

Dalam perkara ini seluruh terdakwa, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008-2018 Hendrisman Rahim, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya 2008-2014 Syahmirwan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minerba Tbk Heru Hidayat dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta melakukan berbagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp16,807 triliun dalam pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya. (b1)



Pengungkapan Penyelundupan Sabu

Petugas menunjukkan cara pelaku menyelundupkan sabu seberat 6,7 kg saat rilis pengungkapan penyelundupan sabu jaringan antar provinsi, di Mapolres Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Selasa (16/3/2021). Pengungkapan ini berawal dari adanya informasi rencana transaksi penjualan narkoba di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, para tersangka menyelundupkan sabu tersebut diletakkan dalam kap mesin mobil.

Penghasilan Dua Digit Bisa Beli Rumah DP Rp 0 Sesuai Kebijakan Baru

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengubah batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah dalam program Rumah DP Rp 0 senilai Rp 14,8 juta.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020 tentang Batasan Penghasilan Tertinggi Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Perpenghasilan Rendah.

Kepgub Nomor 588 Tahun 2020 ini diterbitkan Anies pada 10 Juni 2020 lalu. Padahal sebelumnya, batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat Rumah DP Rp 0 adalah sebesar Rp 7 juta.

Hal ini diatur dalam Kepgub

Nomor 855 Tahun 2019 yang diterbitkan Anies pada 17 Mei 2019. Batasan penghasilan Rp 7 juta ini juga sesuai dengan janji kampanye Anies-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan," tulis Anies dalam Kepgub Nomor 588 Tahun 2020 sebagaimana dikutip *Beritasatu.com*, Selasa (16/3).

Batasan penghasilan tertinggi tersebut merupakan nilai penghasilan rumah tangga paling besar untuk pemberian kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumusan batasan penghasilan tertinggi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu sama dengan 3 (tiga) kali nilai angsuran atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh rumah secara kredit dengan skema pembiayaan komersial.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengatakan perubahan penerima manfaat rumah DP Rp 0 sudah diputuskan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2020 dan dituangkan dalam keputusan gubernur DKI Jakarta. Salah satu alasannya adalah membuka akses yang lebih banyak

kepada masyarakat untuk mendapat hunian DP Rp 0. "Batasan penghasilan tertinggi penerima program DP Rp 0, yang semula Rp 7 juta menjadi Rp 14,8 juta. (Alasannya) Untuk akses hunian milik, supaya banyak orang yang mengakses ke sana," ujar Sarjoko, Sabtu (13/3).

Sarjoko mengatakan, pihaknya sudah membangun sebanyak 882 unit rumah susun yang dibayar dengan skema *down payment* (DP) Rp 0 di Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 780 unit yang dibangun oleh BUMD DKI Jakarta, Perumda Sarana Jaya dan sisanya merupakan hasil kerja sama Perum Perumnas. Sementara, rumah DP Rp 0 yang sudah terjual sebanyak 681 unit hunian. (b1)



IG.Jokowi

Presiden Saksikan Vaksinasi di Bali

Presiden Joko Widodo menyaksikan vaksinasi Covid-19 di Puri Saren Agung, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (16/3/2021). Vaksinasi massal Covid-19 digelar bagi para pelaku industri pariwisata, pemuka agama, perwakilan budayawan, perwakilan pemuda, dan masyarakat setempat. Vaksinasi juga dilaksanakan serentak di Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Kota Denpasar.

Presiden Tinjau Vaksinasi Massal di Tabanan Secara Virtual

TABANAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi pelaku industri pariwisata, pimpinan umat beragama, budayawan, pemuda hingga masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali secara virtual di Kabupaten Tabanan, Selasa.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan itu dipantau Presiden Jokowi secara virtual dari Puri Ubud, Gianyar, serta diikuti 432 orang dari pelayan publik, budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kader.

Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat karena selalu dengan terus-menerus mengimbau masyarakat agar menjaga protokol kesehatan secara ketat hingga betul-betul laju penyebaran Covid-19 bisa berkurang di Provinsi Bali.

Tentunya hal itu akan dilakukan secara bertahap satu-persatu, hingga semua sektor bisa kembali normal seperti

semula. "Tapi saat ini kita harus berbicara apa adanya, masih melakukan tahapan menuju ke sebuah situasi yang normal dan kita harapkan semuanya tetap masih pada posisi waspada," katanya.

Kepala Negara mengharapkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang telah divaksinasi nanti, akan menjadi imuniti, kekebalan komunal yang terbentuk, sedangkan Presiden Jokowi secara virtual dari Puri Ubud, Gianyar, serta diikuti 432 orang dari pelayan publik, budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kader.

Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat karena selalu dengan terus-menerus mengimbau masyarakat agar menjaga protokol kesehatan secara ketat hingga betul-betul laju penyebaran Covid-19 bisa berkurang di Provinsi Bali.

Tentunya hal itu akan dilakukan secara bertahap satu-persatu, hingga semua sektor bisa kembali normal seperti

ani masyarakat dengan baik dan tanpa lelah menjadi garda terdepan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19, khususnya di Tabanan.

Ia berharap semua masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabanan, segera tervaksinasi, sehingga pemulihan ekonomi bisa secepatnya kembali normal. Untuk itu, jika telah tersedia vaksin, pihaknya dikatakan mampu memberi vaksin kepada 2.000 orang setiap harinya yang dibantu oleh 29 posko serta dibantu 3.500 tenaga kesehatan, baik dari Pemerintah maupun swasta.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemkes) melaporkan kasus harian Covid-19 di Indonesia per hari ini, Selasa (16/3) sebanyak 5.414. Terjadi penurunan dibanding jumlah kemarin yakni 5.589. Dengan penambahan ini maka total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 1.430.45.

Untuk kasus sembuh hari ini bertambah 7.716 sehingga total menjadi 1.257.663 atau 87,9% dari kasus terkonfirmasi positif. (nov)

SENTRA VAKSINASI BERSAMA BUMN

Erick Thohir Bersyukur 50.000 Warga Divaksinasi dalam 9 Hari

Oleh Imam Suhartadi

► JAKARTA - Sentra Vaksinasi Bersama yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN sejak sembilan hari terakhir di Istora Senayan Jakarta sudah melayani sekitar 50.000 orang lansia dan petugas pelayanan publik.

Sentra Vaksinasi Bersama diinisiasi Kementerian BUMN dan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Pemda DKI Jakarta, dan Indonesia Healthcare Corporation (IHC) selaku holding BUMN Kesehatan.

"Alhamdulillah dan sangat bersyukur. Ini awal yang baik karena dalam waktu sembilan hari sudah 50.000 orang yang divaksin di Sentra ini. Saya mengapresiasi warga lansia yang datang ke Istora untuk divaksin. Apalagi saya mengetahui, banyak warga para nakes dan panpel yang bertugas butuh persiapan," kata Menteri BUMN, Erick Thohir di Jakarta, Selasa (16/3).

Berdasarkan data Pcare, jumlah peserta yang telah sukses divaksin pada hari ini mencapai 8.324 orang yang terdiri dari 3.317 kalangan lansia dan 4.756 orang pekerja layanan publik.

Ditambah jumlah 42.380 peserta yang telah sukses divaksin sejak hari pertama hingga Senin (15/3), maka di hari ke sembilan beroperasinya Sentra total sudah, 50.704 peserta berhasil divaksin.

Menteri BUMN menyampaikan apresiasi kepada warga lansia dan pekerja layanan pub-

lik yang antusias menjalani vaksinasi di Sentra Vaksinasi Bersama BUMN di Istora, Senayan, Jakarta.

Pencapaian 50.000 orang yang telah berhasil divaksinasi melampaui ekspektasi yang ditargetkan Kementerian BUMN saat menggelar kegiatan yang ditunjukkan mempercepat program vaksinasi nasional tahap kedua dengan sasaran kalangan lansia dan pekerja layanan publik.

Saat Sentra Vaksinasi Bersama dibuka Senin (8/3), Erick Thohir menetapkan setiap hari sebanyak lima ribu orang akan divaksin.

Kementerian BUMN yang menjadi pelaksana Sentra Vaksinasi Bersama BUMN ini telah berkoordinasi dengan pihak Gelora Bung Karno untuk mengantisipasi membanjirnya warga lansia yang mendatangi kawasan Senayan. Beberapa arena olahraga dan kantong parkir di sekitar Istora sudah dijadikan lokasi antrian yang dilengkapi dengan garis pembatas dan kursi bagi lansia.

Sentra Vaksinasi Bersama BUMN juga sudah membuka tautan pendaftaran vaksinasi khusus lansia yang bisa diakses di: <https://lokel.com/event/vaksinasicovid19untuklansia>.

Dengan tautan ini, lansia yang memiliki KTP Non DKI Jakarta, tapi tinggal di Jakarta masih bisa mendaftar. Namun tetap harus dilengkapi dengan surat keterangan domisili dari RT/RW tempat



Erick Thohir

tinggalnya saat akan divaksin.

"Terlampainya target membuktikan bahwa banyak orang, terutama lansia ingin divaksin. Karena animo yang besar, dalam waktu dekat kami akan membuka sentra vaksinasi serupa, di Jakarta dan juga di provinsi lain. Dengan semakin banyak warga negara yang divaksin, maka herd immunity akan tercapai dan program Indonesia Sehat untuk menunjang Indonesia Bekerja bisa segera terwujud," tambah Menteri Erick Thohir.

Dalam kesempatan ini, Menteri BUMN juga berterima kasih dan memuji dedikasi, layanan, dan keramahan yang diberikan sekitar 35 dokter, 102 perawat, 310 sukarelawan dan crew yang mayoritas kalangan milenial, serta pegawai Kementerian BUMN yang setiap hari bertugas di Istora. Operasional Sentra ini dikoordinasikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Sentra Vaksinasi Bersama BUMN yang diketuai Arya Sinulingga.

Keberadaan sentra-sentra vaksinasi yang akan dibangun Kementerian BUMN bertujuan mendorong percepatan program vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai satu juta vaksin per bulan ini. Termasuk mendukung tahap kedua vaksinasi nasional yang mengarahkan 21,5 juta kalangan lanjut usia dan 16,9 juta pekerja dan pelayan publik

di seluruh Indonesia untuk segera divaksin

Masyarakat Jangan Panik

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengimbau masyarakat agar tidak panik karena vaksin Covid-19 yang diberikan pemerintah adalah aman, halal dan berkualitas serta dijamin tidak kedaluwarsa.

"Vaksin yang akan mendekati masa habis pakainya, yaitu vaksin CoronaVac, batch pertama, yang siap pakai telah didistribusikan sejak Januari lalu dan diberikan pada tahapan vaksinasi pertama kepada tenaga kesehatan, dan kedua pada petugas pelayanan publik, sehingga vaksin tersebut telah habis digunakan," ujar Wiku dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (16/3).

Wiku membantah informasi keliru yang menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 yang diberikan pemerintah telah mendekati masa kedaluwarsa.

Karena itu dia meminta agar masyarakat tidak panik karena pemerintah memastikan produk yang diberikan kepada publik yang aman, halal dan berkualitas.

Di tempat terpisah, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan vaksin CoronaVac yang akan mendekati masa kedaluwarsa adalah vaksin gelombang pertama sebanyak 1,2 juta dan 1,8 juta dosis. Seluruh vaksin itu telah habis digunakan sebelum melewati masa kedaluwarsanya. Vaksin CoronaVac dibuat perusahaan farmasi asal China, Sinovac Biotech.

"Terkait kedaluwarsa vaksin Sinovac, kami sampaikan bahwa yang akan kedaluwarsa merupakan vaksin CoronaVac batch pertama, yaitu sejumlah 1,2 juta dosis dan 1,8 juta dosis," katanya. (b1/ant)

Mendagri: Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Sesuai UU

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan,

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

"Kita konsisten kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kami dari Mendagri berpendapat, Pilkada tetap dilaksanakan tahun 2024," kata Mendagri seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Selasa (16/3).

Ia mengatakan, Pilkada Serentak 2024 merupakan amanat Undang Undang yang harus dijalankan. Perbaikan dapat dilakukan pasca pelaksanaan,

bukan sebelum Pilkada dilaksanakan.

"Kita harus konsisten. Undang-Undang ini kita ikuti, kita jalankan untuk Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024. Kita bisa revisi setelah kita laksanakan, bukan sebelum kita laksanakan," tegasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat 8 disebutkan, Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

"Pilkada merupakan amanat Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2016, di mana nanti pilkada akan dilaksanakan secara serentak di bulan November Tahun 2024," ujarnya.

Mendagri menilai, tata kelola dan manajemen dalam pelaksanaan pesta demokrasi menjadi kunci pelaksanaan pilkada yang sukses. Berkaca pada Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19, pelaksanaan pilkada terbilang sukses dengan mencatatkan partisipasi masyarakat dan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang tinggi.

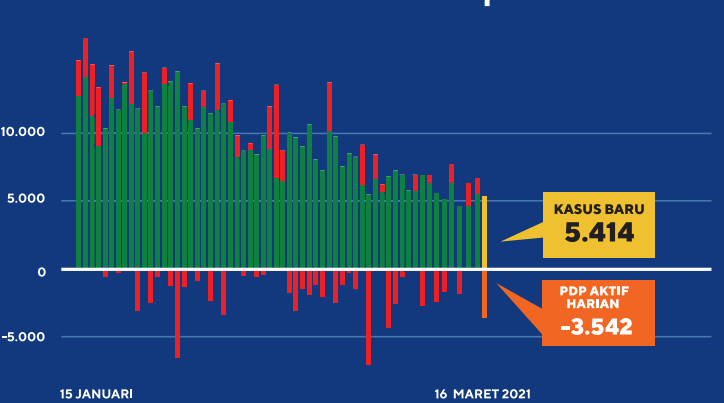
"Belajar dari Pilkada tahun 2020, kita melihat bahwa kuncinya adalah tata kelola. Tata kelola yang baik, manajemen yang baik, kerja sama dari semua stakeholder itu menjadi kunci. Sehingga, jika akan melaksanakan pemilu di tahun 2024, kuncinya adalah kesiapan, simulasi, tata kelola, dan kemudian kerja sama, kerja sama semua stakeholder terkait sehingga akan dapat dilaksanakan pemilu yang lebih lancar, aman, tertib, dan relatif rendah konflik," kata Mendagri. (nov)



Sidang Perdana Rizieq Shihab

Layar menampilkan suasana sidang perdana kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). FOTO: B1/Joanito de Saojao

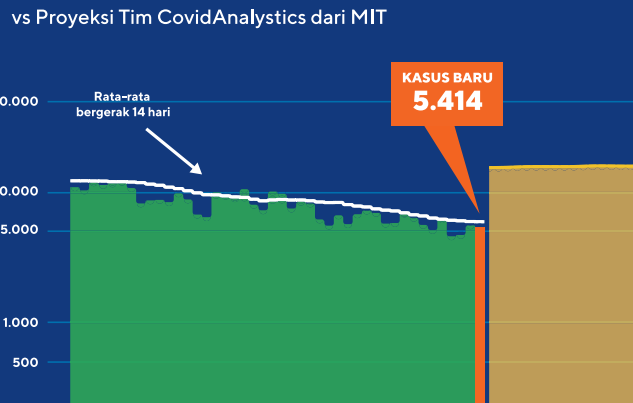
Data Kasus Baru Covid-19 dan Suspect Aktif Harian



Keterangan: Mulai tanggal 14 Juli Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengganti istilah PDP dengan suspect dan menggabungkan data orang dalam pemantauan (ODP) dengan data suspect.

SUMBER: BERITASATU RESEARCH

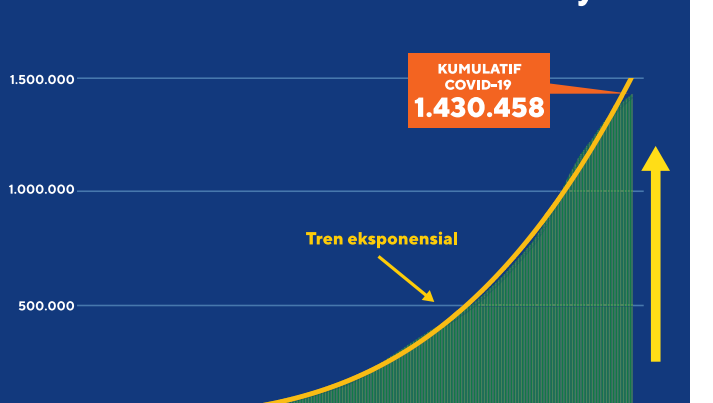
Kasus Baru Harian Covid-19 di Indonesia



Keterangan: Proyeksi dimutakhirkan pada tanggal 21 Februari 2021. Model memperkirakan jumlah kasus akan terus meningkat sampai jumlah kasus baru mencapai lebih dari 10.000 kasus per hari pada bulan April. Sebelumnya, dalam rangka target 20 Januari 2021 tim CovidAnalytics memperkirakan pandemi akan mencapai lebih dari 150.000 kasus per hari pada bulan Maret.

SUMBER: MIT OPERATIONS RESEARCH CENTER

Kasus Kumulatif Covid-19 dan Trennya



Tren eksponensial

SUMBER: BERITASATU RESEARCH

INVESTOR DAILY

MARKETS & CORPORATE NEWS | 15

REKOMENDASI

Victoria Sekuritas

IHSG diperkirakan bergerak pada rentang 6.242-6.377 untuk perdagangan Rabu (17/3). Analisis merekomendasikan **Buy EXCL** (TP 2.290), **AGRO** (TP 1.415), **MIKA** (TP 3.070), **BJBR** (TP 1.670), dan **TPIA** (TP 11.225). Mayoritas bursa Asia ditutup menguat pada perdagangan Selasa (16/3), ditopang sentimen positif terkait turunnya *yield* obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) tenor 10 tahun dari level 1,64% ke level 1,60% (15/3). Selain itu, kepastian seputar vaksinasi di AS juga turut meningkatkan *confidence* pelaku pasar.

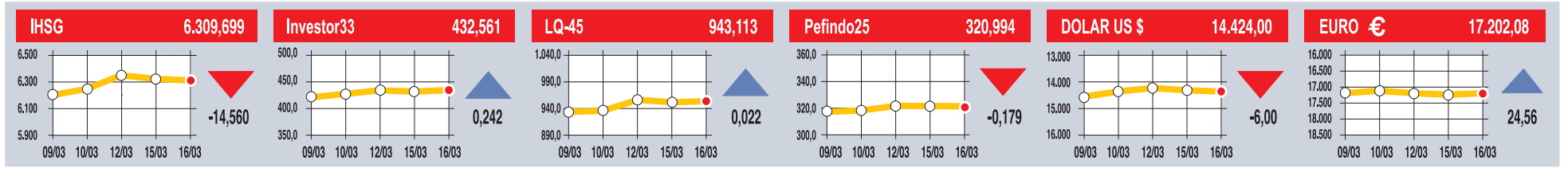
Phintraco Sekuritas

IHSG diperkirakan kembali bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah dalam rentang 6.250-6.380 (pivot level 6300) pada perdagangan Rabu (17/3). Penyempitan *slope* pada Stochastic RSI menjadi salah satu indikasi technical dari potensi berlanjutnya *technical correction* IHSG pada perdagangan Rabu (17/3). Disamping faktor teknikal, sikap *wait and see* pelaku pasar jelang pengumuman hasil FOMC dan pidato Kepala the Fed, Jerome Powell pada Kamis (18/3) dini hari WIB diperkirakan menjadi faktor lain yang berpotensi mempengaruhi IHSG.

Sikap *wait and see* tersebut berpotensi memicu fluktuasi nilai tukar rupiah jelang pengumuman FOMC tersebut. The Fed diperkirakan mempertahankan interest rate pada level 0,25% dalam FOMC tersebut, namun pelaku pasar juga menantikan pidato dari Kepala the Fed, Jerome Powell, terutama mengenai arah kebijakan the Fed kedepan. Saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan Rabu (17/3), antara lain : **BBRI**, **BJBR**, **BRIS**, **GGRM**, **MIKA**, **ICBP** dan **SCMA**.

DISCLAIMER

Materi tulisan ini hanya memberikan informasi dan bukan sebagai ajakan kepada siapapun untuk membeli atau menjual efek tertentu. Keputusan melakukan transaksi saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal.



Sinarmas Keluar dari Proyek Chengdu Garden

Oleh **Farid Firdaus**

► **JAKARTA** – Sinarmas Land Ltd, induk usaha PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), mengakhiri investasinya atau exit dari perusahaan patungan Chengdu Youxing Garden Co Ltd di Tiongkok, yang didirikan pada 2018. Sebagai dampaknya, perseroan meraih keuntungan atau *pre-tax return* senilai RMB 101,03 juta atau setara Sin\$ 20,87 juta dari total investasi Sin\$ 102,68 juta.

Chengdu Youxing Garden merupakan hasil kerja sama antara Sinarmas Land dan Rong Qiao yang dilakukan pada Agustus 2018. Sinarmas Land memiliki 40% saham pada perusahaan patungan tersebut. Proyek Chengdu fokus pada proyek komersial dan residensial dengan luas lahan 56.868 meter persegi.

“Alasan perusahaan mengakhiri investasi adalah alasan komersial yakni menarik keuntungan dari hasil investasi,” kata Direktur Sinarmas Land Robin Ng Cheng Jiet dalam keterangan resmi kepada Bursa Efek Singapura (SGX), Selasa (16/3).

Perseroan menilai, transaksi ini tidak memberikan dampak material terhadap kinerja keuangan. Sementara, pihak manajemen dan pemegang saham Sinarmas Land tak ada

yang memiliki saham secara langsung pada Chengdu Youxing Garden.

Berdasarkan catatan *Investor Daily*, Sinarmas Land memiliki portofolio investasi lain di Tiongkok. Perseroan melalui anak usahanya, Shining Gold Real Estate (Chengdu) Ltd, pernah menandatangani kesepakatan pembentukan usaha patungan dengan Rong Qiao Group dan Taicang Rongguan Real Estate Development Ltd pada 26 Maret 2019. Ketika itu, total Investasi dalam JV ini sebesar RMB 222,34 juta atau setara Sin\$ 44,7 juta.

Pada proyek tersebut, Sinarmas Land dan Rong Qiao Group mengembangkan proyek perumahan dengan luas lahan 49.358 meter persegi di kawasan Chengxiang, Taicang City. Lokasinya sekitar 50 km arah barat laut dari

Bandara Internasional Hongqiao.

Tahun lalu, Sinarmas Land membukukan pendapatan Sin\$ 910,47 juta atau turun 22,3% dibandingkan 2019 sebesar Sin\$ 1,17 miliar. Pendapatan dari bisnis di Indonesia masih berkontribusi paling besar, yakni Sin\$ 868,53 juta pada 2020, turun 22,9% dibandingkan 2019 sebesar Sin\$ 1,12 miliar. Sementara di Inggris, pendapatan perseroan naik tipis 3,5% menjadi Sin\$ 36,89 juta, kemudian pendapatan di Malaysia mengalami pelemahan 51,3% menjadi Sin\$ 4,82 juta dan di Tiongkok anjlok 58,5% menjadi Sin\$ 0,22 juta.

Ekspansi di Indonesia

Tahun lalu, Sinarmas Land tercatat mengakuisisi sekaligus tiga perusahaan properti di Indonesia senilai total Rp 347,76 miliar. Perusahaan tersebut adalah PT Bhumindo Repenas Jayautama, PT Cibubur Permai Lestari, dan PT Gunung Indah Permai Lestari.

Direktur Sinarmas Land Ltd Robin Ng Cheng Jiet mengatakan, perseroan mengakuisisi Bumindo Repenas senilai Rp 129,20 miliar, Cibubur Permai senilai Rp 145,33 miliar, dan Gunung Indah Permai senilai Rp 73,22 miliar. Pembelian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian yang dilakukan tim independen profesional atas aset masing-masing perusahaan per 30 September 2020.

“Karena salah satu penjual adalah pihak yang terafiliasi, maka pembelian saham perusahaan-perusahaan ini di bawah perjanjian *shareholder’s mandated for interested person transaction*,” kata dia dalam keterangan ter-

tulis, baru-baru ini.

Transaksi akuisisi dibayar secara tunai menggunakan kas internal Sinarmas Land. Adapun nilai aset bersih Bhumindo Repenas tercatat Rp 128,01 miliar, Cibubur Permai sebesar Rp 141,59 miliar, dan Gunung Indah Permai sebesar Rp 72,32 miliar per 30 September 2020. Tiga perusahaan ini otomatis menjadi anak usaha baru Sinarmas Land. Dengan demikian, Sinarmas Land turut memiliki lahan properti baru.

Di luar transaksi akuisisi ini, Sinarmas Land menambah kepemilikan saham pada sejumlah anak usahanya. Semisal, perseroan menambah saham pada PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menjadi 60,07%, dari sebelumnya 59%. Nilai pembelian ini terbagi dua, yakni 192,34 juta saham senilai Rp 153,64 miliar dan 35,53 juta saham senilai Rp 28,32 miliar. Dampak penambahan saham di BSD membuat porsi saham Sinarmas Land di PT Duta Pertiwi Tbk (DUT) menjadi 53,20% dari sebelumnya 52,25%.

Selanjutnya, Sinarmas Land turut menambah saham dalam perusahaan investasi, PT Serpong Mas Media dengan nilai transaksi Rp 82,52 miliar. Tak berhenti di situ, Sinarmas Land juga meningkatkan kepemilikan saham pada PT Bhineka Karya Pratama menjadi 95,13% dari semula 81,32%, lalu pada PT Simas Tunggal Center menjadi 92,56% dari sebelumnya 92,28%, dan pada PT Sinar Mas Teladan menjadi 69,65% dari 68,59%. “Dengan meningkatnya kepemilikan saham efektif pada masing-masing perusahaan, diharapkan menambah kontribusi untuk profitabilitas perseroan,” ujar Robin.

Prev	Bid	Offer	Last	Change	Freq	Volume	V
1,275	1,355	1,360	1,355	▲ 80 6.27%	26,768	2.4 M	31
52	70	0	70	▲ 18 34.62%	25,598	12.0 M	7
1,900	1,815	1,820	1,815	▼ -85 -4.47%	21,675	1.0 M	19
1,340	2,280	2,290	2,290	▼ -50 -2.14%	20,301	1.2 M	28
372	380	382	382	▲ 10 2.69%	19,668	3 M	16
4,570	4,760	4,770	4,750	▲ 180 3.74%	18,014	8.4 M	39
880	935	975	930	▲ 50 5.68%	15,375	1 M	10

Laba Bersih BEI

Pekerja melintasi layar pergerakan harga saham di galeri Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (16/43/2021). BEI membukukan peningkatan laba bersih periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 8,92% menjadi Rp489,38 miliar pada 2020, dari sebelumnya Rp449,31 miliar.

Trimegah Jual Saham Centratama Rp 398,1 Miliar

JAKARTA – PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) menjual seluruh saham miliknya di PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT) senilai Rp 398,14 miliar. Penjualan saham ini bertujuan untuk pelunasan saham (*repurchase agreement/repo*). Repo merupakan transaksi membeli efek dengan janji menjual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.



Stephanus Turangan

Direktur Utama Trimegah Sekuritas Stephanus Turangan mengatakan, penjualan saham ini dilakukan dua kali, yakni pada 4 dan 10 Maret 2021. Pada 4 Maret 2021, Trimegah masih tercatat sebagai pemegang 2,36 miliar unit saham Centratama. Kemudian, dilepas hingga berkurang menjadi 1,71 miliar atau tersisa 5,5%.

Penjualan berlanjut pada 10 Maret 2021, Trimegah menjual seluruh kepemilikan sahamnya di Centratama. Harga penjualan seluruh saham ini sebesar Rp 168 per saham, sehingga total penjualan mencapai Rp 398,14 miliar. “Tujuan transaksi untuk pelunasan repo, status kepemilikan saham langsung berdasarkan transaksi *reverse repo*,” ungkap Stephanus dalam keterangan tertulis.

Sekuritas Syafrandi A Saleh mengatakan, sebelum adanya transaksi, perseroan hanya memiliki 189,69 juta atau 0,61% saham di Centratama. Namun, setelah transaksi, perseroan memiliki 2,36 miliar atau 7,6% saham di Centratama.

Syafrandi menjelaskan, penambahan kepemilikan ini dilakukan melalui *reverse repo* sebanyak 2,36 miliar saham dengan harga Rp 63,29 per saham, sehingga total transaksi dari *reverse repo* mencapai Rp 150 miliar. Sedangkan saham yang dijual berada pada harga Rp 120 per saham, sehingga diraih dana Rp 22,76 miliar. “Saham yang dibeli bertujuan untuk

reverse repo dan saham yang dijual untuk divestasi,” kata dia dalam keterangan resmi.

Clover Universal

Berbeda dengan Trimegah, pemegang saham Centratama lainnya, yakni Clover Universal Enterprise Ltd, justru menambah kepemilikan sahamnya sebanyak 1,91 miliar saham. Tambahan tersebut menjadikan Clover sebagai pemegang 47,95% saham atau 14,95 miliar saham Centratama.

Perusahaan pengendali Centratama ini telah membeli sebanyak 1,91 miliar saham Centratama pada 25 Februari 2021. Harga beli berada di level Rp 168 per unit. Dengan demikian, perusahaan tersebut merogoh dana hingga Rp 321,74 miliar.

“Transaksi ini dimaksudkan untuk investasi. Dengan adanya transaksi tersebut, Clover Universal Enterprise menjadi pemegang 47,95% saham Centratama Telekomunikasi Indonesia,” jelas *Corporate Secretary* Centratama Wiwik Septriandewi.

Di sisi lain, Centratama pada awal Februari lalu mengumumkan rencana aksi korporasi berupa penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau *rights issue* dengan melepas sebanyak 34 miliar saham baru atau lebih dari 100% dari total saham yang beredar saat ini. (git)

PERCEPATAN DIGITALISASI DI PASAR KEUANGAN SYARIAH SAAT PANDEMI



WIMBOH SANTOSO
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan



ERICK THOHIR
Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah



TAUFIQ ALJUFRI
Founder & CEO PT Dana Syariah Indonesia



VENTJE RAHARDJO
Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



EKO LISTIYANTO
Wakil Director & Pengamat Ekonomi INDEF



PRIMUS DORIMULU
Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Group

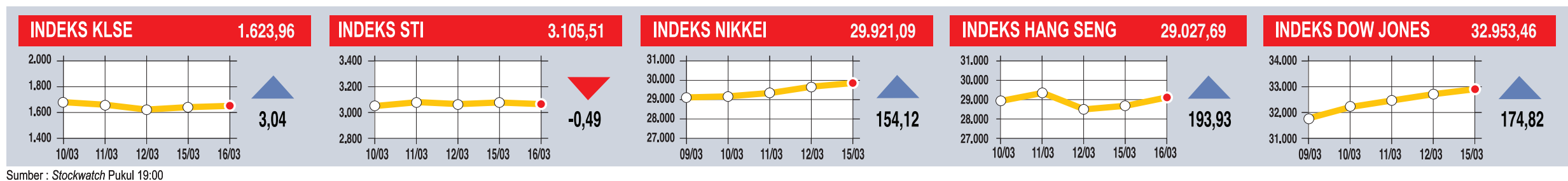
JUMAT, 19 MARET 2021
PUKUL 13.30 s.d 15.30 WIB

FREE ONLINE REGISTRATION
brt.st/syariahdigital

FREE E-SERTIFIKAT
KHUSUS PESERTA ZOOM

@ Rp.200.000,-
UNTUK 3 ORANG PENANYA TERBAIK BERUPA TOP UP E-WALLET

LIVE VIA ZOOM **LIVE STREAMING** **@Beritasatu**



Sumber: Stockwatch Pukul 19:00

Astra Tetap dalam Kehati-hatian

Oleh Parluhutan Situmorang

PT Astra International Tbk (ASII) mendapatkan angin segar dari pemulihan ekonomi, penerapan insentif pajak pembelian mobil, dan penguatan bisnis anak usaha. Namun, perseroan masih menghadapi kehati-hatian, terutama di bisnis otomotif tahun ini.



Djony Bunarto Tjondro

Direktur Utama PT Astra International Tbk

Djony lahir pada 1964. Dia diangkat menjadi direktur utama Astra International pada 16 Juni 2020. Djony sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden direktur perseroan sejak 2019 dan direktur perseroan dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Ia bergabung dengan Grup Astra pada 1990 dan saat ini memegang beberapa jabatan, antara lain presiden komisaris PT Toyota-Astra Motor, PT United Tractors Tbk, dan PT Pamapersada Nusantara serta komisaris PT Astra Honda Motor. Sebelumnya, Djony juga memegang jabatan antara lain presiden direktur PT Astra Sedaya Finance (2009-2013), chief executive PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation (2013-2018), presiden komisaris PT Astra Otoparts Tbk (2015-2018), wakil presiden komisaris PT Astra Daihatsu Motor dan PT Isuzu Astra Motor Indonesia (2016-2018), serta komisaris PT Astra Sedaya Finance (2016-2020), PT Astra Agro Lestari Tbk, dan PT United Tractors Tbk (2017-2020). Dia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Teknik (jurusan Teknik Mesin) Universitas Trisakti, Indonesia dan di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI)/Monash Mt. Eliza Business School – Australia.



JOANITO

Analisis BRI Danareksa Sekuritas Stefanus Darmagiri mengungkapkan, meski ekonomi nasional diperkirakan mulai pulih dan semakin banyak jumlah penduduk yang mendapatkan vaksin Covid-19, prospek bisnis perseroan diperkirakan tetap dalam kehati-hatian tahun ini. Guna mendukung pertumbuhan di tengah kehati-hatian ini, perseroan memang sedang menjajaki peluang baru, khususnya bisnis digital.

"Kehati-hatian pertumbuhan bisnis Astra International tahun ini mendorong kami untuk memangkas target harga saham ASII dari Rp 7.800 menjadi Rp 7.500 dengan rekomendasi dipertahankan beli. Target harga ini juga mempertimbangkan penurunan target harga saham PT United Tractors Tbk (UNTR) menjadi Rp 31.000," tulis Stefanus dalam risetnya.

Terkait dampak kebijakan pemerintah yang membebaskan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc sepanjang Maret 2020, menurut dia, belum bisa diprediksi pasti dampaknya terhadap penjualan otomotif perseroan. Sebelumnya, Gaikindo telah merevisi naik target penjualan mobil nasional menjadi 750 ribu unit tahun 2021 atau bertambah 80 ribu unit dari perkiraan semula.

Meski terbuka peluang peningkatan permintaan mobil setelah kebijakan insentif pajak, Astra International

diprediksi menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan pasar akibat kekurangan pasokan bahan baku dari prinsipal, menyusul kekurangan semikonduktor. Toyota dan Daihatsu memang sedang mencari sumber semikonduktor lain untuk mengatasi kekurangan pasokan tersebut.

"Kami memperkirakan masalah tersebut bisa berimbas terhadap produksi mobil perseroan pada kuartal II-2021, khususnya menjelang puasa dan Lebaran. Oleh karena itu, kami mempertahankan asumsi penjualan mobil nasional sebanyak 780 ribu unit tahun ini atau melonjak 46,5% dari perolehan tahun 2020," jelas Stefanus.

Terkait dukungan pemerintah untuk pengembangan mobil listrik (*electric vehicle/ EV*) guna menekan emisi karbon, Stefanus menjelaskan bahwa Astra memang sedang mengambil sejumlah strategi yang mengarah pengembangan EV. Bahkan, perseroan telah mulai menjual kendaraan *hybrid*, PHEV, dan EV. Perseroan melalui Toyota dan Lexus telah memasarkan setidaknya 10 model kendaraan ramah lingkungan, yaitu delapan mobil HEV, satu PHEV, dan satu EV.

Astra juga sudah mulai generik mendidik pelanggan terkait keuntungan penggunaan mobil listrik guna meningkatkan permintaan masyarakat. Selain itu, perseroan menargetkan mulai memproduksi mobil listrik di dalam negeri mulai tahun depan.

Namun, kehati-hatian terhadap prospek industri otomotif tahun ini mendorong BRI Danareksa Sekuritas memangkas target laba bersih Astra International dari Rp 17,55 triliun menjadi Rp 17,16 triliun tahun ini. Sedangkan pendapatan dipertahankan dengan target harga Rp 214,71 triliun. Target ini mempertimbangkan penjualan sekitar 780 ribu unit mobil dan sebanyak 3,19 juta unit sepeda motor secara nasional.

Tahun lalu, Astra International meraih pendapatan bersih Rp 175,04 triliun, turun 26% dibandingkan 2019 sebesar Rp 237,16 triliun. Laba bersih dengan menghitung keuntungan dari penjualan PT Bank Permata Tbk (BNLI) mencapai Rp 16,2 triliun, turun 26% secara tahunan. Tanpa memasukan keuntungan tersebut, maka laba bersih Astra terpengkas 53% secara tahunan menjadi Rp 10,3 triliun.

Pelemahan kinerja itu dipicu pandemi Covid-19 dan langkah-langkah penanggulangannya yang menyebabkan penurunan kinerja divisi otomotif, alat berat dan pertambangan, serta jasa keuangan.

Sebelumnya, analisis Trimegah Sekuritas Hasbie dan Willinoy Sitorus dalam risetnya mengungkapkan, Astra International merupakan produsen mobil yang paling diuntungkan dalam penerapan insentif pajak tersebut. Sebab, jumlah produk perseroan terbanyak mendapatkan insentif.

Selain insentif PPnBM untuk mobil, pemerintah merelaksasi



Prospek ASII
Trimegah Sekuritas

Rekomendasi : Buy

Target Harga : Rp 7.500

Harga Terakhir : Rp 5.550

Potensi Gain : 35,1%

BRI Danareksa Sekuritas

Rekomendasi : Buy

Target Harga : Rp 7.500

Harga Terakhir : Rp 5.550

Potensi Gain : 35,1%

Ringkasan Kinerja Keuangan Astra International
(dalam miliar Rp)

	2018	2019	2020F	2021F	2022F
Pendapatan	239.205	237.166	170.039	209.336	242.425
EBITDA	35.703	34.637	24.168	33.519	38.513
Laba bersih	21.673	21.707	17.427	18.747	24.434
EPS (Rp)	635	536	430	463	604
ROA (%)	6,8	6,2	4,9	5,2	6,5
ROE (%)	16,6	15,2	11,4	11,4	13,6
PE (x)	10,9	10,9	13,6	12,6	9,7
P/BV (x)	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3
Kas akhir tahun	25.193	24.330	43.164	21.750	15.845

Sumber: Trimegah Sekuritas

uang muka menjadi 0% untuk pembelian mobil secara kredit. Meski demikian, hal itu masih perlu dikaji lebih jauh seberapa besar dampak relaksasi tersebut, menyusul sejumlah perusahaan pembiayaan masih kaku dalam pengenaan uang muka kredit pembelian mobil ini.

Hasbie dan Willinoy memperkirakan rata-rata penurunan harga jual produk mobil MPV oleh Astra International sekitar 7-12%. "Kami menilai bahwa insentif pajak, optimisme terhadap pulihnya ekonomi, berlanjutnya distribusi vaksin Covid-19, dan momen Lebaran

diharapkan menjadi sentimen positif terhadap penjualan mobil tahun ini," jelas mereka.

Terkait realisasi penjualan mobil nasional sepanjang Januari 2021 yang mencapai 53 ribu unit, Hasbie dan Willinoy mengungkapkan bahwa itu terjadi penurunan sebesar 34% dari realisasi bulan yang sama tahun 2020 dan turun sekitar 7,4% dibandingkan Desember 2020. Adapun penjualan mobil oleh Astra International mencapai 26,8 ribu unit, sehingga pangsa pasar penjualan perseroan mencapai 50,7% pada Januari 2021 atau mendarat dari realisasi tahun 2020 seki-

tar 50,7%. Penurunan volume penjualan mobil domestik diperkirakan berlanjut hingga Februari, seiring dengan aksi tunggu konsumen atas penerapan insentif PpnBM mulai Maret 2021. Namun, penurunan penjualan Januari dan Februari tersebut diharapkan bisa terbantu dengan kebijakan PpnBM dan sejumlah sentimen positif lainnya.

Sebab itu, Trimegah Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli saham ASII dengan target harga Rp 7.500. Target harga tersebut juga mempertimbangkan peluang kinerja

keuangan perseroan yang lebih baik tahun ini dibandingkan realisasi tahun 2020.

Laba bersih Astra International diproyeksi meningkat menjadi Rp 18,74 triliun pada 2021 dibandingkan target 2020 yang senilai Rp 17,42 triliun. Pendapatan perseroan juga diharapkan meningkat dari target tahun lalu Rp 170,03 triliun menjadi Rp 209,33 triliun. □

Semester I, JV Mahaka Radio dan Empat Venture Capital Rampung

JAKARTA – Rencana PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) membentuk perusahaan patungan (*joint venture/JV*) bersama dengan empat *venture capital* (VC), antara lain Alpha JWC Ventures dan Kinesys Group, ditargetkan terealisasi pada semester I-2021. JV tersebut nantinya akan fokus pada pengembangan segmen konten radio digital Noice milik Mahaka Radio, perusahaan yang didirikan oleh Erick Thohir.

Chief Executive Officer (CEO) Mahaka Radio Integra Adrian Syarkawie mengatakan, selain dua JV tersebut, masih ada dua JV lainnya yang bakal masuk dengan opsi *convertible loan*. "Dua *venture capital* sudah masuk di *convertible loan*, tapi belum bisa diumumkan karena belum masuk ke pemegang saham. Kolaborasi digital ini mudah-mudahan selesai pada semester I. Kita kejar target, maunya kuartal I, tapi ada beberapa legal yang sedang kami urus," kata dia dalam paparan publik insidental Mahaka Radio Integra secara virtual, Selasa (16/3).

Mahaka Radio pada Noice akan berkurang menjadi sekitar 61%. Hingga saat ini, kepemilikan perusahaan yang menaungi Gen Fm, Jak Fm, Hot Fm, Kis Fm, Mustang Fm, Prambors, Delta FM, Female Radio, dan Most Radio ini masih sebesar 75%. Sisanya 25% milik Kinesys dan Alpha JWC.

Adrian menilai, bergabungnya beberapa VC besar ke dalam pengembangan Noice menjadi penyebab Bursa Efek Indonesia (BEI) mensuspensi atau menghentikan sementara perdagangan saham MARI di pasar reguler maupun pasar tunai pada 12 Maret 2021. Selama seminggu, harga MARI menguat 9,4%, sementara sebulan saham emiten yang dikuasai PT Beyond Media ini sudah melesat 124,56%. Ini adalah kali kedua MARI disuspensi dalam dua minggu terakhir. Sebelumnya, BEI mensuspensi MARI pada 26 Februari-1 Maret 2021.

Seperti diketahui, Kinesys cukup berpengalaman dalam memberikan pendanaan *startup* yang baru lahir sehingga menjadi besar. Sementara, Alpha JWC merupakan salah satu

investor Kopi Kenangan dan aplikasi Kredivo. Kabarnya, JWC Ventures siap menggelontorkan dana hingga US\$ 20 juta atau senilai Rp 282 miliar untuk mendanai segmen konten radio digital milik Mahaka Radio.

Terkait Noice, Adrian menuturkan, platform yang fokus pada podcast, radio, dan musik ini sebenarnya sudah diluncurkan pada 2018 dan akan diluncurkan ulang alias *re-launching*. *Pasalnya*, perseroan melihat perkembangan dan potensi yang besar untuk mendapuk pundi-pundi keuangan lebih besar dari Noice. Mulai tahun ini, perseroan menargetkan sebanyak 1,8 juta pengguna Noice. Jumlah ini melesat empat kali lipat dibanding pengguna Noice per Desember 2020 yang sebanyak 450 ribu pengguna. Dari target tersebut, satu juta di antaranya ditargetkan menjadi pengguna aktif. Selama ini, baru ada 170 ribu *active user* Noice.

"Noice akan di-*monetize* pada kuartal terakhir dari iklan dan *subscribers*. Potensi iklan sudah besar, tapi belum diakomodasi karena kami mau kuatkan teknologi dan kontennya dulu,"

pungkas dia.

Lebih lanjut, Adrian menyampaikannya, Mahaka Radio Integra tengah mengembangkan bisnis barunya yang akan lebih berfokus pada *business to consumer* (B2C). Saat ini, perseroan memiliki bisnis inti pada *business to business* (B2B). Inovasi B2C tersebut terdiri atas MARI Institute, Noice, konser virtual, *talent management*, ritel, dan visual.

Khusus pengembangan konser virtual, perseroan tengah menyiapkan perusahaan patungan yang mana secara legal akan ditekun dalam waktu dekat. "Modal dasarnya tidak besar karena fokusnya di konser digital. Tapi, ke depan valuasinya akan menarik. Dalam waktu dekat, kami akan lakukan konser internasional dan 90% sudah *deal* artisnya yang punya nama besar," katanya, seraya menambahkan bahwa *capex* perseroan tahun ini tidaklah besar karena dampak pandemi.

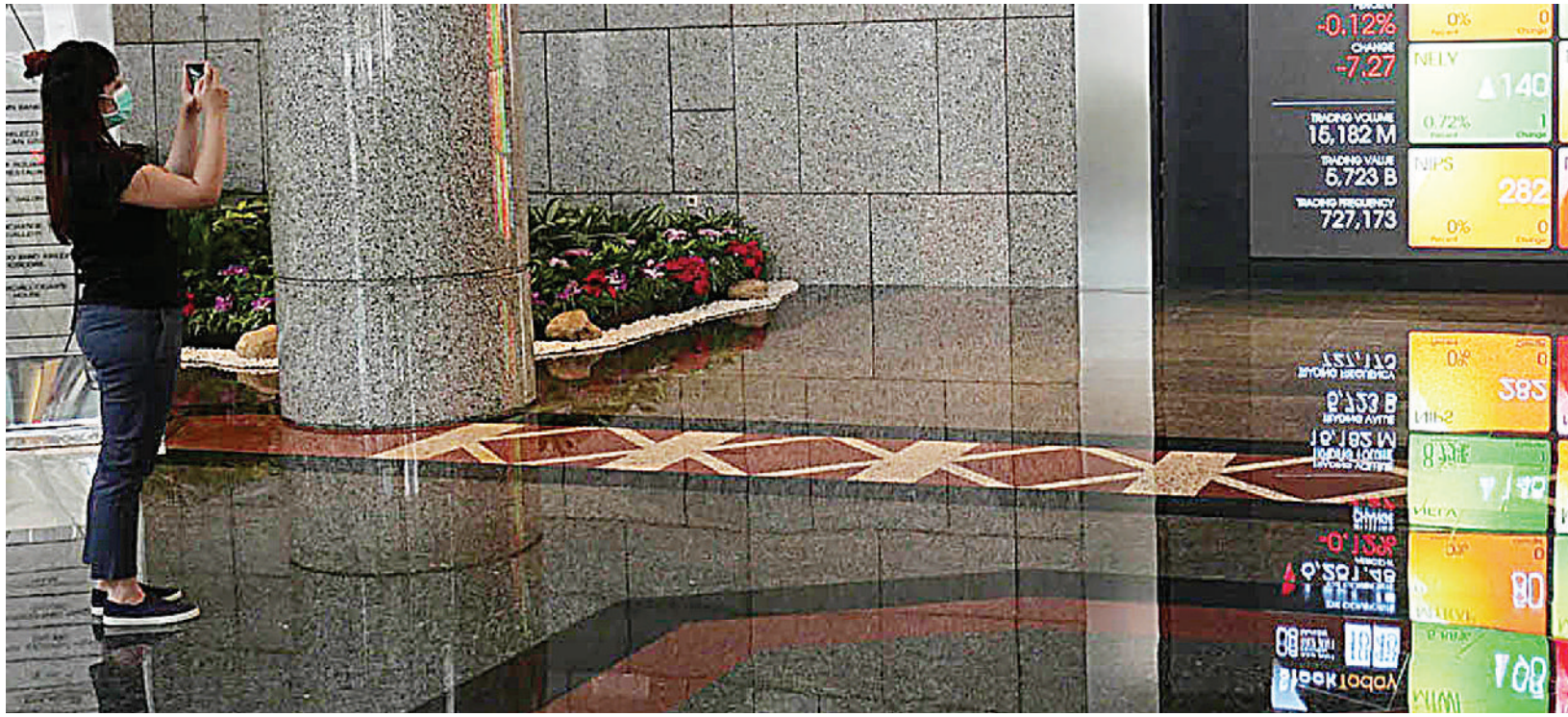
Dalam 5 tahun ke depan, B2C ditargetkannya bisa memberikan sumbangsih ke kinerja perseroan hingga 35%. Tahun ini, kontribusinya masih di bawah 10%. (Iov)



IHSG Ditutup Melemah

Investor melihat perkembangan harga saham di galeri sekuritas di Jakarta. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa (16/3/2021) ditutup turun 14,56 poin (0,23%) ke level 6.309,69. Level tertinggi indeks mencapai 6.355,41, sedangkan terendah 6.296,89.

BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal



Buyback Saham

Seorang investor melihat pergerakan saham di gedung BEI, Jakarta, belum lama ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingatkan seluruh perusahaan terbuka yang akan menjadi perusahaan tertutup diwajibkan melakukan pembelian kembali atau *buyback* saham publik. Peraturan itu terkandung di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Ketentuan wajib *buyback* saham oleh perusahaan terbuka yang menjadi perusahaan tertutup itu pun sudah berlaku sejak POJK dikeluarkan pada 22 Februari 2021. I

Pegadaian Emisi Surat Utang Rp 4,04 Triliun

Oleh Gita Rossiana

▶ JAKARTA – PT Pegadaian (Persero) berencana menerbitkan surat utang sebesar Rp 4,04 triliun dalam waktu dekat. Dana dari penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk mendukung ekspansi perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), surat utang ini terdiri atas Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV dengan nilai Rp 3,28 triliun. Selain itu, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV dengan nilai Rp 765 miliar.

Untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp 2,17 triliun, tingkat bunga 4,85% dan tenor 370 hari. Sementara Seri B memiliki nilai pokok Rp 1,1 triliun, tingkat bunga 6,2% dan tenor tiga tahun.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian

dengan target dana Rp 7,8 triliun. Pada 2020, perseroan sudah menerbitkan tahap I hingga tahap III dengan nilai total Rp 4,32 triliun.

Sedangkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV juga diterbitkan dengan nilai pokok Rp 599,2 miliar, bagi hasil floating dan tenor 370 hari. Lalu, Seri B diterbitkan dengan nilai pokok Rp 165,8 miliar, bagi hasil floating dan tenor tiga tahun.

Sukuk Mudharabah ini merupakan bagian dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dengan nilai total Rp 2,2 triliun. Pegadaian sudah menerbitkan tahap I hingga tahap III dari sukuk tersebut pada 2020 dengan total nilai Rp 1,43 triliun.

Sesuai rencana, masa penawaran umum penerbitan surat utang ini akan dilakukan pada 29-31 Maret 2021. Penjatahan dilakukan pada 1 April 2021 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 April 2021.

Bertindak sebagai penjamin emisi dalam penerbitan surat utang ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas.

Adapun pada 2020, Pegadaian mencatat peningkatan pendapatan usaha sebesar 24,27%, dari Rp 17,67 triliun pada 2019 menjadi Rp 21,96 triliun. Sedangkan dari sisi aset naik 9,4% dari Rp 65,32 triliun menjadi Rp 71,47 triliun.

Kemudian, Pegadaian berhasil mencatatkan laba Rp 2,02 triliun, dengan mencatatkan kenaikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dari Rp 154 miliar tahun 2019 menjadi Rp 2,12 triliun pada 2020.

Jumlah nasabah yang dilayani meningkat 22,15% dari 13,86 juta orang menjadi 16,93 juta orang. Adapun omset pembiayaan yang disalurkan meningkat 13,34% dari Rp 145,63 triliun menjadi Rp 165,06 triliun.

"Penambahan penempatan dana sebagai cadangan kerugian tersebut

merupakan bagian dari manajemen risiko. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian perusahaan di masa yang akan datang, sebagai akibat penurunan kualitas pembiayaan," tutur Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto.

Kuswiyoto menambahkan, pada 2020, Pegadaian telah meluncurkan berbagai produk dan layanan yang membantu masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di masa pandemi. Program yang dilaksanakan antara lain restrukturisasi dan relaksasi kredit, Gadai Peduli dengan bunga 0%, serta penyaluran subsidi bunga UMKM.

Pegadaian juga terus melakukan transformasi digital sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Sepanjang 2020, Aplikasi Pegadaian Digital telah digunakan oleh 2,1 juta nasabah dengan 3,4 juta transaksi senilai Rp 5,1 triliun.

"Kami tentu senang, transformasi digital yang dijalankan oleh Pegadaian dapat diterima dan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Selain memberikan kemudahan, akurasi, keamanan dan kecepatan transaksi, hal ini sejalan program pemerintah dalam membangun Industri 4.0," ujar Kuswiyoto.

Return Reksa Dana Saham Bisa di Atas 10%

JAKARTA – Tingkat pengembalian investasi (*return*) reksa dana saham tahun ini diperkirakan tetap akan berada di atas 10%, meski *return* pada Februari 2021 baru mencapai 3,9%.

Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan, pada Februari 2021 indeks harga saham gabungan (IHSG) meningkat 6,47% dibandingkan Januari 2021. Namun, *return* reksa dana saham baru mencapai 3,9%. Meski demikian, *return* reksa dana saham masih lebih baik dibandingkan jenis reksa dana lainnya.

Wawan menyebutkan, selain reksa dana saham, reksa dana campuran juga mencatatkan *return* yang positif, yakni 1,85%. Adapun *return* reksa dana pasar uang sebesar 0,29%, sedangkan reksa dana pendapatan tetap minus 1,08%.

"Penurunan *return* reksa dana pendapatan tetap karena kenaikan *yield* atau imbal hasil *US Treasury Bond*," jelas dia kepada *Investor Daily*, baru-baru ini.

Dengan melihat kinerja yang berangsur membaik, Wawan optimistis reksa dana saham bisa membukukan kinerja yang positif tahun ini. Hal ini berbanding terbalik dengan *return*

tahun lalu yang minus 6,93%. Keberhasilan vaksinasi Covid-19, menurut Wawan, menjadi faktor penentu pertumbuhan kinerja reksa dana saham tahun ini. Dengan keberhasilan vaksin itu, *return* reksa dana saham tahun ini bisa mencapai 10%.

Pertumbuhan reksa dana saham ini, kata Wawan, akan berlanjut hingga 2022. Kinerja emiten yang berangsur membaik menjadi hal yang akan mendukung kinerja pasar modal dan reksadana saham tahun depan.

Di lain pihak, Direktur PT Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan, tahun ini, IHSG berpeluang menyentuh level 6.700. Dengan perkiraan IHSG tersebut, *return* reksa dana saham bisa mencapai sekitar 12%.

Pergerakan *return* reksa dana ini, jauh berbeda dengan realisasi *return* reksa dana tahun lalu. Seiring dengan IHSG yang menurun 5,09% secara *year on year* (yoy) pada akhir 2020, *return* reksa dana saham minus 10,29%.

Reksa dana pendapatan tetap menjadi juara *return* reksa dana pada tahun lalu, yakni mencapai 9%. Sementara, untuk reksa dana pasar uang, Rudiyanto menyebutkan bahwa *return*-nya

mencapai 4,61% dan reksa dana campuran minus 0,36%.

Secara terpisah, mantan direktur PT Avrist Asset Management Agra Pramudita juga melihat peluang *return* reksa dana saham pada kisaran 10-12% tahun ini. Peningkatan *return* ini seiring dengan ekspektasi pasar atas valuasi IHSG.

Return reksa dana pendapatan tetap juga berpeluang menguat ke level 5,5-6%. Penguatan ini dengan melihat *yield* obligasi negara tenor 10 tahun yang bisa mencapai 5,9-6,1%.

Sementara, untuk reksa dana campuran, peluang *return*-nya bisa berkisar 8-10%. Sedangkan reksa dana pasar uang sebesar 4-4,5% dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga deposito saat ini.

Dana Kelolaan
Hingga Februari 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, dana kelolaan (*asset under management/AUM*) industri reksa dana hingga Februari 2021 mencapai Rp 571,74 triliun. Nilai itu meningkat 8,84% dibandingkan Februari 2020 yang mencapai Rp 525,27 triliun.

Meski meningkat dibandingkan Februari 2020, namun dana kelolaan industri reksa dana ini menurun 0,08% dibandingkan Januari 2021. Pada awal 2021, industri reksa dana sempat membukukan AUM sebesar Rp 572,2 triliun.

Apabila dilihat dari jenisnya, reksa dana terproteksi masih mendominasi dana kelolaan industri reksa dana sebesar Rp 143,01 triliun. Namun, dominasi ini menurun 0,8% dibandingkan Januari 2021 yang mencapai Rp 144,2 triliun.

Selain reksa dana terproteksi, reksa dana pasar uang juga tercatat mengalami penurunan 7,56% pada Februari 2021, yakni menjadi Rp 93,82 triliun. Padahal, pada Januari 2021, reksa dana pasar uang sempat menguat ke angka Rp 101,5 triliun. Kendati demikian, untuk jenis reksa dana lainnya tetap mencatat peningkatan. Reksa dana pendapatan tetap meningkat 2,02% menjadi Rp 140,39 triliun dari Rp 137,6 triliun pada Januari 2021. Begitu juga dengan reksa dana saham yang melesat 2,55% dari Rp 123,79 triliun pada Januari 2021 menjadi Rp 126,95 triliun pada Februari 2021. (git)

Tambah Armada, Transkon Siapkan Dana Rp 100 Miliar

JAKARTA – PT Transkon Jaya Tbk (TRJA) mengalokasikan belanja modal (*capital expenditure/capex*) sebesar Rp 100 miliar tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk pembelian kendaraan baru.

Sekretaris Perusahaan Transkon Jaya Rex Alexander Joseph Syaute mengatakan, perseroan mengalokasikan belanja modal untuk pembelian produk baru yang akan disewakan, yakni *light truck* dan *light bus*.

"Selain itu, belanja modal akan dialokasikan untuk pembelian *sparepart* dan aksesoris pelengkap kendaraan yang sesuai dengan jenis produk dan standar lokasi pertambangan," jelas dia dalam keterangan resmi.

Hingga kini, perseroan sudah memiliki sekitar 2.000 unit kendaraan. Perseroan juga memiliki kebijakan penambahan sekitar 40 unit kendaraan setiap bulan untuk mengganti kendaraan lama yang sudah tidak layak pakai.

Melalui penambahan kendaraan ini,

perseroan bisa menambah pelanggan baru. "Perusahaan juga tengah melakukan kerjasama dengan pelanggan baru untuk proyek yang beroperasi di Pulau Halmahera, Maluku Utara, pada awal Februari 2021," kata dia.

Perusahaan juga terus memantau potensi peningkatan permintaan kendaraan sewa serta melanjutkan ekspansi pada 2021, baik secara geografis, industri, maupun tipe kendaraan.

Dari sisi kinerja keuangan, Transkon Jaya optimistis membukukan peningkatan laba hingga 20% tahun ini. Guna mencapai angka tersebut, perseroan menyiapkan beberapa strategi mulai dari peningkatan penetrasi pasar *Internet Service Provider* (ISP) hingga penambahan klien baru.

Presiden Direktur Transkon Jaya Lexy Roland Rompas menjelaskan, untuk lini bisnis ISP, perseroan berencana untuk memperluas eksposur pemasaran dengan berfokus pada tender pengadaan layanan internet

yang berlokasi di wilayah Sulawesi Selatan. Di sisi lain, perseroan berharap segmen ini dapat terus bertumbuh.

"Kami melihat peluang pertumbuhan pada segmen ini masih besar, karena saat ini pendapatan dari rental masih menjadi penyumbang terbesar hingga 95%," jelas Roland.

Sedangkan dari segmen sewa kendaraan, perseroan berupaya melakukan negosiasi dengan beberapa supplier untuk mendapatkan diskon pengadaan barang maupun jasa. Perseroan juga telah mengunjungi salah satu calon klien yang diharapkan menjadi pelanggan terbaru perseroan di awal 2021 mendatang.

Optimisme ini sejalan dengan peolehan kinerja hingga kuartal III-2020 dengan raih laba sebesar Rp 34,38 miliar. Angka ini bertumbuh 9,56% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp 31,09 miliar. "Pertumbuhan ini didorong beberapa proyek baru yang diterima perseroan pada semester I-2020 dan mulai

berkontribusi pada pendapatan pada kuartal ini," lanjut Alexander.

Adapun pada kuartal III-2020, pendapatan perseroan mencapai Rp 306,67 miliar, meningkat 1,62% dari periode sebelumnya yang mencapai Rp 301,77 miliar. Segmen sewa kendaraan dan ISP menjadi kontributor terbesar dari perolehan pendapatan itu, yakni masing-masing mencapai Rp 297,32 miliar dan Rp 9,35 miliar.

Belum lama ini, Transkon Jaya mendapatkan penurunan suku bunga sebanyak 1%. Diskon suku bunga ini berlaku bagi semua produk Mitsubishi yang dibiayai oleh Dipo Star Finance sebagai kreditur terbesar perseroan.

Alexander mengatakan, pemberian diskon ini berdampak sangat besar bagi kinerja keuangan perseroan. Pasalnya, suku bunga merupakan salah satu faktor penentu tingkat cicilan yang menjadi salah satu faktor untuk menentukan harga sewa kendaraan. (git)

SAP Express Perkuat Infrastruktur

JAKARTA – PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) atau SAP Express menganggarkan belanja modal (*capital expenditure/capex*) sebesar Rp 50-60 miliar. Dana tersebut bersumber dari kas internal. Jika masih kurang, perseroan akan mencari alternatif lainnya seperti pinjaman dan sebagainya.

Sekretaris Perusahaan Satria Antaran Prima Denny Parhan menjelaskan, dana *capex* akan dimanfaatkan untuk menambah jaringan infrastruktur (jaringan kantor cabang dan sub-cabang). "Tahun ini, perseroan akan menambah gudang untuk usaha *fulfillment*, menambah armada kendaraan, dan jumlah kurir untuk mendukung kegiatan operasional," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/3).

Untuk ekspansi jaringan, perseroan akan menambah beberapa kantor cabang, terutama di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan sejumlah daerah lain yang potensial. Target perseroan untuk Pulau Jawa adalah memiliki cabang atau sub-cabang di setiap kabupaten karena volume kiriman memang paling banyak ada di Jawa. Sementara, untuk daerah-daerah lain akan mengikuti secara bertahap sesuai perkembangan industri dan usaha perseroan.

Tahun 2021, Denny mengatakan, perseroan akan tetap fokus pada inti bisnis yaitu layanan *last mile* dengan pengembangan pengembangan derivatif dari bisnis ini seperti layanan *warehouse* atau *fulfillment*, *bulky shipment*, ritel bisnis dan sebagainya.

Secara segmentasi, perseroan mencoba untuk mengembangkan lini usaha *retail* dengan penetrasi yang lebih dalam pada segmen *e-commerce* dan *social commerce* tahun ini. Selain tetap mengembangkan segmen tradisional perseroan, yaitu korporasi.

"Selain itu, perseroan membidik segmen *marketplace* karena seg-



Denny Parhan

men ini cukup menjanjikan dari sisi volume yang diharapkan dapat meleverage pertumbuhan pendapatan perseroan," tambah dia.

Hingga kuartal III-2020, emiten jasa pengiriman ini mencatat pendapatan sebesar Rp 329,92 miliar, naik dari raihannya periode sama tahun 2019 sebanyak Rp 274,91 miliar. Laba bersih bertumbuh menjadi Rp 25,58 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp 18,17 miliar.

"Hal ini sebenarnya tidak mengejutkan karena saat pandemi banyak toko atau tempat tempat belanja konvensional yang tutup atau beroperasi secara terbatas, hal ini mengakibatkan orang-orang mengubah pola belanjanya menjadi belanja via *online* atau *e-commerce*," pungkasnya.

Terkait bisnis *online* di Indonesia, dia mengatakan, potensinya tetap besar ke depan. Pasalnya, usaha kurir adalah derivatif dari usaha *online*, karena usaha *online* memerlukan jasa kurir untuk mengirim barang kepada konsumen. Jadi, usaha kurir akan secara langsung terdampak positif dari berkembangnya usaha *online*. (tov)

XL Tambah Modal Princeton Digital Group Data Centers

JAKARTA – PT XL Axiata Tbk (EXCL) telah meningkatkan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor pada Princeton Digital Group Data Centers (PDGDC) menjadi Rp 618,87 miliar dari Rp 589,2 miliar.

Sekretaris Perusahaan XL Axiata Ranty Astari Rachman mengungkapkan, penambahan modal tersebut dilakukan pada 9 Maret 2021. Aksi tersebut merupakan hasil pemasukan modal saham dalam bentuk *inbreng* bangunan di Bandung, yaitu bangunan pusat data Bandung milik perseroan dan merupakan penyerahan modal tunai serta setoran tunai.

"Dengan adanya transaksi tersebut, kini komposisi kepemilikan saham perseroan pada PDGDC bertambah menjadi 2.064.349 saham senilai Rp 206,43 miliar atau setara 33,36%. Sisanya sebanyak 4.124.425 saham senilai Rp 412,44 miliar atau setara dengan 66,64% dimiliki Princeton Digital Group (PDG)," jelas dia dalam keterangan tertulis.

Ranty menambahkan, aksi korporasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pemasukan modal yang dilakukan oleh perseroan yang merupakan satu kesatuan rangkaian transaksi sejenis sebelumnya dengan PDGDC dan PDG yang telah dilakukan secara bertahap sejak 2019.

Tahun ini, perseroan mengalokasikan belanja modal atau *capital expenditure* (*capex*) sekitar Rp 7 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari anggaran *capex* tahun 2020 yang sebesar Rp 7,5 triliun. Dari *capex* Rp 7 triliun tersebut, sebesar 70% akan digunakan untuk mendukung pengembangan jaringan bisnis layanan data. Sisanya akan dimanfaatkan untuk pengembangan IT dan digitalisasi.

Direktur Teknologi XL Axiata I

Gede Darmayusa mengatakan, perseroan masih akan terus melakukan pengembangan infrastruktur jaringan, terutama di luar Pulau Jawa termasuk di kawasan timur Indonesia. "Sekitar 2-3 tahun lalu sudah komitmen bangun luar Jawa. *Capex* 2021 dialokasikan untuk luar Pulau Jawa 55% dan 45% untuk Pulau Jawa. *Capex* bukan hanya untuk radio, tapi juga *transport* karena trafik di luar Pulau Jawa tinggi," katanya, belum lama ini.

Di samping itu, untuk menyiapkan jaringan menuju 5G, XL Axiata juga terus melanjutkan pengembangan jaringan. Fiberisasi dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas jaringan data di setiap area karena salah satu manfaat dari proses ini adalah kapasitas jaringan *transport* menjadi lebih besar. "Tahun lalu 10.500 *site* dan targetnya tahun ini tambah 9.000. Jadi, total 19.000 *site* akan terfiberisasi pada 2021," ujar Gede.

Sementara itu, XL Axiata menyatakan bahwa perseroan terus membuka peluang konsolidasi dengan operator telekomunikasi seluler yang lain. Konsolidasi tersebut, semisal melalui penggabungan usaha (*merger*), dapat membuat persaingan di industri telekomunikasi Indonesia menjadi lebih sehat.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini menilai, saat ini jumlah operator seluler yang beroperasi dinilai terlalu banyak. Hal itu menimbulkan persaingan yang menjurus ke perang harga. "Konsolidasi itu baik untuk industri, karena industri telko Indonesia saat ini masih terdapat kelebihan jumlah pemain yang membuat persaingan luar biasa, kadang-kadang mendekati brutal, persaingan terlalu cepat. Kalau ada konsolidasi itu positif buat industri," kata dia. (bil)



IPO Perusahaan Teknologi

Investor melihat pergerakan saham melalui tablet, baru-baru ini. Analis menilai jika unicorn Indonesia menawarkan saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal berdampak positif untuk pasar saham Indonesia. Hal ini akan menarik investor generasi muda. Akan tetapi, pendanaan akan relatif terbatas. Meski demikian, IPO perusahaan teknologi dapat menarik dana investor asing untuk masuk ke pasar saham Indonesia.

18 FINANCIAL DATA



Stock Widget Pilihan Tepat Emiten Indonesia.

Gunakan Stock Widget untuk Menampilkan Informasi Harga Saham Perusahaan Anda di Website.

Desain Menarik, Warna Sesuai Identitas Perusahaan dan Bebas Memilih Informasi yang Ingin Ditampilkan.

Informasi lebih lanjut hubungi (021) 5151669 atau email: sales@limas.com



PERDAGANGAN SAHAM BURSA EFEK INDONESIA

16 MARET 2021

KODE	NAMA SAHAM	HARGA SAHAM (Rp)		▲/▼ (Rp)	VOL	NILAI (Rp)	KAPITALISASI PASAR
		SBL	PNT				
BBCA	Bank Central Asia Tbk.	33.325	33.125	-200	14.151.100	469.405.972.500	808.530.234.187.500
BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	4.570	4.720	150	137.296.600	646.036.199.000	576.370.300.968.000
TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	3.380	3.360	-20	60.111.200	203.197.837.000	332.849.047.776.000
BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	6.650	6.550	-100	56.124.200	369.452.127.500	302.609.999.986.900
UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	6.575	6.550	-25	12.107.300	79.223.305.000	249.882.500.000.000
ASII	Astra International Tbk.	5.525	5.550	25	64.804.400	364.239.565.000	224.683.719.927.000
TPJA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	10.525	10.650	125	3.093.900	32.802.202.500	189.926.990.769.000
HMSF	H.M. Sampoerna Tbk.	1.435	1.410	-25	19.098.400	27.141.116.500	164.008.488.429.000
EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk.	2.260	2.260	0	69.609.700	161.623.842.000	127.553.435.929.200
ARTO	Bank Jago Tbk.	10.850	10.100	-750	9.543.100	97.296.170.000	115.979.223.907.600
BNNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	6.325	6.225	-100	28.069.700	176.709.767.500	114.927.007.583.925
CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	6.650	6.700	50	5.323.300	35.555.355.000	109.866.600.000.000
BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.	2.600	2.680	80	62.132.700	167.131.325.000	108.861.133.604.960
ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	8.500	8.600	100	4.733.700	40.606.202.500	100.292.400.800.000
BRPT	Barito Pacific Tbk.	1.025	1.030	5	21.303.400	22.017.006.000	96.190.493.034.670
SMMA	Sinarmas Multiarta Tbk.	13.500	13.500	0	9.500	127.082.500	85.963.473.679.500
UNTR	United Tractors Tbk.	21.100	21.175	75	3.041.300	64.356.457.500	78.985.611.504.800
KLBF	Kalbe Farma Tbk.	1.585	1.585	0	22.390.500	35.475.246.000	74.297.068.544.350
GGRM	Gudang Garam Tbk.	36.200	36.675	475	2.051.600	75.113.725.000	70.565.927.400.000
INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	13.200	12.625	-575	7.656.500	97.066.537.500	69.071.159.630.125
MEGA	Bank Mega Tbk.	9.900	9.750	-150	46.700	452.890.000	67.217.847.713.250
SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	11.125	11.125	0	3.858.300	42.940.922.500	65.988.160.000.000
BNLI	Bank Permata Tbk.	2.290	2.280	-10	205.300	468.816.000	63.298.070.933.640
MYOR	Mayora Indah Tbk.	2.760	2.770	10	7.085.100	19.511.115.000	61.933.598.238.250
TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk.	1.195	1.155	-40	72.425.800	83.722.845.500	58.921.891.875.000
INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	6.400	6.400	0	4.449.100	28.513.742.500	56.194.729.600.000
MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.	2.470	2.420	-50	54.001.900	128.512.168.000	55.429.738.972.300
ANTM	Aneka Tambang Tbk.	2.340	2.270	-70	231.241.100	538.116.329.000	54.549.835.925.750
POLL	Pollux Properti Indonesia Tbk.	5.700	5.875	175	2.492.200	14.425.512.500	48.873.088.650.000
TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk.	2.110	2.090	-20	29.108.200	60.426.962.000	47.353.128.840.050
INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	12.625	12.650	25	7.328.700	92.614.657.500	46.567.580.992.350
DNET	Indoritel Makmur Internasional Tbk.	3.250	3.260	10	13.700	44.049.000	46.239.840.000.000
TCPI	Transcoal Pacific Tbk.	9.125	9.200	75	16.912.900	156.066.095.000	46.000.000.000.000
INCO	Vale Indonesia Tbk.	4.710	4.560	-150	47.029.800	216.022.071.000	45.309.704.563.200
BYAN	Bayan Resources Tbk.	13.000	13.000	0	100	1.300.000	43.333.335.500.000
AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	980	1.015	35	56.781.400	60.132.350.500	42.147.369.225.500
MIKA	Mitra Keluarga Karyasahab Tbk.	2.850	2.950	100	34.904.400	102.628.949.000	42.026.731.025.000
TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	13.175	12.750	-425	5.635.800	72.480.605.000	39.693.605.517.500
ADRO	Adaro Energy Tbk.	1.235	1.220	-15	99.266.400	121.149.223.500	39.022.873.640.000
MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk.	5.525	5.150	-375	108.700	559.805.000	34.835.045.953.950
PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	1.410	1.390	-20	41.625.200	58.238.732.500	33.695.696.392.440
ISAT	Indosat Tbk.	5.625	6.175	550	44.058.500	277.068.590.000	33.554.539.362.500
JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	4.310	4.360	50	3.509.400	15.221.760.000	31.644.318.432.000
BNBI	Bank Maybank Indonesia Tbk.	4.240	4.18	-60	31.055.100	13.036.924.400	31.499.407.374.798
PTBA	Bukit Asam Tbk.	2.740	2.710	-30	20.082.000	54.626.838.000	31.220.986.567.500
BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.	3.130	3.100	-30	1.350.900	4.210.031.000	29.995.033.757.100
DCII	DCI Indonesia Tbk.	12.225	12.225	0	0	0	29.141.293.627.500
BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk.	3.740	3.780	40	2.511.000	9.452.607.000	28.828.786.140.000
PWON	Pakuwon Jati Tbk.	595	590	-5	59.656.700	35.297.052.500	28.414.165.416.000
AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agri Niaga Tbk.	1.275	1.335	60	313.001.600	415.137.963.500	28.208.359.532.880
BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.	1.150	1.130	-20	12.017.300	13.684.925.500	28.114.728.575.750
SCMA	Surya Citra Media Tbk.	1.750	1.880	130	13.173.700	23.999.242.000	27.784.691.645.880
BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	1.270	1.280	10	32.734.300	41.675.797.000	27.099.348.239.360
ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	1.615	1.575	-40	14.258.600	22.637.258.000	27.011.250.000.000
PNNB	Bank Pan Indonesia Tbk.	1.135	1.120	-15	2.390.100	2.668.706.000	26.698.163.517.760
MKPL	Metropolitan Kentjana Tbk.	27.250	27.250	0	0	0	25.838.286.500.000
EXCL	XL Axiata Tbk.	2.150	2.220	70	91.487.900	206.010.883.000	23.808.778.002.720
BTPN	Bank BTPN Tbk.	2.900	2.910	10	49.400	143.143.000	23.472.218.481.510
SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.	785	780	-5	9.572.000	7.482.775.500	23.400.000.000.000
FREN	Smartfren Telecom Tbk.	91	87	-4	1.975.052.300	173.863.097.500	22.903.841.067.870
JJFA	Jajfa Comfeed Indonesia Tbk.	1.855	1.895	40	16.412.000	30.708.314.500	22.221.860.005.895
CTRA	Ciputra Development Tbk.	1.190	1.190	0	15.951.700	18.950.592.000	22.086.761.042.430
AAAI	Astra Agro Lestari Tbk.	11.375	11.200	-175	1.297.100	14.636.292.500	21.556.509.329.600
CASA	Capital Financial Indonesia Tbk.	408	388	-20	60.800	23.628.400	21.136.786.394.084
NISP	Bank OCBC NISP Tbk.	900	915	15	1.552.300	1.437.302.500	20.784.935.069.280
BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	1.970	1.965	-5	39.925.100	78.969.597.500	20.601.256.500.000
MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.	9.150	9.175	25	8.000	74.132.500	19.331.725.000.000
WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	1.435	1.415	-20	48.156.000	68.966.138.500	19.207.140.665.000
UJJI	Fajar Surya Wisesa Tbk.	7.600	7.600	0	0	0	18.831.954.781.200
FAST	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk.	1.525	1.530	5	878.200	1.341.756.000	17.667.897.840.000
KAFF	Kimia Farma Tbk.	3.200	3.110	-90	3.195.700	10.023.467.000	17.272.939.996.870
BBKP	Bank KB Bukopin Tbk.	535	525	-10	151.993.900	81.440.550.500	17.067.815.347.275
MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.	650	650	0	17.012.800	11.053.359.500	16.338.550.313.800
MNVC	Media Nusantara Citra Tbk.	1.065	1.060	-5	12.751.400	13.522.495.000	15.952.774.972.600
BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	1.570	1.605	35	19.455.700	31.108.375.500	15.406.921.847.670
WKAJ	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1.675	1.675	0	26.519.800	44.637.919.000	15.024.668.548.100
SMRA	Summarecon Agung Tbk.	1.045	1.040	-5	17.717.800	18.375.508.000	15.003.852.947.200
GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2.550	2.550	0	0	0	15.000.000.150.000
LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	208	208	0	32.599.900	6.756.075.600	14.746.787.820.752
SRGT	Saratoga Investama Sedaya Tbk.	5.400	5.375	-25	3.112.800	16.371.990.000	14.582.197.625.000
AKRA	AKR Corporindo Tbk.	3.590	3.490	-100	13.382.200	47.417.134.000	14.011.285.270.800
HRUM	Harum Energy Tbk.	5.200	5.125	-75	3.680.500	18.801.987.500	13.856.052.500.000
SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk.	1.815	1.760	-55	248.500	445.875.500	13.486.704.000.000
ITMG	Indo Tambora Megah Tbk.	11.825	11.875	50	1.887.100	22.420.027.500	13.417.859.375.000
MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk.	815	805	-10	18.709.200	15.156.053.000	13.363.000.000.000
BANK	Bank Net Indonesia Syariah Tbk.	2.650	2.650	0	0	0	13.250.000.000.000
TINS	Timah Tbk.	1.900	1.770	-130	209.995.500	380.496.055.500	132.182.523.613.580
BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	840	880	40	103.540.800	89.276.521.000	13.081.501.928.880
HEAL	Medikaloka Hermina Tbk.	4.100	4.270	170	511.100	2.158.699.000	12.716.060.000.000
KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk.	680	650	-30	50.539.900	33.392.366.000	12.575.157.985.000
MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk.	1.360	1.360	0	0	0	12.488.807.845.200
BFIN	BFI Finance Indonesia Tbk.	785	770	-15	107.837.800	85.053.107.000	12.294.679.027.400
IBST	Inti Bangun Sejahtera Tbk.	9.000	9.000	0	0	0	12.158.144.343.000
GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.	1.645	1.645	0	989.800	1.630.391.000	12.139.409.578.695
DMAS	Puradelta Lestari Tbk.	242	248	6	163.794.400	40.660.191.000	11.953.131.552.800
CARE	Metro Healthcare Indonesia Tbk.	356	356	0	119.728.100	42.753.885.400	11.837.000.000.000
BSIM	Bank Sinar Mas Tbk.	675	675	0	2.089.600	1.435.541.500	11.664.473.076.450
RMBA	Bentoel Internasional Investama Tbk.	318	318	0	12.500	3.955.200	11.575.561.327.500
CITA	Cita Mineral Investindo Tbk.	2.860	2.900	40	15.000	43.449.000	11.485.047.625.000
IPTV	MNC Vision Networks Tbk.	274	274	0	11.416.900	3.100.014.800	11.374.848.806.486
POWR	Cikarang Litrindo Tbk.	710	705	-5	4.212.200	2.978.748.000	11.341.444.980.000
SMAR	Smart Tbk.	3.890	3.900	10	3.200	12.269.000	11.201.554.127.400
TRIO	Trikomsel Oke Tbk.	426	426	0	0	0	11.079.192.718.770
STTP	Siantar Top Tbk.	7.575	8.400	825			



Cedera Kepala Rui Patricio

Penjaga gawang Wolverhampton Wanderers (Wolves) asal Portugal Rui Patricio (kanan) terkapar di lapangan karena cedera saat pertandingan sepak bola Liga Primer Inggris antara Wolves dan Liverpool di stadion Molineux di Wolverhampton, Inggris, Senin (15/3/2021) malam waktu setempat. Insiden mengerikan dialami kiper Wolves Rui Patricio saat melawan Liverpool. Dia tak sadarkan diri usai berbenturan dengan rekan satu timnya Conor Coady.

Stephanie Poetri Luncurkan Mini Album

JAKARTA - Penyanyi pop Indonesia-Amerika Serikat yang sedang naik daun, Stephanie Poetri meluncurkan mini album pertamanya dengan judul *AM:PM*.

Mini album tersebut berisi kumpulan dari khayalan yang menghibur, renungan sore hari, dan berbagai pertanyaan yang sering muncul pada malam hari.

"Saya ingin mengajak para pendengar hanyut semakin jauh ke dalam pikirannya. Lag-lagu saya menggambarkannya dua hal antara harapan, energi, dan emosi yang sering muncul pada pagi hari, dengan perbedaan suasana malam hari yang terkadang menjadi lebih melankolis," kata Stephanie.

AM:PM memuat beberapa *single hit*, seperti *IRL*, *Selfish*, dan *How We Used To* dan juga lagu baru lainnya, yaitu *Paranoia*, *Daydreaming*, dan *3PM*. Dalam album yang diproduksi sendiri, *AM:PM* juga merupakan hasil kolaborasi produksi dari Ojivolta (Selena Gomez, Shawn Mendes, Halsey), Doc Daniel (Pink Sweat\$, Tate McRae, Kaash Paige), Wes Singerman (Kendrick Lamar, Olivia O'Brian), Heavy Mellow (Halsey, Jhene Aiko, Kid Cudi), dan Taylor Dexter (Olivia O' Brian).

Stephanie mengatakan, *AM:PM* mengikuti alur waktu dari pagi ke malam hari, dan seperti itulah dia menyusun daftar lagunya.

"Dalam daftar lagu yang ada di daftar *AM:PM*, isinya cenderung lebih ringan, *upbeat*, dan gembira. Sementara di daftar *AM:PM*, lagunya lebih gelap dengan sedikit kemarahan dan sisi dramatis. Aku selalu ingin menjadikan musikku sebagai teman bagi banyak orang dalam menjalani rutinitas sehari-harinya. Dan, aku berharap, mereka dapat menemukan apa yang mereka cari selama ini melalui album ini," papar dia.

Selain *AM:PM*, Stephanie juga telah merilis video klip untuk lagu *Paranoia*. Video ini dibuat dengan menampilkan sisi diri Stephanie yang sebenarnya, yaitu saat dia melupakan emosi serta ketakutan terdalamnya ke dalam video tersebut. Suara mengerikan yang muncul dari detak jam pada bagian awal lagu, seakan-akan mewakili bagaimana perasaan hidup seseorang dalam pikirannya.

"*Single* ini berkisah tentang momen bahagia. Ketika semua berjalan dengan baik. Bahkan hampir sempurna, lalu kamu memikirkan bahwa sebentar lagi akan terjadi hal yang buruk karena semuanya berjalan dengan baik," jelas Stephanie.

Melalui *AM:PM*, Stephanie memanfaatkan bakat menulis lagu serta pengalaman hidup untuk mengokohkan karirnya sebagai salah satu artis terbaik saat ini. Lagu dari album *AM:PM* yang sudah dirilis, *IRL*, *Selfish* dan *How We Used To*, telah menerima pujian dari banyak pihak, seperti Billboard, Cosmopolitan, Teen Vogue, dan Hollywood Life. (i/n)



Stephanie Poetri

Pemerintah Jepang Ingin Batasi Delegasi Asing di Olimpiade Tokyo

Oleh F Rio Winto

► JAKARTA - Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk membatasi jumlah delegasi yang akan mendampingi para menteri, dan pemimpin asing dalam Olimpiade Tokyo. Hal itu dilakukan sebagai upaya meminimalisir penularan Covid-19.

Seperti dilansir *Beritasatu.com*, Olimpiade Tokyo yang tertunda satu tahun akibat pandemi Covid-19 dijadwalkan ulang menjadi 23 Juli-8 Agustus 2021. Menurut laporan kantor berita *Kyodo* seperti dikutip *Reuters*, baru-baru ini, jumlah staf pendamping akan dibatasi maksimal 11 orang per kepala negara. Sedangkan, delegasi tingkat kabinet dibatasi paling banyak lima orang.

Para tamu VIP juga akan diminta menjalani tes Covid-19 dalam kurun waktu 72 jam sebelum terbang ke Jepang dan akan dites ulang pada saat kedatangan.

Sebelumnya, *Harian Sankei* melaporkan, Pemerintah Jepang juga sedang mempertimbangkan membatasi jumlah penonton Olimpiade Tokyo hingga 50% dari kapasitas stadion karena kekhawatiran risiko yang ditimbulkan akibat penularan Covid-19.

Meski jumlah kasus akibat virus corona di Jepang relatif lebih rendah ketimbang negara lain seperti Amerika Serikat, beberapa wilayah termasuk Tokyo masih menetapkan status darurat Covid-19 sehubungan dengan munculnya gelombang ketiga pandemi di negara tersebut.

Menurut berbagai laporan, Jepang te-

lah memutuskan menggelar Olimpiade Tokyo tanpa penonton dari luar negeri. Namun, Presiden Komite Penyelenggara Tokyo 2020, Seiko Hashimoto mengatakan belum ada keputusan yang akan ditetapkan akhir Maret nanti.

"Panitia telah berulang kali berbicara tentang tekad mereka menggelar Olimpiade tahun ini dengan segala cara, walaupun dukungan publik rendah," kata Seiko Hashimoto.

Estafet Obor

Sementara itu, estafet obor Olimpiade Tokyo akan dimulai sesuai jadwal dari Fukushima, pada 25 Maret mendatang. Panitia penyelenggara Tokyo 2020 akan mengadakan *grand start* estafet obor di J-Village National Training Center di Fukushima, yang dilanda gempa bumi pada 2011.

Penyelenggara mengatakan, jumlah peserta yang bepergian dari Tokyo ke situs tersebut secara substansial dibatasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Awal acara telah disederhanakan dan jumlah penampil pada upacara telah dikurangi.

Estafet obor akan melintasi Jepang selama 121 hari sebelum mencapai upacara pembukaan Olimpiade pada 23 Juli.

Upacara ini akan diawali dengan penampilan dari sekelompok penduduk dari Fukushima, diikuti dengan nyanyian paduan suara anak-anak selama upacara dan sorakan pada pembawa obor saat *grand start* dimulai.

Upacara *grand start* dan bagian pertama estafet obor Fukushima pada hari pertama, dari area pelatihan semua cuaca J Village ke Stasiun J Village, tidak akan dibuka untuk umum. Penyelenggara akan menyiarkan secara langsung acara tersebut melalui saluran resmi Tokyo 2020.

Mereka juga berjanji untuk memastikan keselamatan dan keamanan estafet obor Olimpiade Tokyo 2020 dengan mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah penyebaran infeksi di antara penonton, pembawa obor, staf, dan peserta estafet lainnya, serta penduduk setempat. (b1)

PON Harus Memberikan Manfaat untuk Masyarakat Papua

JAKARTA - Ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 dipastikan digelar pada 2-15 Oktober mendatang. Perhelatan olahraga terbesar Indonesia itu diminta harus memberikan manfaat maksimal, khususnya bagi masyarakat Papua.

Staf Khusus Presiden, Billy Mambasar mengaku sebagai orang asli Papua turut bangga dan antusias bakal digelar PON 2021 di tanah kelahirannya.

"Dalam Ratas terkait PON kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) komitmen melanjutkan perhelatan ini. Dia ingin PON XX mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tentunya ini merupakan berita baik bagi kita, masyarakat Papua harus disambut," ujar Billy dalam keterangannya kepada *Beritasatu.com*, Selasa (16/3).

Dia pun memberikan empat usulan untuk memaksimalkan manfaat dari PON untuk Papua, khususnya untuk masyarakat asli Papua. Pertama, menggunakan atlet senior maupun junior sebagai duta atlet untuk mempromosikan PON XX 2021.

"Duta atlet Papua yang terpilih tentu saja adalah atlet berbakat dan telah diseleksi yang nantinya akan dimasukkan kedalam basis data yang telah terintegrasi," ucap Billy.

Dia mengatakan, banyak atlet senior yang sangat membanggakan Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Melalui PON XX 2021 ini, atlet senior secara simbolik akan meneruskan semangatnya kepada atlet junior, agar kejayaan prestasi mereka dapat diteruskan.

"Usulan kedua yaitu melibatkan wirausaha muda Papua yang memiliki produk atau jasa yang relevan dengan perayaan PON 2021, didorong untuk menjadi penyuplai, sehingga bisnis berkembang dan secara umum akan menyerap tenaga kerja baru," ucap Billy.

Luka Terbuka Berisiko Terkontaminasi Bakteri

JAKARTA - Dokter spesialis anak, dr Mesty Ariotedjo SpA mengatakan luka yang dibiarkan terbuka berisiko terkontaminasi bakteri dan kotoran.

"Masih banyak beredar mitos keliru. Misalnya, mitos luka yang dibiarkan terbuka dan kering akan cepat sembuh. Padahal, luka yang dibiarkan terbuka seringkali dapat memperbesar risiko terkontaminasi bakteri dan kotoran yang dapat menyebabkan infeksi. Karena itu, penting sekali untuk menjaga kebersihan dan kelembaban daerah luka dengan membersihkan luka dan membalut luka supaya proses penyembuhan luka lebih cepat dan baik," ungkap dr Mesty Ariotedjo SpA di sela *virtual gathering* Hansaplant, Sabtu (6/3).

Saat anak mengalami luka, kata dr

Mesty, hal pertama yang dilakukan orang tua dan dokter adalah memberhentikan luka darah yang mengalir. Caranya, adalah mengangkat bagian luka tersebut dan ditekan dengan kain selama lima menit. Setelah darah berhenti, perlu dibersihkan dengan air mengalir untuk memastikan tidak ada lagi kotoran yang menempel demi mencegah infeksi. Apabila lukanya cukup dalam, berikan cairan antiseptic dan dilanjutkan dengan membalut lukanya.

"Dengan dibalut, bukan hanya untuk mencegah terjadinya infeksi dan menjaga kelembaban saja, tapi juga mencegah adanya kontak dengan permukaan yang tajam. Misalnya ujung meja atau tersengol yang akan memperlambat penyembuhan luka," tegas dia. (i/n)

Menurut Billy, akan terjadi perputaran dan efek berganda dari ajang PON XX 2021. Dampak ekonomi dari kegiatan jual-beli barang dan jasa yang mereka miliki akan merangsang roda bisnis masyarakat sekitar untuk dapat bertumbuh lebih besar lagi.

"Usulan ketiga yaitu mengiklankan komoditas lokal untuk dikenang dari PON XX 2021, seperti kopi, coklat dan tempat wisata," kata dia.

Billy memberikan penjelasan bahwa PON XX 2021 ini dapat menjadi panggung memperkenalkan komoditas-komoditas utama Papua yang dapat dikenal lebih luas lagi, setelah perhelatan ini berlangsung.

"Usulan keempat yaitu menyusun daftar lokasi wisata, mempromosikan, dan menggendeng para pemangku kepentingan, seperti investor, untuk ikut membangun yang terkait agar nantinya diberikan promosi yang sifatnya massive dan meluas," urai dia.

Billy berharap, setelah PON 2021 usai, masyarakat Indonesia akan dapat mengenal titik pariwisata menarik lain di Papua, dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ter-

sebut ke dua provinsi paling timur di Indonesia.

"Saya berharap agar tempat, bangunan, dan infrastruktur pendukung untuk PON 2021 ini dapat dipakai untuk keperluan yang bermanfaat bagi masyarakat," tutup Billy. (b1)

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 66 ("INSIGHT TERPROTEKSI 66")

PT Insight Investments Management selaku Manajer Investasi INSIGHT TERPROTEKSI 66 ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi INSIGHT TERPROTEKSI 66.

Pembubaran INSIGHT TERPROTEKSI 66 wajib dilakukan sehubungan dengan terpecahnya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (JKI) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan angka 2 huruf b Surat OJK No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang menyatakan bahwa INSIGHT TERPROTEKSI 66 wajib dibubarkan apabila dalam jangka waktu 160 (seratus enam puluh) Hari Bursa, INSIGHT TERPROTEKSI 66 yang pernyataan pendapatnya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini, Manajer Investasi telah menyampaikan rencana pembubaran INSIGHT TERPROTEKSI 66 kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat direksi PT Insight Investments Management No. 183/IR/000/III/2021 tanggal 17 Maret 2021.
- Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatangani akta pembubaran INSIGHT TERPROTEKSI 66 yang dibuat di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 17 Maret 2021
Manajer Investasi selaku Likuidator
INSIGHT TERPROTEKSI 66
PT Insight Investments Management
(terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan)

PENGUMUMAN

Dengan ini diberitahukan kepada para nasabah PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia (Perseroan), alamat d/a PT Mahkota Properti Indo Menara Bidakara 2, Lantai 17 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870 Telepon 021-2906 9455 , sehubungan dengan telah dilakukannya pengalihan administrasi rekening Efek dari Perseroan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021, para nasabah yang akan melakukan pemindahbukuan Efek dan/atau dana dalam Sub Rekening Efek milik nasabah tersebut dapat menghubungi KSEI melalui email ke helpdesk@ksej.co.id, atau melalui nomor telepon (021) 5152855 terkait dengan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam proses verifikasi.

Jakarta, 17 Maret 2021
PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia
Ttd
Direksi

Prodia
Untuk Diagnosa Lebih Baik

PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK ("PERSEROAN")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSBL")

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada:

Hari, tanggal : Kamis, 8 April 2021
Tempat : Prodia Tower Lantai 5
Jl. Kramat Raya No.150, Jakarta Pusat 10430, Indonesia.
Waktu : 09.00 WIB – selesai

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian persetujuan dan pembebasan tanggung jawab sehubungan (accrui et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukkan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPST

1. Mata acara RUPST butir 1, 2, 4 dan 5 sebagaimana disebutkan di atas merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Mata acara RUPST butir 3 merupakan pemenuhan kewajiban Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Mata acara RUPST butir 6 diajukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSBL):

Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSBL

Mata acara RUPSBL diajukan di antaranya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirinkan surat undangan tersendiri secara terpisah kepada masing-masing pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 15.00 WIB.
3. Materi dan bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia melalui situs web Perseroan www.prodia.co.id dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk *hardcopy*.
4. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. bagi pemegang saham perorangan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku;
 - b. bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek; dan
 - c. bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
5. Perseroan menghimbau agar pemegang saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom ("BAE"), dan untuk pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasa mereka yang sah, dengan ketentuan:
 - a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Kuasa harus diberikan berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi.
 - c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di situs web Perseroan www.prodia.co.id.
 - d. Semua surat kuasa yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani dapat dikirimkan melalui email: DM@datindo.com dan ditembuskan kepada corporate.secretary@prodia.co.id, dan aslinya harus sudah diterima oleh BAE (u.p., DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT) di alamat tersebut di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 5 April 2021 pukul 15.00 WIB.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), juga dapat memberikan kuasa kepada BAE melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") termasuk pemberian hak suara untuk mata acara Rapat, pada tautan <https://kses.ksej.co.id/> dan aslinya harus sudah diterima oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 7 April 2021 pukul 12.00 WIB.
7. Bagi Pemegang Saham maupun Tamu Undangan Rapat yang tidak hadir dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat dan memperhatikan ketentuan mengenai Protokol Pelaksanaan Rapat yang dapat dilihat pada situs web Perseroan www.prodia.co.id.
8. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Sehubungan dengan perkembangan terkini terkait pandemi global COVID-19 dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi kepada para pemegang saham bahwa Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan keselamatan dan kesehatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag* produk *souvenir*, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
11. Pemegang saham yang menghadiri Rapat akan diminta mengisi dan menandatangani "Deklarasi Kesehatan" yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.prodia.co.id dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan dan diimplementasikan oleh pengelola gedung Prodia Tower. Perseroan berhak mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan tersebut.

Jakarta, 17 Maret 2021
Direksi Perseroan

Investor Daily/David Gita Roza



Relaksasi PPNBM

Nasabah berada di kantor CIMB Finance, Bintaro, belum lama ini. Perusahaan pembiayaan menyambut baik kebijakan Pemerintah merelaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM) dan uang muka atau *down payment* (DP) 0 persen untuk kendaraan bermotor. Relaksasi PPNBM untuk mobil 1.500 cc kategori sedan dan 4x2 hingga 100%, dapat meningkatkan penjualan mobil baru di tengah pandemi Covid-19.

2026, BP Jamsostek Targetkan Dana Kelolaan Rp 800 Triliun

Oleh Prisma Ardianto

► JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menargetkan dana kelolaan mencapai Rp 800 triliun pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, BP Jamsostek memperbaiki tata kelola, investasi, dan efisiensi melalui digitalisasi.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, manajemen baru bertekad meneruskan program-program baik sepeninggalan manajemen lama dan melakukan sejumlah inovasi. Hal itu utamanya dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan para peserta dan memenuhi proyeksi di masa mendatang. "Fokus juga dilakukan terkait tata kelola. Dengan jumlah akumulasi (dana kelolaan) sekitar Rp 486 triliun pada 2020, semoga dalam lima tahun ke depan (2026) bisa sampai Rp 800 triliun. Tata kelola yang baik jadi penting, investasi juga harus kami jaga betul agar *yield*-nya optimal," kata Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3).

Selain itu, sambung dia, amanah untuk segera merealisasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) turut menjadi salah satu perhatian. Pekerjaan rumah lain adalah digitalisasi akan mendorong jumlah peserta, digitalisasi juga berguna untuk memangkas biaya-biaya di BP Jamsostek. Termasuk biaya personalia yang saat ini berkontribusi hingga 68%.

Anggoro mengungkapkan, pada akhirnya sejumlah tekad manajemen baru itu akan mendorong jumlah kepesertaan di BP Jamsostek dan memberi kemudahan peserta dalam proses klaim manfaat. Dua hal itu juga turut disinggung Komisi IX DPR, terutama mengenai kategori peserta pekerja migran Indonesia.

Pada kesempatan itu, BP Jamsostek melaporkan jumlah peserta aktif dari

pekerja migran Indonesia per Februari 2021 menyusut menjadi 365 ribu orang. Sedangkan jumlah peserta pekerja migran Indonesia yang terdaftar sebanyak 750 ribu.

"Kalau dilihat pada 2019 itu ada 539 ribu peserta, tahun 2020 turun atau berkurang menjadi 389 ribu. Ini kalau kami coba lihat penyebabnya adalah mereka selesai masa kerja dan tidak diperpanjang lagi, artinya tidak bisa berangkat lagi karena Covid-19. Jadi sekarang kurang lebih separuh yang terdaftar itu peserta aktif," terang dia.

Anggoro mengakui, masih banyak dari peserta pekerja migran Indonesia yang belum menjadi anggota BP Jamsostek. Setidaknya data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memaparkan jumlah pekerja migran Indonesia saat ini sekitar 6 juta orang. Dengan kata lain, BP Jamsostek baru merambah sekitar 12,5% pekerja migran Indonesia, itu pun sebagai peserta terdaftar bukan peserta aktif.

Dari sisi iuran, segmen peserta tersebut sejak 2017 sampai Februari 2021 dibukukan sebesar Rp Rp 265,79 miliar. Sebaliknya, klaim atau santunan yang dibayarkan relatif rendah atau hanya mencapai Rp 22 miliar. Klaim didominasi dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan klaim program Jaminan Kematian (JKM). Adapun total klaim termasuk manfaat pemulangan dan pemberdayaan sebesar Rp 338,99 juta terhadap 158 pekerja migran Indonesia, sebagai pengganti tiket pesawat kelas ekonomi.

Ditinjau dari lima negara tujuan para peserta terdaftar adalah Taiwan,



Anggoro Eko Cahyo

Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan. Sementara lima besar profesi para pekerja migran itu adalah membantu untuk orang tua, pembantu rumah tangga, pekerja, pekerja perkebunan, dan pekerja di pabrik.

"Kalau dari daerah asal dari peserta terdaftar, lima besarnya adalah Indramayu, Lombok, Lampung, Cirebon, dan Cilacap. Kalau dari BP2MI, total pekerja migran yang berangkat itu terbesar ada Jatim, Jateng, Jabar, NTB, dan Lampung. Kalau kami lihat ini potensi besar karena dari Jateng ini belum menjadi *top 5* dari peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Anggoro.

Menurut dia, peningkatan peserta dari segmen pekerja migran Indonesia perlu dimulai dengan memperbaiki dan mempermudah proses registrasi. Hal itu juga harus didukung kolaborasi terintegrasi dengan sejumlah pemangku kepentingan. Misalnya kerja sama dengan KBRI di wilayah pekerja migran tinggal. Saat pengurusan dokumen, para pekerja itu bisa dipaksa untuk mengikuti program jaminan sosial.

Lalu BP Jamsostek mesti mempermudah peserta ketika membayar iuran, hal ini untuk mendorong jumlah peserta aktif dan tidak hanya terdaftar. Paling tidak, kata Anggoro, pembayaran dapat didukung melalui bank-bank anggota Himbara yang sudah memiliki cabang di luar negeri. Semua pendekatan itu juga harus seiring dengan edukasi dan

sosialisasi manfaat karena rasio klaim yang begitu timpang.

"Memang betul penetrasi masih kurang, belum semua pekerja migran Indonesia peserta Jamsostek tahu memiliki manfaat apa saja, itu yang perlu kami perbaiki. Jadi perbanyak penambahan peserta, dan edukasi bagi peserta *existing* terkait manfaat yang bisa mereka terima," ungkap dia.

Anggoro menambahkan, perbaikan selanjutnya adalah mempercepat proses klaim dari para peserta pekerja migran Indonesia. Saat ini proses klaim masih membutuhkan waktu hingga lima hari kerja. Solusi dari fenomena itu akan dijawab BP Jamsostek melalui digitalisasi, khususnya otomasi proses bisnis seperti simplifikasi dokumen.

Persyarifan Rujukan

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB Nur Nadlifah menyoroti beberapa tantangan yang perlu segera diselesaikan BP Jamsostek. Tantangan pertama adalah rendahnya rasio klaim. Dia menengarai rendahnya rasio klaim akibat persyaratan yang rumit dan bertele-tele. Padahal sepanjang masa pandemi, banyak dari pekerja migran yang membutuhkan kemudahan klaim dari BP Jamsostek.

Lebih lanjut, kata dia, tantangan lainnya tentu permasalahan jumlah kepesertaan. Menurut Nur Nadlifah, jangan sampai para pekerja migran Indonesia lebih memilih untuk memproteksi dirinya melalui asuransi swasta karena alasan klaim yang lebih mudah.

"Dari jumlah pekerja migran Indonesia dengan jumlah kepercayaan yang ada itu masih sangat jauh, ini menjadi tantangan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan ketenagakerjaan. Tapi harus dibarengi dengan keluarnya klaim yang mudah. Saya curiga, jang-jangan BP2MI itu masih menggunakan asuransi sendiri (bukan BP Jamsostek), karena klaimnya lebih mudah. Misalnya ketika berkes belum ada, dia sudah bisa mengeluarkan uang santunan. Inikan menjadi tidak sehat, mereka menjadi tidak percaya, padahal ini amanat UU," tandas Nur Nadlifah.

Pelaku ICS Dapat Tingkatkan Akses Pembiayaan Sektor Informal

JAKARTA – Hadirnya pelaku *fin-tech* dari model bisnis *innovative credit scoring* (ICS) dinilai memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan akses pembiayaan, khususnya bagi masyarakat sektor informal. Apabila lembaga jasa keuangan seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan bekerja sama dengan ICS, maka bisa memberi pembiayaan lebih luas pada sektor informal tersebut.

Penilaian risiko kredit merupakan tahapan yang harus dilewati oleh setiap pengusaha, baik itu individu maupun UMKM, ketika mengajukan kredit atau pinjaman kepada pemberi pinjaman seperti bank dan perusahaan pembiayaan. Dalam melakukan penilaian risiko kredit tersebut, bank dan perusahaan *multifinance* umumnya berpegang pada prinsip 5C yang meliputi *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *condition* (kondisi), *capital* (modal), dan *collateral* (agunan/jaminan).

Seiring dengan perkembangan inovasi keuangan digital, penilaian risiko kredit kini dapat dilakukan pula oleh penyelenggara *fin-tech* ICS dengan memanfaatkan sumber data alternatif yang tidak terbatas pada rekening bank seseorang. Beberapa sumber data alternatif dapat berupa data belanja *online e-commerce*, data telekomunikasi (pulsar/tagihan telepon), dan jejak media sosial.

"Dengan adanya ICS ini pasti akses pembiayaan lebih tinggi, sasarannya ke sektor informal. Karena struktur pendapatan 20% dari kelas atas, 40% kelas menengah dan 40% kelas bawah. Kelas menengah saja belum semua terakses sektor keuangan formal, ini potensi luar biasa tinggi dari sisi pembiayaan," terang Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani dalam webinar, Selasa (16/3).

Inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara ICS diharapkan dapat men-



Aviliani

ingkatkan efektivitas penilaian risiko kredit, sehingga mengurangi risiko gagal bayar atau kredit macet. Selain itu, layanan yang diberikan oleh penyelenggara ICS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum memiliki rekening bank (*unbanked*), untuk dapat meningkatkan peluang akses pendanaan yang akhirnya diharapkan memertakan distribusi kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia.

"Di sisi lain, NPL bisa dikurangi, juga *moral hazard*, karena bisa memahami perilaku dari data. Jadi tidak menyerahkan semua ke asuransi atau penjaminan itu bisa *moral hazard* juga. Dengan adanya ICS ini orang akan mulai berperilaku baik agar bisa mendapat akses pembiayaan," sambung Aviliani.

Lalu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan naik. Sebab, kelompok masyarakat informal memiliki uang tapi tidak mampu jika membeli secara tunai seperti rumah atau kendaraan. Oleh karena itu, adanya industri ICS akan sangat membantu lembaga jasa keuangan untuk menangkap potensi masyarakat informal dengan memberikan penilaian kredit. Hadirnya ICS juga diharapkan bisa membuat pelaku UMKM naik kelas. (nid)

Astra Life Bayar Klaim Terkait Covid-19 Rp 25,8 M

JAKARTA – PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) melaporkan telah membayarkan klaim terkait Covid-19 mencapai Rp 25,8 miliar hingga 16 Februari 2021. Komitmen perusahaan itu diteruskan dengan meluncurkan produk asuransi jiwa dan kesehatan terbaru bersama PT Bank Permata Tbk.

Head Bancassurance and Direct Business Astra Life Ancilla Lily menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memang bakal mengganti biaya-biaya dari pasien terjangkit Covid-19. Dalam hal ini para nasabah bisa lebih tenang, tapi inisiatif juga dihadirkan industri asuransi jiwa yang turut membayarkan klaim atas asuransi meninggal dunia.

"Dari data kami klaim terkait Covid-19 periode Maret 2020 hingga 16 Februari 2021. Untuk klaim rawat inap ada sekitar 700 kasus dengan jumlah nominal sekitar Rp 5,8 miliar. Kemudian klaim meninggal dunia itu ada 120 kasus dengan jumlahnya sekitar Rp 20 miliar," ujar Ancilla saat konferensi pers virtual, Selasa (16/3).

Dia mengatakan, kehadiran pandemi membuat masyarakat melihat pentingnya asuransi jiwa. Pandemi juga merubah perilaku masyarakat terkait penggunaan layanan asuransi berbasis digital. Menyikapi perkembangan tersebut, perseroan terus berupaya meningkatkan layanan berbasis digital dengan pendekatan kolaborasi.

"Astra Life terus meningkatkan pelayanan berbasis digital yang memberikan kemudahan akses produk perlindungan jiwa dari kami

maupun di mitra kami. Dengan jalinan kerja sama harmonis lebih dari enam tahun, asuransi kesehatan kami melalui Bank Permata *mobile apps* ini mengalami kenaikan 700 kali lipat sejak Februari 2020," ungkap dia.

Melihat kebutuhan masyarakat dan potensi besar itu, Astra Life dan Bank Permata memperkuat kolaborasinya dengan meluncurkan produk asuransi jiwa dan kesehatan terbaru bernama *AVA iFamily Protection*. Produk tersebut diperuntukkan bagi keluarga inti yang bisa memproteksi hingga tujuh anggota keluarga, dengan pembelian yang mudah melalui aplikasi PermataMobile X.

Menurut Ancilla, ada tiga keunggulan yang dimiliki produk tersebut. Di antaranya adalah opsi premi kembali 100% di akhir masa kontrak, ada atau tidak adanya klaim. Kedua, dapat melindungi seluruh keluarga dalam satu polis. Ketiga, diskon premi setiap penambahan jumlah tertanggung dan bisa sampai 20%.

Pihaknya optimistis *AVA iFamily Protection* mampu diterima pasar dengan baik. Sejalan dengan pandangan positif masyarakat terkait asuransi dan tren perbaikan kinerja industri asuransi jiwa beberapa waktu belakangan. Pada kuartal IV-2020, pendapatan asuransi jiwa melesat 81% (qoq) menjadi Rp 91,86 triliun.

Ancilla juga menyatakan bahwa pihaknya menargetkan produk terbaru bisa merambah hingga 3.000 nasabah per bulan. "Kami dari sejak *launching* meningkat 700 kali lipat. Jadi kami menargetkan sekitar 3.000-an nasabah setiap bulan," terang dia. (pri)

Dua Pekan, BCA Expoversary Cetak Transaksi Rp 12,9 Triliun

JAKARTA – Gelaran BCA Expoversary Online 2021 sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-64 PT Bank Central Asia Tbk (BCA) masih terus berlangsung hingga 27 Maret mendatang. Sejak dibuka pada 27 Februari hingga 12 Maret atau dalam kurun waktu dua pekan, gelaran BCA Expoversary telah diakses lebih dari 350 ribu pengunjung dan mencetak transaksi senilai Rp 12,9 triliun.

Nasabah dan masyarakat yang mencari kendaraan dapat mengakses expo.bca.co.id untuk menelusuri penawaran spesial yang diberikan pada program KKB BCA. Selain suku bunga spesial, juga terdapat diskon biaya admin hingga uang muka (*down payment/DP*) murah.

"Semarak bunga spesial yang ditawarkan bagi pengunjung

expo tahun ini merupakan bunga terendah yang ada sepanjang sejarah. Proses transaksi juga kini sudah semakin lebih mudah karena dapat dilakukan secara *online*. Kami berharap melalui adanya penawaran ini dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional dan dapat mengakomodir kebutuhan kredit kendaraan bermotor yang masih bergeliat," ungkap Petrus Karim selaku ketua panitia BCA Expoversary Online 2021, Selasa (16/3).

Pada BCA Expoversary Online kali ini, perseroan menawarkan bunga spesial KKB untuk tenor 3 tahun sebesar 2,99%. Tak hanya itu, pengunjung juga akan mendapatkan diskon biaya administrasi hingga Rp 1 juta, DP mulai 20%, dan *instant approval* bagi nasabah terpilih.

Tak ubahnya menelusuri pameran *offline*, pengunjung akan dimudahkan dengan tampilan *web* yang *user friendly*. "Di bagian muka, pengunjung dapat memilih kota domisili untuk memilih mobil dan *dealer* yang tersedia di kota Anda. Setidaknya ada 18 merek mobil dan lebih dari 400 *dealer* mobil dari seluruh Indonesia turut berpartisipasi," tambah Petrus.

Sejumlah merek mobil yang berpartisipasi antara lain seperti BMW, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Honda, Daihatsu, Nissan, Hyundai dan masih banyak lainnya. Pameran virtual dapat diakses selama 24 jam penuh, sehingga nasabah dapat mengeksplorasi mobil yang dibutuhkan.

Petrus menambahkan, gelaran tahun ini bertepatan dengan adanya kebijakan relax-

sasi pajak penjualan barang mewah (PPNBM) 0% yang kian menyemarakkan *event* di BCA Expoversary. Hal ini memungkinkan pengunjung untuk mendapatkan kendaraan idaman dengan *budget* yang lebih terjangkau, berkat adanya relaxasi PPNBM, bunga KKB BCA, DP murah, diskon biaya admin hingga penawaran harga terbaik yang diberikan sejumlah *dealer*.

BCA Expoversary *online* ini dapat dikunjungi melalui laman www.expo.bca.co.id. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan kendaraan idaman dapat terus berlanjut kendati BCA Expoversary akan berakhir akhir bulan ini, yakni dengan mengakses KKB Virtual Mall melalui laman <https://KreditKerenBanget.com>. (nid)



BSI Gandeng Kemenparekraf

Nasabah berada di Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jakarta, belum lama ini. BSI bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengoptimalkan pembiayaan untuk UMKM khususnya ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

KCP

Difasilitasi OJK, Akhirnya Panitia Pemilihan BPA Bumiputera Terbentuk

JAKARTA – Semua pihak berkepentingan di tubuh Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sepakat membentuk panitia pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA). Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan penting dengan mempertemukan seluruh pihak mulai dari manajemen, pemegang polis, serikat pekerja, hingga perwakilan agen asuransi mutual tersebut.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Moch Ihsanuddin menilai, pertemuan itu cukup baik terselesaikan tanpa kehadiran langsung dari pihak OJK. Karena manajemen dan perwakilan pemegang polis membahas beberapa isu terkait penentuan masa depan Bumiputera.

Dia menjelaskan, isu yang dimaksud antara lain pembentukan panitia pemilihan BPA dan implementasi Pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera. Selain itu mekanisme penyampaian informasi kondisi perusahaan kepada para pemegang polis, dan hal-hal lain yang dipandang penting untuk menentukan masa depan perusahaan.

"Pertemuan ini akhirnya bisa menjadi forum musyawarah antara manajemen, SP NIBA dan berbagai kelompok/perkumpulan pemegang polis yang merupakan pemilik dari AJB Bumiputera yang selama ini sulit untuk dipertemukan," terang Ihsanuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3).

Dia memaparkan, hasil nyata dari pertemuan itu adalah kesepakatan bersama pembentukan panitia pe-

milihan BPA Bumiputera. Sesuai dengan anggaran dasar (AD) perusahaan, turut disepakati usulan kepada direksi terkait nama-nama perwakilan sebagai panitia pemilihan anggota BPA baru.

Kesepakatan itu terjadi antara manajemen Bumiputera yang diwakili oleh seorang direktur yaitu Dena Chaerudin. Sedangkan dua orang komisaris yaitu Zaenal Abidin dan Erwin T Setiawan meninggalkan pertemuan tanpa pemberitahuan. Kemudian juga disepakati wakil beberapa kelompok/perkumpulan pemegang polis, serikat pekerja, dan asosiasi agen.

"Panitia pemilihan anggota BPA berjumlah 15 orang terdiri dari unsur pemegang polis, asosiasi agen, dan serikat pekerja. Pemilihan akan memilih 11 anggota BPA baru dari 11 daerah pemilihan sesuai anggaran dasar AJB Bumiputera dan akan dilakukan melalui *e-voting*," terang Ihsanuddin.

Terkait keberadaan BPA Bumiputera, Ihsanuddin menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM telah disampaikan melalui surat OJK No.S-34/NB.23/2020 tanggal 28 Desember 2020, bahwa masa tugas BPA telah berakhir sejak 26 Desember 2020.

Sementara itu, OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan disebut memfasilitasi pertemuan antara manajemen Bumiputera dengan perwakilan beberapa perkumpulan pemegang polis dan serikat pekerja Bumiputera. (pri)



Inovasi FWD Insurance

CEO FWD Group Huynh Thanh Phong, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, Direktur Utama FWD Insurance Anantharaman Sridharan saat meresmikan employee program Bebas Duduk atau 'BeDug', sebuah inovasi terbaru bagi karyawan yang bekerja di kantor FWD Insurance di Jakarta, Selasa (16/3/2021). Sejak pertama hadir di Indonesia, FWD Insurance selalu berusaha untuk menghadirkan pendekatan inovatif dan fresh tidak hanya bagi nasabah tetapi juga untuk para karyawan. FWD Insurance menginisiasi program kerja yang inovatif untuk membangun lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan mengedepankan pengalaman karyawan dan hal ini merupakan terobosan terbaru yang tidak biasa ditemukan pada perusahaan asuransi.

BSI Targetkan Penjualan Sukuk Ritel SR014 Rp 500 Miliar

Oleh Nida Sahara

▶ JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai mitra distribusi baru penjualan surat berharga syariah negara ritel atau Sukuk Ritel SR014. Dalam penjualan perdana SR014, Bank Syariah Indonesia menargetkan penjualan sebesar Rp 500 miliar.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi berharap, dengan adanya Bank Syariah Indonesia sebagai mitra distribusi sukuk saat ini dapat mendiversifikasi kebutuhan produk perbankan khususnya investasi nasabah.

"Sukuk Ritel SR014 dengan kupon 5,47% bisa jadi pilihan investasi menarik bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan finansial nasabah atas produk-produk investasi," terang Hery dalam keterangan tertulis yang diterima *Investor Daily*, Selasa (16/3).

Untuk mencapai target penjualan Sukuk Ritel SR014, BSI menyiapkan strategi pemasaran yaitu kegiatan *pra-marketing* dan *cross selling* dengan nasabah sukuk yang akan jatuh tempo. Selain itu, pemasaran melalui media publikasi *online* seperti *digital marketing*, *digital flyer/poster*, hingga media publikasi lainnya seperti media sosial maupun media luar ruang lainnya.

Keunggulan berinvestasi pada SR014 di BSI karena perseroan merupakan bank syariah yang menawarkan produk *wealth management* dengan prinsip syariah secara lengkap. Tidak

hanya sukuk, BSI juga menawarkan produk investasi lain seperti reksa dana dan emas serta produk proteksi berupa *bancassurance*, sehingga nasabah dapat memenuhi segala kebutuhan dalam pengelolaan keuangannya sesuai syariah dalam 1 atap.

Instrumen investasi sukuk SR014 ini cukup menarik dan minat masyarakat terhadap produk ini cukup tinggi, mengingat sukuk SR014 merupakan produk investasi yang aman dengan kupon dan pokok yang dijamin negara, *return* menarik dengan persentase kupon yang kompetitif dengan rata-rata tingkat deposito perbankan serta pajak yang lebih rendah, mudah dicairkan dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sehingga nasabah memiliki potensi mendapatkan *capital gain* apabila dijual pada harga di atas harga beli awal, kupon tetap dibayarkan per bulan dengan nominal tetap, berbasis syariah sesuai fatwa DSN-MUI.

Nasabah dapat membuka rekening Bank Syariah Indonesia dan melakukan pemesanan SR014 melalui BSI Net Banking. Proses pendaftaran BSI Net Banking dapat dilakukan melalui



Hery Gunardi

kantor cabang BSI.

Kementerian Keuangan menawarkan sukuk ritel seri SR014 pada 26 Februari 2021 hingga 17 Maret 2021 dan akan diterbitkan pada 24 Maret 2021. Kupon yang ditawarkan adalah 5,47% per tahun dengan pajak 15%. SR014 diterbitkan dengan menggunakan akad *ijarah asset to be leased* dengan *underlying asset* barang milik negara (BMN) dan proyek APBN tahun 2021 dengan tenor tiga tahun. Nominal minimal pembelian adalah Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar.

SR014 bersifat dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Adapun transaksi penjualan atau pembelian di Pasar Sekunder dapat dilakukan mulai tanggal 11 Juni 2021. Kupon SR014 akan dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulan, dan apabila tanggal 10 jatuh di hari libur akan dibayarkan di hari kerja berikutnya tanpa kompensasi. Adapun kupon pertama SR014 mulai dibayarkan pada 10 April 2021.

Gandeng Kemenparekraf

Sementara itu, BSI berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengoptimalkan pembiayaan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kolaborasi ini diwujudkan dengan kontribusi dalam acara yang diselenggarakan Kemenparekraf untuk pemberdayaan UMKM.

Sampai Desember 2020, penyaluran pembiayaan BSI di sektor UMKM sebesar Rp 14,4 triliun dengan sebesar Rp 194,1 miliar di antaranya disalurkan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Direktur *Retail Banking* BSI Kokok Alun Akbar berharap dengan dukungan BSI, UMKM Indonesia bisa lebih maju berkembang dan dapat naik kelas. "Sebagai bank syariah yang inklusif dan melayani beragam segmen, BSI berkomitmen untuk dapat menjadi mitra dalam memberikan kebermanfaatannya baik di dunia maupun akhirat kepada segenap nasabah, termasuk UMKM khususnya ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," jelas Kokok.

Untuk memberdayakan UMKM, BSI telah menyiapkan beberapa strategi di antaranya adalah sinergi bersama pemerintah dalam proses pembinaan UMKM melalui kegiatan inklusi keuangan dan pemberian fasilitas pembiayaan ke UMKM binaan instansi, pemda, dan komunitas halal.

BSI juga berusaha memberdayakan UMKM *go digital* dengan mendorong sentra produksi UMKM Binaan *go digital* yang dihubungkan dengan *e-commerce*. BSI mendukung dan mendorong pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital melalui kerja sama penyediaan layanan dan produk pendanaan perbankan dengan *platform digital* seperti *e-commerce* yang terhubung dengan aplikasi pembiayaan UMKM BSI. BSI juga akan membangun sentra bisnis UMKM di beberapa daerah. (ris)

Optimalkan Layanan Remitansi, Bank Mandiri Jadi Member SWIFT-GPI



Panji Irawan

JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus memperkuat dan mengoptimalkan lini layanan pengiriman uang internasional atau remitansi dengan menjadi bagian dari *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication-Global Payment Innovation* (SWIFT-GPI). Hal ini merupakan inisiatif perseroan untuk menjadi bank penyedia layanan remitansi terbaik bagi seluruh nasabah dan para pelaku industri nasional.

SWIFT merupakan perusahaan global penyedia jaringan komunikasi finansial antarbank secara global dengan jumlah anggota lebih dari 11.000 institusi keuangan di lebih dari 200 negara di dunia. Sedangkan SWIFT-GPI adalah layanan inovasi SWIFT yang memungkinkan bank untuk menyediakan informasi transaksi *cross border* nasabah secara

transparan dan *real time*.

Menurut Direktur *Treasury and International Banking* Bank Mandiri Panji Irawan, bergabungnya Bank Mandiri ke SWIFT-GPI akan semakin mendorong peningkatan volume transaksi remitansi perseroan. Pasalnya, transaksi akan semakin termonitor dan besaran biaya juga semakin transparan.

Terkait dengan *monitoring* transaksi, dia mencontohkan, nasabah dapat mengetahui status transaksi valas, baik *incoming* ataupun *outgoing*, secara *real time*. Nasabah juga dapat mengetahui informasi mengenai biaya transaksi valas yang dikenakan oleh masing-masing bank yang terlibat dalam proses remitansi secara transparan.

"Sebagai salah satu bank berpredikat GPI Compliant, Bank Mandiri optimistis dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi valas internasional, terutama karena akses yang luas pada institusi keuangan global serta jumlah valuta asing yang bisa ditransaksikan," terang Panji dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3).

Panji menambahkan, saat ini Bank Mandiri menjadi salah satu pilihan utama nasabah, baik *wholesale* maupun ritel dalam melakukan transaksi valas internasional. Buktiannya, pada tahun lalu transaksi remitansi yang dilakukan nasabah di jaringan Bank Mandiri mencapai US\$ 130,94 miliar, tumbuh 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (mid)

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS PRESENTS



MUSYAWARAH DAERAH XVII HIPMI JAYA



CALON KETUA UMUM HIPMI JAYA MASA BAKTI 2021-2024

DEBAT CALON KETUA UMUM HIPMI JAYA

INOVASI KOLABORATIF BANGKITKAN JAKARTA

18 MARET 2021 19.00-21.00 WIB

LIVE BERITASATU & BERITASATU.COM



1 Andi Indra Hardiansyah Rukman



2 Noor Sona Maesana Mushoniff



3 M. Alipudin